



Katalog: 9199017

*Edisi 77*

Oktober 2016

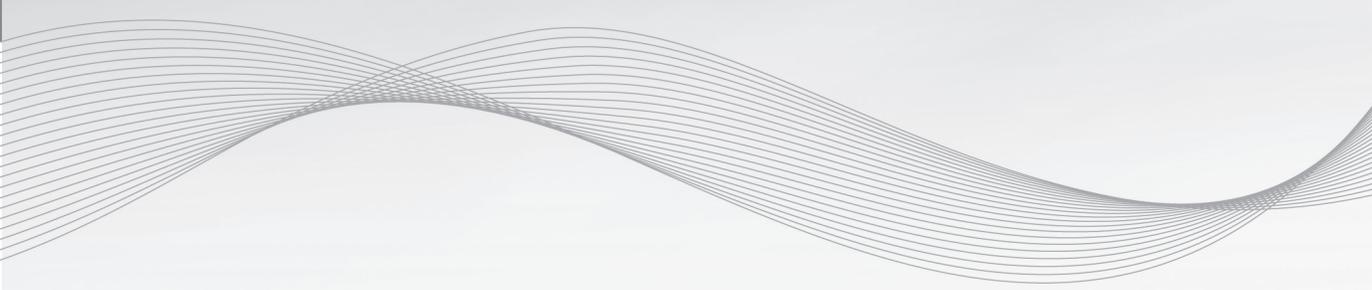
# Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi



**BADAN PUSAT STATISTIK**

*Edisi 77*  
Oktober 2016

Laporan Bulanan  
**Data Sosial Ekonomi**



# Laporan Bulanan

# Data Sosial Ekonomi

**Oktober 2016**

**ISSN:** 2087-930X

**Katalog:** 9199017

**No. Publikasi:** 03220.1614

**Ukuran Buku:** 18,2 cm x 25,7 cm

**Jumlah Halaman:** xxiv + 196 halaman

**Naskah:**

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Direktorat Statistik Industri

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

**Penyunting:**

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

**Gambar Kulit:**

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

**Dicetak dan Diterbitkan Oleh:**

©Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## HEADLINES

### 1. Inflasi

Pada September 2016 terjadi inflasi sebesar 0,22 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,97 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2016 terhadap September 2015) sebesar 3,07 persen.

### 2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (y-on-y) tumbuh 5,18 persen meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,66 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan II-2016 dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 4,02 persen.
- Ekonomi Indonesia secara kumulatif sampai dengan triwulan II-2016 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,04 persen.

### 3. Ekspor

- Nilai ekspor Agustus 2016 sebesar US\$12,63 miliar, naik 32,54 persen jika dibanding ekspor Juli 2016 dan turun 0,74 persen dibanding ekspor Agustus 2015.
- Nilai ekspor nonmigas Agustus 2016 mencapai US\$11,50 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,34 miliar, hasil industri pengolahan US\$9,46 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,70 miliar.

### 4. Impor

- Nilai impor Agustus 2016 sebesar US\$12,34 miliar, naik 36,84 persen dibanding impor Juli 2016 dan turun 0,49 persen jika dibanding impor Agustus 2015.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Agustus 2016 mencakup barang konsumsi sebesar US\$1,17 miliar, bahan baku/penolong US\$9,10 miliar, dan barang modal US\$2,01 miliar..

### 5. Kependudukan

- Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705 ribu orang.
- Piramida Penduduk Indonesia tahun 2016 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

## 6. Ketenagakerjaan

- Pada Februari 2016, jumlah penganggur sebesar 7,02 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,50 persen pada Februari 2016.

## 7. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Agustus 2016 naik masing-masing sebesar 0,28 persen dan 0,25 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Agustus 2016 naik sebesar 0,22 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Agustus 2016 naik 0,27 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

## 8. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Perdesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP September 2016 naik 0,45 persen dibanding Agustus 2016.
- Pada September 2016, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,32 persen.
- NTUP September 2016 naik 0,56 persen dibanding Agustus 2016.

## 9. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras September 2016 sebesar Rp13.140,00 per kg, turun 0,13 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga cabai merah naik 18,80 persen; minyak goreng naik 1,29 persen; sedangkan cabai rawit turun 7,77 persen; telur ayam ras turun 4,41 persen; daging ayam ras turun 1,96 persen; dan gula pasir turun 1,80 persen.

### 10. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, dan Industri Pengolahan) pada triwulan II-2016 naik 0,18 persen terhadap triwulan I-2016 (q-to-q). Demikian pula terhadap triwulan II-2015 (y-on-y) naik 1,19 persen.

### b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas September 2016 naik sebesar 0,52 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Agustus 2016 IHPB Umum naik sebesar 0,35 persen dibanding bulan sebelumnya.

## 11. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Kondisi bisnis triwulan II-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pelaku usaha optimis terhadap kondisi bisnis di triwulan II-2016. Nilai ITB triwulan II-2016 sebesar 110,24 sedangkan triwulan I-2016 sebesar 99,46.
- Kondisi bisnis triwulan III-2016 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II-2016. Perkiraan nilai ITB triwulan III-2016 sebesar 109,06 sedangkan triwulan II-2016 sebesar 110,24.
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan II-2016 lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2016. Nilai ITK triwulan II-2016 sebesar 107,93 sementara triwulan I-2016 sebesar 102,89.
- Kondisi ekonomi dan tingkat optimisme konsumen triwulan III-2016 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan II-2016. Perkiraan nilai ITK triwulan III-2016 sebesar 109,26 sedangkan triwulan II-2016 sebesar 107,93.

## 12. Produksi Tanaman Pangan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015

- Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami peningkatan sebanyak 4,55 juta ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014.
- Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,60 juta ton (3,18 persen) dibandingkan tahun 2014.
- Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,18 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 8,19 ribu ton (0,86 persen) dibandingkan tahun 2014.

## 13. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan II-2016 naik 5,54 persen dibanding triwulan II-2015 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 3,54 persen dari triwulan I-2016 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan II-2016 naik 6,56 persen dibanding triwulan II-2015 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 5,74 persen dari triwulan I-2016 (*q-to-q*).

## 14. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman selama Januari–Agustus 2016 mencapai 7,36 juta kunjungan atau naik 8,39 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015.

- TPK Hotel Berbintang pada bulan Agustus 2016 mencapai 55,21 persen atau turun 0,40 poin dibanding TPK Agustus 2015, namun mengalami kenaikan 1,44 poin dibandingkan TPK Juli 2016.

## 15. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Agustus 2016 turun 10,16 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Agustus 2016 naik 6,20 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Agustus 2016 turun 27,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Agustus 2016 naik 2,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

## 16. a. Kemiskinan Maret 2016

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang (10,86 persen), menurun 0,50 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).

## b. Ketimpangan Pengeluaran Maret 2016

Pada Maret 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,397. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,402.

## 17. Produksi Hortikultura

- Produksi cabai besar pada tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton.
- Produksi cabai rawit pada tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton.
- Produksi bawang merah pada tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton.

## 18. a. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2014

Biaya produksi per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Sedangkan nilai produksinya masing-masing adalah sebesar Rp17,2 juta; Rp10,2 juta; Rp12,0 juta; dan Rp9,0 juta.

## b. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Jeruk Tahun 2014

- Biaya produksi usaha tanaman cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri

tahun 2014 masing-masing mencapai Rp52,1 juta; Rp34,0 juta; dan Rp67,2 juta.

- Biaya produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri dan yang ditekankan tahun 2014 masing-masing mencapai Rp5,4 juta dan Rp5,7 juta.

**c. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014**

Rata-rata biaya produksi usaha setahun per hektar untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp9,7 juta (57,05 persen dari total nilai produksi); karet sebesar Rp9,2 juta (71,54 persen dari total nilai produksi); dan tebu Rp24,2 juta (77,98 persen dari total nilai produksi).

**d. Struktur Ongkos Usaha Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging Tahun 2014.**

- Biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen).
- Biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen).
- Biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen).
- Biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

**e. Struktur Ongkos Usaha Perikanan Tahun 2014**

- Biaya produksi per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen terhadap nilai produksi); Rp4,2 juta (71,91 persen terhadap nilai produksi); dan Rp3,2 juta (44,16 persen terhadap nilai produksi).
- Biaya produksi per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor dan perahu motor tempel masing-masing sebesar Rp4,1 juta (66,54 persen terhadap nilai produksi) dan Rp436 ribu (53,71 persen terhadap nilai produksi).

**f. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jati, Mahoni, Sengon Tahun 2014**

Biaya produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, dan sengon masing-masing Rp0,9 juta; Rp1,2 juta; dan Rp0,8 juta atau masing-masing sebesar 10,20 persen; 19,30 persen; dan 20,71 persen terhadap nilai produksi.

**g. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Tahun 2014**

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

**19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014**

- Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa<sup>1</sup>, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.
- Sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
- Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005<sup>2</sup>.
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

<sup>1</sup> Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat.

<sup>2</sup> Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

## 20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Agustus 2016

- Rupiah terdepresiasi 1,00 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terdepresiasi 1,59 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terdepresiasi 3,41 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terdepresiasi 2,42 persen terhadap euro.

## 21. Perdagangan Komoditas Strategis 2015

Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara; dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

## 22. Indeks Demokrasi Indonesia 2015

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 mencapai angka 72,82 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini relatif tetap dibandingkan dengan angka IDI 2014 yang sebesar 73,04. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Perubahan dari 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil turun 2,32 poin (dari 82,62 menjadi 80,30), (2) Hak-Hak Politik yang naik 6,91 poin (dari 63,72 menjadi 70,63), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 8,94 poin (dari 75,81 menjadi 66,87).
- Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
- Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Seandainya indikator lama dipertahankan, maka sebetulnya nilai IDI 2015 mencapai 73,12, yang berarti mengalami sedikit kenaikan dari capaian 2014 (sebesar 73,04).

## 23. Indeks Pembangunan Manusia

- Pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55. Angka ini meningkat sebesar 0,65 poin atau tumbuh sebesar 0,94

persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2014 yang sebesar 68,90.

- Pada tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang” yaitu masih berada pada kisaran 60 sampai dengan 70. Status tersebut masih sama dengan kondisi tahun 2014.

## KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Oktober 2016 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. September 2016), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan II-2016), ekspor-impor (s.d. Agustus 2016), perkembangan tahunan penduduk (s.d. Juni 2014), ketenagakerjaan (s.d. Februari 2016), upah buruh (s.d. Agustus 2016), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. September 2016), harga produsen (s.d. triwulan II-2016) dan harga perdagangan besar (s.d. September 2016), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan II-2016), produksi tanaman pangan (angka tetap tahun 2015 dan angka ramalan I tahun 2016), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan II-2016), pariwisata dan transportasi (s.d. Agustus 2016), data kemiskinan (Maret 2016), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2016, struktur ongkos usaha pertanian dan survei kehutanan 2014, nilai tukar eceran rupiah Agustus 2016, produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah tahun 2014, perdagangan komoditas strategis 2015, indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2015, serta indeks pembangunan manusia 2015.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui *website* BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 5 Oktober 2016  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Republik Indonesia



**Dr. Suhariyanto**



## DAFTAR ISI

<i>HEADLINES</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GRAFIK .....	xxi
FOKUS PERHATIAN .....	1
I. INFLASI SEPTEMBER 2016 .....	15
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II-2016.....	20
III. EKSPOR AGUSTUS 2016 .....	34
IV. IMPOR AGUSTUS 2016.....	39
V. KEPENDUDUKAN JUNI 2016.....	46
VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2016 .....	52
VII. UPAH BURUH AGUSTUS 2016.....	58
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN SEPTEMBER 2016.....	60
IX. HARGA PANGAN SEPTEMBER 2016 .....	67
X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN II-2016 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR SEPTEMBER 2016 .....	74
XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN II-2016 .....	83
XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA TETAP (ATAP) 2015.....	91
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN II- 2016 .....	96
XIV. PARIWISATA AGUSTUS 2016.....	101
XV. TRANSPORTASI NASIONAL AGUSTUS 2016.....	105
XVI. KEMISKINAN MARET 2016 DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2016.....	108
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014 .....	119
XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014.....	124

XIX.	TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014 .....	138
XX.	PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH AGUSTUS 2016.....	155
XXI.	PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2015.....	160
XXII.	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2015 .....	163
XXIII.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2015 .....	169
XXIV.	SUPLEMEN: METODOLOGI .....	173

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota September 2016 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	17
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi September 2016 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100).....	17
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen) .....	18
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen) .....	18
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Juli–Agustus 2016 (persen) .....	19
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) .....	22
Tabel 2.2	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah).....	23
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen) .....	25
Tabel 2.4	Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran.....	26
Tabel 2.5	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen) .....	27
Tabel 2.6	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan II-2016 (persen).....	28
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (persen) .....	30
Tabel 2.8	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2013–2015 (triliun rupiah).....	31
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (persen) .....	32
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (triliun rupiah) .....	32
Tabel 2.11	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2015 .....	33
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ( $\Delta\%$ ).....	35
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2015–2016 .....	36

Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya ( $\Delta$ ) .....	36
Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya ( $\Delta$ ).....	37
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2014–2016 (FOB:juta US\$) .....	37
Tabel 3.6	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Agustus 2016.....	38
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Agustus 2015 dan 2016 .....	41
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Agustus 2015–Agustus 2016.....	41
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya Januari–Agustus 2015 dan 2016 .....	42
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Agustus 2016 .....	42
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Agustus 2015 dan 2016 .....	43
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2015–Agustus 2016 (Nilai CIF: Juta US\$) .....	43
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Agustus 2016 (juta US\$).....	44
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Agustus 2015–Agustus 2016 (miliar US\$).....	44
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Agustus 2016 .....	45
Tabel 5.1	Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016 (ribu orang) .....	46
Tabel 5.2	Demografi Penduduk Indonesia, 2016.....	51
Tabel 6.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2014–2016 (juta orang).....	52
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014–2016 (juta orang) .....	54
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2014–2016 (juta orang) .....	55

Tabel 6.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016 (juta orang) .....	55
Tabel 6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016 (persen) .....	56
Tabel 6.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi 2015–2016.....	57
Tabel 7.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Agustus 2014–Agustus 2016 .....	59
Tabel 8.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100) .....	62
Tabel 8.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran September 2014–September 2016.....	65
Tabel 8.3	Tingkat Inflasi Perdesaan September 2016, Tahun Kalender, dan <i>Year-on-Year</i> 2016 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	66
Tabel 8.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya (2012=100) .....	66
Tabel 9.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, September 2015–September 2016.....	68
Tabel 9.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, September 2015–September 2016.....	70
Tabel 9.3	Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah ( <i>Broken</i> ), September 2015–September 2016 .....	71
Tabel 9.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok September 2015–September 2016 (rupiah) .....	72
Tabel 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan II-2016.....	75
Tabel 10.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor Triwulan II-2016 .....	78
Tabel 10.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia Juli 2016–September 2016, (2010=100) .....	79
Tabel 10.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar September 2016 (2010=100) .....	80

Tabel 10.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia September 2016 Menurut Jenis Bangunan (2010=100).....	81
Tabel 11.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2016 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha.....	84
Tabel 11.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2016 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk .....	85
Tabel 11.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016 dan Triwulan II-2016 Menurut Variabel Pembentuk.....	87
Tabel 11.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016 Menurut Variabel Pembentuk .....	89
Tabel 11.5	Indeks Tendensi Konsumen <sup>1)</sup> Triwulan II-2015–Triwulan II-2016 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi .....	90
Tabel 12.1	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015 .....	91
Tabel 12.2	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut <i>Subround</i> , 2013–2015.....	92
Tabel 12.3	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015 .....	93
Tabel 12.4	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015 .....	94
Tabel 12.5	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lainnya, 2013–2015 .....	95
Tabel 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2014–2016 (persen) 2010=100 .....	97
Tabel 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2014–2016 (persen) 2010=100 .....	97
Tabel 13.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan I-2016 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen) .....	98
Tabel 13.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan Triwulan I-2014–Triwulan II-2016 (persen).....	100

Tabel 13.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan II-2016 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen).....	100
Tabel 14.1	Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia.....	101
Tabel 14.2	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Agustus 2015–Agustus 2016.....	104
Tabel 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Agustus 2015–Agustus 2016.....	107
Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2015–Maret 2016.....	109
Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, Maret 2016.....	111
Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di Indonesia Menurut Daerah, September 2015–Maret 2016.....	112
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2016.....	113
Tabel 16.5	Nilai <i>Gini Ratio</i> Menurut Daerah, 2010–Maret 2016.....	114
Tabel 16.6	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia, Maret 2015–Maret 2016 (Persentase).....	116
Tabel 16.7	Gini Ratio menurut Provinsi, Maret 2015–Maret 2016.....	118
Tabel 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	120
Tabel 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	121
Tabel 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	123
Tabel 18.1	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014.....	124
Tabel 18.2	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014.....	125

Tabel 18.3	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014.....	126
Tabel 18.4	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014.....	127
Tabel 18.5	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014 .....	127
Tabel 18.6	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014 .....	128
Tabel 18.7	Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014 .....	129
Tabel 18.8	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah, 2014 .....	130
Tabel 18.9	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014.....	132
Tabel 18.10	_Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014.....	133
Tabel 18.11	_Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014 .....	134
Tabel 18.12	Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014 .....	135
Tabel 18.13	_Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014.....	136
Tabel 19.1	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi 2014 .....	143
Tabel 19.2	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014.....	144
Tabel 19.3	IKG Desa Menurut Provinsi, 2014 .....	145
Tabel 21.1	Rata-rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Menurut Komoditi, 2015.....	162
Tabel 22.1	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi , 2014–2015 .....	168
Tabel 23.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2014–2015 ...	172

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2014–2016.....	15
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2015–2016 .....	19
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2015 s.d. Triwulan II-2016 (persen).....	20
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2016 (persen).....	21
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan II-2016 (persen) .....	24
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan II-2016 (persen).....	26
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013–2015 (persen).....	29
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB) Agustus 2014–Agustus 2016 .....	34
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF) Agustus 2015–Agustus 2016 .....	39
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF) Januari–Agustus 2015 dan 2016 .....	40
Grafik 5.1	Piramida Penduduk Indonesia, 2016 .....	47
Grafik 5.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2016 .....	48
Grafik 5.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971–2016 .....	49
Grafik 6.1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2014–2016 (juta orang).....	53
Grafik 7.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Agustus 2014–Agustus 2016 .....	58
Grafik 8.1	Nilai Tukar Petani (NTP), September 2015–September 2016 (2012=100).....	60
Grafik 8.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) September 2015–September 2016 (2012=100).....	61
Grafik 8.3	Inflasi Perdesaan, September 2014–September 2016.....	64

Grafik 9.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas September 2015–September 2016 .....	67
Grafik 9.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas September 2015–September 2016 .....	69
Grafik 9.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Juni 2015–September 2016 (rupiah) .....	73
Grafik 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor Triwulan II-2013 s.d. Triwulan II-2016 .....	75
Grafik 10.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia September 2013–September 2016 .....	80
Grafik 10.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Januari–September 2016 .....	82
Grafik 11.1	Indeks Tendensi Bisnis <sup>1)</sup> Triwulan II-2011–Triwulan II-2016 dan Perkiraan Triwulan III-2016 .....	86
Grafik 11.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi .....	88
Grafik 11.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi .....	89
Grafik 12.1	Pola Panen Padi, 2013–2015 .....	92
Grafik 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan ( <i>y-on-y</i> ) Triwulan II-2014–Triwulan II-2016 .....	96
Grafik 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan ( <i>y-on-y</i> ) Triwulan II-2014–Triwulan II-2016 .....	99
Grafik 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk Agustus 2014–Agustus 2016 .....	102
Grafik 14.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Agustus 2014–Agustus 2016 .....	103
Grafik 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Agustus 2015–Agustus 2016 .....	105
Grafik 16.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2015–Maret 2016 .....	108
Grafik 16.2	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> , 2010–Maret 2016 .....	115
Grafik 16.3	Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah Maret 2015–Maret 2016 .....	116

Grafik 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	119
Grafik 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	121
Grafik 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	123
Grafik 18.1	Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014.....	135
Grafik 18.2	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014.....	137
Grafik 18.3	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014.....	137
Grafik 19.1	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014.....	138
Grafik 19.2	Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014.....	139
Grafik 19.3	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014.....	140
Grafik 19.4	Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014.....	140
Grafik 19.5	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama.....	141
Grafik 19.6	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik.....	141
Grafik 19.7	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih.....	142
Grafik 19.8	Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014.....	146
Grafik 20.1	Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Agustus 2016 dibanding Juli 2016 M.IV).....	159
Grafik 20.2	Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir).....	159
Grafik 21.1	Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2015.....	160
Grafik 22.1	Perkembangan IDI Nasional, 2009–2015.....	163

Grafik 22.2	Perkembangan Indeks Aspek, 2009–2015 .....	164
Grafik 22.3	Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2014–2015 .....	165
Grafik 22.4	Perkembangan IDI Provinsi, 2014–2015 .....	167
Grafik 23.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2015 .....	169
Grafik 23.2	Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2015 .....	170
Grafik 23.3	Indeks Komponen IPM Indonesia, 2014–2015 .....	171

## FOKUS PERHATIAN

### 1. Pada September 2016 terjadi Inflasi sebesar 0,22 persen

Pada September 2016 terjadi Inflasi sebesar 0,22 persen. Dari 82 kota, 58 kota mengalami inflasi dan 24 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,85 persen dengan IHK 129,12 dan terendah terjadi di Purwokerto dan Banyuwangi sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing 121,81 dan 121,84. Inflasi September 2016 sebesar 0,22 persen lebih tinggi dibanding kondisi September 2015 yang mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,97 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2016 terhadap September 2015) sebesar 3,07 persen.

### 2. Ekonomi Indonesia Triwulan II-2016 tumbuh 5,18 persen

Ekonomi Indonesia triwulan II-2016 dibanding triwulan II-2015 (y-on-y) tumbuh 5,18 persen, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,66 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan didukung hampir oleh semua lapangan usaha, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipicu oleh pertumbuhan pada semua komponen konsumsi, yaitu PK-RT yang tumbuh 5,04 persen, PK-LNPRT yang tumbuh 6,72 persen dan PK-P yang tumbuh 6,28 persen. Komponen non konsumsi mengalami kontraksi kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 5,06.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2016 (q-to-q) tumbuh sebesar 4,02 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,90 persen yang dipengaruhi efek musiman pada tanaman perkebunan dan pergeseran musim panen tanaman padi. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 didorong oleh semua

komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 36,16 persen.

Sampai dengan triwulan II-2016 (c-to-c), ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 11,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 6,56 persen. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingginya pertumbuhan PK-LNPRT yaitu mulai cairnya bantuan keuangan dari pemerintah (APBN/APBD) untuk organisasi kemasyarakatan, partai politik dan lembaga keagamaan.

**3. Nilai ekspor Indonesia Agustus 2016 mencapai US\$12,63 miliar, turun 0,74 persen (*year-on-year*)**

Nilai ekspor Indonesia Agustus 2016 mencapai US\$12,63 miliar, turun 0,74 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), sementara dibanding ekspor Juli 2016 naik 32,54 persen. Nilai ekspor nonmigas Agustus 2016 mencapai US\$11,50 miliar atau naik 34,84 persen dibanding ekspor nonmigas Juli 2016. Ekspor migas pada Agustus 2016 mencapai US\$1,13 miliar atau naik 12,95 persen dibanding bulan sebelumnya. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Agustus 2016 turun sebesar 4,37 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2015, dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya turun 20,83 persen, demikian juga ekspor nonmigas hasil pertanian turun 20,69 persen.

**4. Nilai impor Indonesia Agustus 2016 sebesar US\$12,34 miliar, turun sebesar 0,49 persen (*year-on-year*)**

Nilai impor Indonesia Agustus 2016 sebesar US\$12,34 miliar, atau naik 36,84 persen dibanding impor Juli 2016, dan turun 0,49 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Agustus 2016 sebesar US\$10,58 miliar atau naik 40,90 persen dibanding Juli 2016. Sementara impor migas Agustus 2016 tercatat sebesar US\$1,76 miliar, naik

16,55 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Agustus 2016 adalah golongan mesin dan peralatan mekanik sebesar US\$559,7 juta, atau naik 41,68 persen dibanding Juli 2016 (US\$1,34 miliar). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–Agustus 2016 ditempati oleh Tiongkok (US\$19,45 miliar) dengan pangsa 25,80 persen.

**5. Jumlah penduduk Indonesia Juni 2016 sebanyak 258.705 ribu orang**

Hasil proyeksi penduduk Indonesia keadaan Juni 2016 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 258.705 ribu orang terdiri dari 129.988,7 ribu orang laki-laki dan 128.716,3 ribu orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010–2016 sekitar 1,36 persen per tahun.

**6. Pada Februari 2016, jumlah penduduk yang bekerja turun 200 ribu orang dibandingkan Februari 2015**

Dalam setahun terakhir (Februari 2015–Februari 2016), jumlah penduduk yang bekerja turun sebanyak 200 ribu orang, penurunan ini terutama terjadi di Sektor Pertanian, sedangkan Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa Kemasyarakatan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, masing-masing sebanyak 1,8 juta orang (6,94 persen) dan 380 ribu orang (1,96 persen).

**7. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Agustus 2016 masing-masing sebesar Rp48.120,00 dan Rp82.348,00**

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Agustus 2016 sebesar Rp48.120,00, naik 0,28 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil naik sebesar 0,22 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Agustus 2016 tercatat Rp82.348,00, naik 0,25 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil naik sebesar 0,27 persen.

**8. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2016 tercatat 102,02, naik 0,45 persen dibanding Agustus 2016, inflasi perdesaan sebesar 0,32 persen dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) naik sebesar 0,56 persen dibanding Agustus 2016**

NTP September 2016 tercatat 102,02 atau naik sebesar 0,45 persen dibanding NTP Agustus 2016 sebesar 101,56. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di empat subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan naik masing-masing 0,42 persen, 0,34 persen, 0,14 persen, dan 0,94 persen. Sebaliknya Subsektor Perikanan turun sebesar 0,06 persen.

Pada September 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,32 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 129,46. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 27 provinsi dan deflasi di 6 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 0,94 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,03 persen. Deflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo sebesar 0,31 persen, sedangkan deflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat sebesar 0,10 persen.

Pada September 2016 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,56 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It (0,73 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPPBM (0,16 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya semua subsektor penyusun NTUP yaitu NTUP Tanaman Pangan (0,49 persen), Tanaman Hortikultura (0,42 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,36 persen), Peternakan (1,02 persen), dan Perikanan (0,12 persen).

**9. Rata-rata harga beras pada September 2016 sebesar Rp13.140,00 per kg, turun 0,13 persen**

Rata-rata harga beras pada September 2016 sebesar Rp13.140,00 per kg, turun 0,13 persen dari bulan sebelumnya. Dibandingkan September 2015, harga beras naik 1,33 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,07 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah cabai merah naik 18,80 persen; minyak goreng naik 1,29

persen; sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga adalah cabai rawit turun 7,77 persen; telur ayam ras turun 4,41 persen; daging ayam ras turun 1,96 persen; dan gula pasir turun 1,80 persen.

**10. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada triwulan II-2016 naik 0,18 persen terhadap triwulan I-2016 (q-to-q). Demikian pula terhadap triwulan II-2015 (y-on-y) naik 1,19 persen**

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen pada triwulan II-2016 (q-to-q). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian (6,59 persen) dan IHP Sektor Industri Pengolahan (0,10 persen), sedangkan IHP Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar 2,09 persen.

Dibandingkan terhadap triwulan II-2015 (y-on-y), IHP naik 1,19 persen. IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,14 persen dan 2,45 persen. Sebaliknya Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 11,34 persen.

**b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas September 2016 naik sebesar 0,52 persen dari bulan sebelumnya**

IHPB Umum Nonmigas September 2016 naik sebesar 0,52 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas yaitu 1,97 persen dan terendah terjadi pada Sektor Pertanian yaitu 0,15 persen sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri, dan Kelompok Barang Impor Nonmigas masing-masing naik sebesar 0,38 persen; 0,27 persen; dan 0,18 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Agustus 2016 naik 0,35 persen. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 2,76 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi September 2016 naik sebesar 0,12 persen. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal sebesar 0,16 persen.

**11. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2016 sebesar 110,24 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2016 sebesar 107,93**

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan II-2016 sebesar 110,24 berarti kondisi bisnis meningkat dari triwulan sebelumnya. Hal ini karena adanya peningkatan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 114,70), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 113,09), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 104,95). Pada triwulan III-2016 kondisi bisnis diprediksi meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 109,06).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan II-2016 sebesar 107,93 artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITK triwulan I-2016 adalah 102,89). Perbaikan kondisi ekonomi konsumen di tingkat regional terjadi di seluruh provinsi. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2016 terutama didorong oleh naiknya tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 111,87), diikuti oleh naiknya daya beli dilihat dari indeks pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 110,37). Sedangkan kenaikan pendapatan rumah tangga tidak setinggi komponen lainnya (nilai indeks sebesar 104,97).

Pada triwulan III-2016 kondisi ekonomi konsumen diprediksi akan meningkat dengan nilai ITK sebesar 109,26. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan III-2016 terjadi di seluruh provinsi.

**12. Produksi padi tahun 2015 (ATAP 2015) sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 6,42 persen dibanding tahun 2014**

Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebanyak 4,55 juta ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan produktivitas sebesar 2,06 kuintal/hektar (4,01 persen). Dibandingkan tahun 2014, produksi jagung tahun 2015 naik sebanyak 0,60 juta ton (3,18 persen) yang disebabkan oleh kenaikan produktivitas sebesar 2,24 kuintal/hektar (4,52 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 49,65 ribu hektar (1,29 persen). Produksi kedelai

tahun 2015 meningkat sebanyak 8,19 ribu ton (0,86 persen) dibandingkan tahun 2014 yang disebabkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,17 kuintal/hektar (1,10 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 1,59 ribu hektar (0,26 persen).

**13. Pertumbuhan produksi IBS naik 5,54 persen dan IMK naik 6,56 persen pada triwulan II-2016 (year-on-year)**

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan II-2016 naik 5,54 persen dibanding triwulan II-2015 (*year-on-year*) dan mengalami kenaikan 3,54 persen dari triwulan I-2016 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada April 2016 naik 0,17 persen dari April 2015, Mei 2016 naik 7,41 persen dari Mei 2015, dan Juni 2016 naik 9,12 persen dari Juni 2015. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan II-2016 naik 6,56 persen dibanding triwulan II-2015 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 5,74 persen dari triwulan I-2016 (*q-to-q*).

**14. Jumlah kunjungan wisman Agustus 2016 mencapai 1,03 juta kunjungan**

Kunjungan wisman ke Indonesia selama Agustus 2016 sebanyak 1,03 juta kunjungan, yang terdiri atas 970,02 ribu kunjungan wisman melalui 19 pintu utama dan 61,96 ribu kunjungan wisman selain dari 19 pintu utama.

Sementara itu, Tingkat Penghuni Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Agustus 2016 mencapai 55,21 persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,40 poin dibandingkan TPK Agustus 2015.

**15. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Agustus 2016 mencapai 7,1 juta orang, naik 11,54 persen (year-on-year)**

Pada Agustus 2016, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 7,1 juta orang atau naik 11,54 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional naik 5,25 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 5,18 persen, dan penumpang kereta api naik 6,45 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan udara domestik turun 10,16 persen, angkutan udara internasional naik 6,20 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 27,16 persen, dan penumpang kereta api naik 2,63 persen.

16. a. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang (10,86 persen), menurun 0,50 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen)

Selama periode September 2015–Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016). Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).

- b. Pada Maret 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,397. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,402

*Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 0,410 turun sebesar 0,018 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2015 yang sebesar 0,428 dan turun 0,009 poin dibanding *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,419. Sementara *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2015 yang sebesar 0,334 dan menurun 0,002 poin dibanding *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,329.

17. Produksi cabai besar sebesar 1,075 juta ton, cabai rawit sebesar 0,800 juta ton dan bawang merah sebesar 1,234 juta ton

Produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen). Produksi cabai rawit segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 86,98 ribu ton (12,19 persen). Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, produksi meningkat sebesar 223,22 ribu ton (22,08 persen).

**18. a. Biaya produksi per musim tanam per hektar padi sawah sebesar 12,7 juta dengan komponen terbesar upah pekerja dan jasa pertanian sebesar 48,23 persen**

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Komponen terbesar dari total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai adalah untuk upah pekerja dan jasa pertanian yang masing-masing adalah sebesar 48,23 persen (Rp6,1 juta); 62,36 persen (Rp4,9 juta); 44,93 persen (Rp4,1 juta); dan 44,82 persen (Rp4,1 juta) dari total biaya.

**b. Biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta**

Total biaya produksi usaha per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri untuk tanaman cabai merah Rp52,1 juta; tanaman cabai rawit Rp34,0 juta; tanaman bawang merah Rp67,2 juta; tanaman jeruk Rp5,4 juta. Persentase biaya produksi terbesar adalah upah pekerja, yaitu untuk cabai merah sebesar 47,74 persen; cabai rawit sebesar 54,85 persen; dan tanaman jeruk sebesar 32,07 persen. Untuk bawang merah persentase biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen.

**c. Rata-rata biaya produksi kelapa sawit setahun per hektar mencapai Rp9,7 juta**

Pengeluaran paling besar digunakan untuk tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Sedangkan rata-rata biaya usaha perkebunan karet setahun per hektar mencapai Rp9,2 juta dengan pengeluaran paling besar digunakan untuk biaya tenaga kerja sebesar 57,09 persen. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya produksi setahun per hektar mencapai Rp24,2 juta, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran sewa lahan yang mencapai 32,37 persen dari total biaya produksi.

**d. Biaya produksi sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun**

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen). Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

**e. Biaya produksi per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta**

Jumlah biaya per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit sebesar Rp3,0 juta (41,33 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha bandeng dan udang windu adalah upah pekerja, yaitu sebesar Rp965 ribu (23,21 persen) dan Rp796 ribu (24,73 persen).

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing sebesar Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen).

**f. Biaya produksi terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen**

Pengeluaran terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen. Upah pekerja usaha untuk tanaman mahoni sebesar 63,00 persen dan tanaman sengon sebesar 59,00 persen.

**g. Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga**

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

**19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014**

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa<sup>3</sup>, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur:

- Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) tidak ada SD (termasuk MI).
- Terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) tidak ada SLTP.
- Terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) tidak ada SLTA.
- Sebanyak 117 kecamatan (1,65 persen) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).
- Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13 persen) tidak ada pasar dengan bangunan.
- Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40 persen) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.

---

<sup>3</sup> Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

- Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) tidak ada penerangan di jalan utama desa.
- Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

Berdasarkan Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.

Menurut Podes 2014, terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005<sup>4</sup>.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0–100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

## 20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Agustus 2016

### a. Rupiah terdepresiasi 1,00 persen terhadap dolar Amerika.

Rupiah terdepresiasi 1,00 persen terhadap dolar Amerika pada Agustus 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika terjadi pada minggu kelima Agustus 2016 yang mencapai Rp13.237,81 per dolar Amerika.

---

<sup>4</sup> Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

**b. Rupiah terdepresiasi 1,59 persen terhadap dolar Australia.**

Rupiah terdepresiasi 1,59 persen terhadap dolar Australia pada Agustus 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia terjadi pada minggu keempat Agustus 2016 yang mencapai Rp10.033,89 per dolar Australia.

**c. Rupiah terdepresiasi 3,41 persen terhadap yen Jepang.**

Rupiah terdepresiasi 3,41 persen terhadap yen Jepang pada Agustus 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang terjadi pada minggu keempat Agustus 2016 yang mencapai Rp130,74 per yen Jepang.

**d. Rupiah terdepresiasi 2,42 persen terhadap euro.**

Rupiah terdepresiasi 2,42 persen terhadap euro pada Agustus 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap euro terjadi pada minggu keempat Agustus 2016 yang mencapai Rp14.912,91.

**21. Marjin perdagangan dan pengangkutan beras 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen**

Dari Survei Poldis 2015 didapat informasi bahwa rata-rata rasio MPP beras adalah sebesar beras 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen. Distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga sembilan fungsi kelembagaan usaha perdagangan. Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Sedangkan alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara; dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

**22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015 Sebesar 69,55**

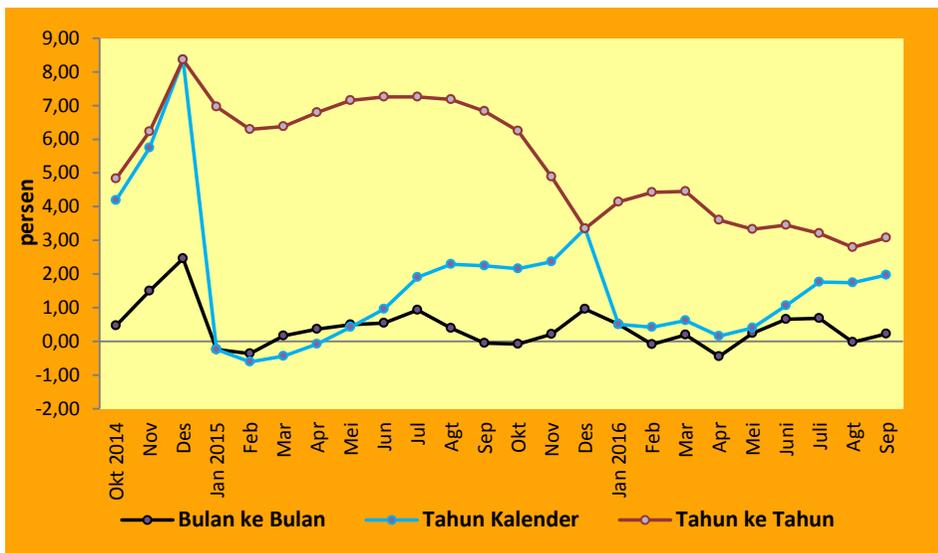
Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55. Angka ini meningkat sebesar 0,65 poin atau tumbuh sebesar 0,94 persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2014. Hingga tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”. Namun demikian, jika dilihat menurut provinsi, 8 provinsi telah mencapai status pembangunan manusia “tinggi” atau nilai IPM berada pada selang 70 hingga 80, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,37%), Provinsi Jawa Timur (1,19%), dan Provinsi Sulawesi Barat (1,16%).

## I. INFLASI SEPTEMBER 2016

1. Pada September 2016 terjadi Inflasi sebesar 0,22 persen. Dari 82 kota, 58 kota mengalami inflasi dan 24 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,85 persen dengan IHK 129,12 dan terendah terjadi di Purwokerto dan Banyuwangi sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing 121,81 dan 121,84. Inflasi September 2016 sebesar 0,22 persen lebih tinggi dibanding kondisi September 2015 yang mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,97 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2016 terhadap September 2015) sebesar 3,07 persen.

**Pada September 2016 terjadi  
Inflasi sebesar 0,22 persen**

**Grafik 1.1**  
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun  
Gabungan 82 Kota, 2014–2016



1. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, Inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,34 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,29 persen; sandang 0,13 persen; kesehatan 0,33 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,52 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,19 persen; serta penurunan indeks kelompok bahan makanan 0,07 persen.

2. Dari Inflasi 0,22 persen, andil cabai merah 0,13 persen; andil tarif pulsa ponsel 0,05 persen; andil sewa rumah dan akademi/ perguruan tinggi masing-masing 0,03 persen; andil rokok kretek filter dan tarif listrik masing-masing 0,02 persen; andil bawang merah, minyak goreng, nasi dengan lauk, rokok kretek, rokok putih, kontrak rumah, tarif air minum PAM, dan mobil masing-masing sebesar 0,01 persen.
3. Inflasi September 2016 sebesar 0,22 persen, angka tersebut lebih tinggi dibanding kondisi September 2015 yang mengalami deflasi 0,05 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,97 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2016 terhadap September 2015) sebesar 3,07 persen.
4. Menurut karakteristik perubahan harga, Inflasi September 2016 sebesar 0,22 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,33 persen; kenaikan indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 0,14 persen; dan penurunan indeks pada komponen bergejolak (*volatile*) 0,09 persen.
5. Inflasi September 2016 sebesar 0,22 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,20 persen, sumbangan inflasi komponen barang/jasa yang harganya diatur pemerintah 0,03 persen dan sumbangan deflasi komponen bergejolak 0,01 persen.
6. Inflasi komponen inti September 2016 sebesar 0,33 persen, tahun kalender 2016 sebesar 2,58 persen, dan tahun ke tahun (September 2016 terhadap September 2015) sebesar 3,21 persen.
7. Pada Agustus 2016, Vietnam menjadi negara yang mengalami Inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 0,54 persen.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota September 2016**  
**Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**(2012=100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK September 2015	IHK Desember 2015	IHK September 2016	Inflasi September 2016 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2016 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Umum (Headline)</b>	<b>121,67</b>	<b>122,99</b>	<b>125,41</b>	<b>0,22</b>	<b>1,97</b>	<b>3,07</b>	<b>0,22</b>
1. Bahan Makanan	129,83	133,01	137,88	-0,07	3,66	6,20	-0,01
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	124,75	126,47	132,02	0,34	4,39	5,83	0,06
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	118,65	119,41	120,59	0,29	0,99	1,64	0,07
4. Sandang	110,01	110,14	114,39	0,13	3,86	3,98	0,01
5. Kesehatan	115,78	116,90	120,38	0,33	2,98	3,97	0,01
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	114,44	114,75	117,68	0,52	2,55	2,83	0,04
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	124,67	125,32	122,99	0,19	-1,86	-1,35	0,04

<sup>1)</sup> Persentase perubahan IHK September 2016 terhadap IHK bulan sebelumnya.

<sup>2)</sup> Persentase perubahan IHK September 2016 terhadap IHK Desember 2015.

<sup>3)</sup> Persentase perubahan IHK September 2016 terhadap IHK September 2015.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi September 2016**  
**Menurut Komponen Perubahan Harga**  
**(2012=100)**

Komponen	IHK September 2015	IHK Desember 2015	IHK September 2016	Inflasi September 2016 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2016 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Umum</b>	<b>121,67</b>	<b>122,99</b>	<b>125,41</b>	<b>0,22</b>	<b>1,97</b>	<b>3,07</b>	<b>0,22</b>
Inti	114,97	115,68	118,66	0,33	2,58	3,21	0,20
Harga Diatur Pemerintah	138,31	139,82	137,79	0,14	-1,45	-0,38	0,03
Bergejolak	130,77	134,20	139,28	-0,09	3,79	6,51	-0,01

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)**

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51
Februari	0,13	0,05	0,75	0,26	-0,36	-0,09	1,03	0,81	1,79	1,33	-0,61	0,42
Maret	-0,32	0,07	0,63	0,08	0,17	0,19	0,70	0,88	2,43	1,41	-0,44	0,62
April	-0,31	0,21	-0,10	-0,02	0,36	-0,45	0,39	1,09	2,32	1,39	-0,08	0,16
Mei	0,12	0,07	-0,03	0,16	0,50	0,24	0,51	1,15	2,30	1,56	0,42	0,40
Juni	0,55	0,62	1,03	0,43	0,54	0,66	1,06	1,79	3,35	1,99	0,96	1,06
Juli	0,67	0,70	3,29	0,93	0,93	0,69	1,74	2,50	6,75	2,94	1,90	1,76
Agustus	0,93	0,95	1,12	0,47	0,39	-0,02	2,69	3,48	7,94	3,42	2,29	1,74
September	0,27	0,01	-0,35	0,27	-0,05	0,22	2,97	3,49	7,57	3,71	2,24	1,97
Oktober	-0,12	0,16	0,09	0,47	-0,08		2,85	3,66	7,66	4,19	2,16	
November	0,34	0,07	0,12	1,50	0,21		3,20	3,73	7,79	5,75	2,37	
Desember	0,57	0,54	0,55	2,46	0,96		3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)**

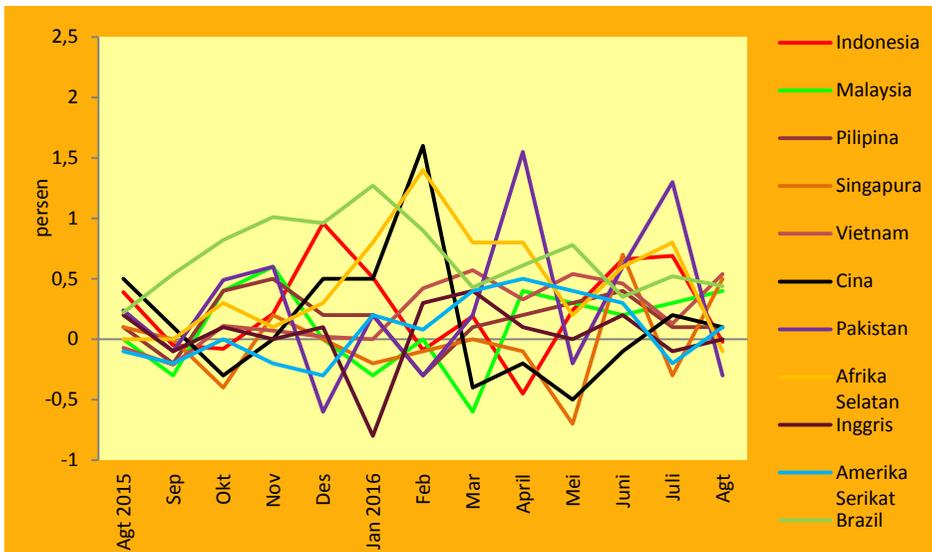
Bulan	2011:2010	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014	2016:2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	7,02	3,65	4,57	8,22	6,96	4,14
Februari	6,84	3,56	5,31	7,75	6,29	4,42
Maret	6,65	3,97	5,90	7,32	6,38	4,45
April	6,16	4,50	5,57	7,25	6,79	3,60
Mei	5,98	4,45	5,47	7,32	7,15	3,33
Juni	5,54	4,53	5,90	6,70	7,26	3,45
Juli	4,61	4,56	8,61	4,53	7,26	3,21
Agustus	4,79	4,58	8,79	3,99	7,18	2,79
September	4,61	4,31	8,40	4,53	6,83	3,07
Oktober	4,42	4,61	8,32	4,83	6,25	
November	4,15	4,32	8,37	6,23	4,89	
Desember	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	

**Tabel 1.5**  
**Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Juli–Agustus 2016 (persen)**

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun ( <i>Y-on-Y</i> )	
	Juli 2016	Agustus 2016	Juli 2016	Agustus 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	0,69	-0,02	3,21	2,79
2. Malaysia	0,30	0,40	1,10	1,50
3. Pilipina	0,10	0,10	1,90	1,80
4. Singapura	-0,30	0,50	-0,70	-0,30
5. Vietnam	0,13	0,54	2,39	3,34
6. Cina	0,20	0,10	1,80	1,30
7. Pakistan	1,30	-0,30	4,10	3,60
8. Afrika Selatan	0,80	-0,10	6,00	5,90
9. Inggris	-0,10	0,00	0,60	0,60
10. Amerika Serikat	-0,20	0,10	0,80	1,10
11. Brazil	0,52	0,44	8,74	8,97

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.statistics.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>,  
<http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>,  
<http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>,  
<http://www.statssa.gov.za>, dan [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)

**Grafik 1.2**  
**Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2015–2016**



## II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II-2016

1. Ekonomi Indonesia triwulan II-2016 dibandingkan triwulan II-2015 (y-on-y) tumbuh 5,18 persen dan dibandingkan triwulan I-2016 (q-to-q) tumbuh sebesar 4,02persen. Sementara secara kumulatif sampai dengan triwulan II-2016 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,04 persen.

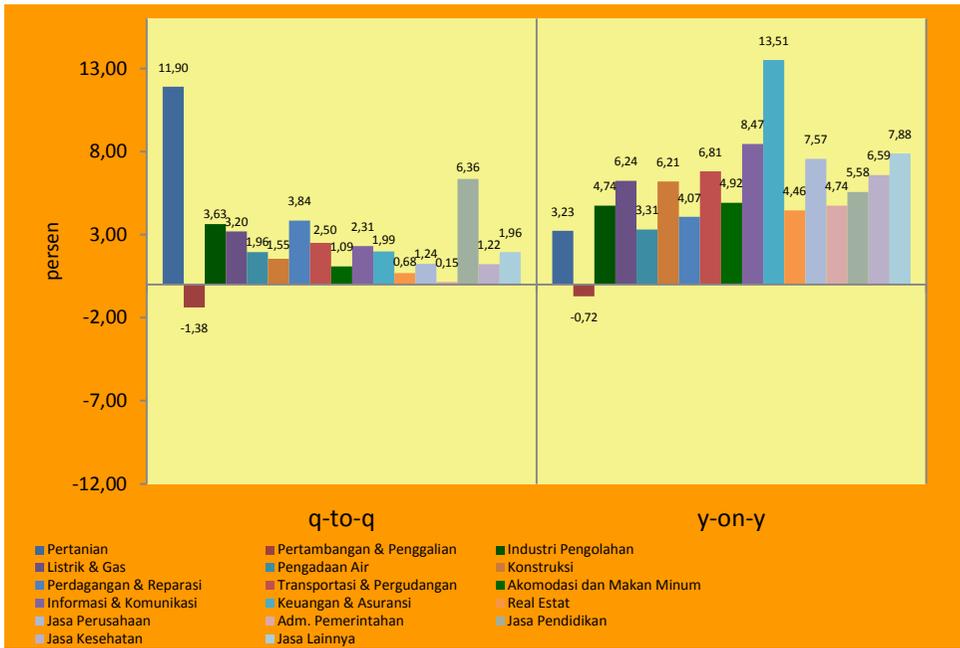
**Triwulan II-2016,  
perekonomian Indonesia  
tumbuh 5,18 persen**

2. Dari sisi produksi pertumbuhan triwulan II-2016 (y-on-y) didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen sementara Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan kinerja terbaik dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,51 persen.
3. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi dipengaruhi faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, khususnya Tanaman Perkebunan yang tumbuh sebesar 30,92 persen dan tanaman padi yang mengalami pergeseran musim panen. Hal ini mendorong Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 11,90 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya.

**Grafik 2.1**  
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2015 s.d. Triwulan II-2016 (persen)



**Grafik 2.2**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2016 (persen)**



4. Perekonomian Indonesia triwulan II-2016 yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp3086,6 triliun, dan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2353,2 triliun.
5. Struktur PDB triwulan II-2016 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Perdagangan Besar-Eceran, dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan kontribusi masing-masing sebesar 20,48 persen; 14,32 persen; dan 13,26persen.

**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)**

Lapangan Usaha	Triw I- 2016 Terhadap Triw IV- 2015 (q-to-q)	Triw II- 2016 Terhadap Triw I- 2016 (q-to-q)	Triw I- 2016 Terhadap Triw I- 2015 (y-on-y)	Triw II- 2016 Terhadap Triw II- 2015 (y-on-y)	Semester I-2016 Terhadap Semester I-2015	Sumber Pertumbuhan Triw II- 2016 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,34	11,9	1,77	3,23	2,54	0,45
2. Pertambangan dan Penggalian	-0,90	-1,38	-1,29	-0,72	-1,01	-0,06
3. Industri Pengolahan	-0,25	3,63	4,63	4,74	4,68	1,03
4. Pengadaan Listrik dan Gas	-1,98	3,20	7,50	6,24	6,86	0,07
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,96	1,96	4,84	3,31	4,06	0,00
6. Konstruksi	-6,26	1,55	7,87	6,21	7,03	0,59
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,09	3,84	4,03	4,07	4,05	0,55
8. Transportasi dan Pergudangan	-1,34	2,50	7,90	6,81	7,35	0,26
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	1,09	5,62	4,92	5,27	0,15
10. Informasi dan Komunikasi	1,02	2,31	8,30	8,47	8,39	0,39
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,34	1,99	9,26	13,51	11,37	0,50
12. Real Estat	1,77	0,68	4,87	4,46	4,66	0,13
13. Jasa Perusahaan	2,25	1,24	8,14	7,57	7,85	0,12
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,76	0,15	5,17	4,74	4,95	0,16
15. Jasa Pendidikan	-10,94	6,36	5,64	5,58	5,61	0,17
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,37	1,22	8,70	6,59	7,63	0,07
17. Jasa lainnya	1,60	1,96	7,92	7,88	7,9	0,13
<b>NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR</b>	<b>0,18</b>	<b>3,6</b>	<b>4,72</b>	<b>4,86</b>	<b>4,79</b>	<b>4,71</b>
<b>PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK</b>	<b>-15,66</b>	<b>18,12</b>	<b>11,73</b>	<b>15,61</b>	<b>13,80</b>	<b>0,47</b>
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>-0,36</b>	<b>4,02</b>	<b>4,91</b>	<b>5,18</b>	<b>5,04</b>	<b>5,18</b>

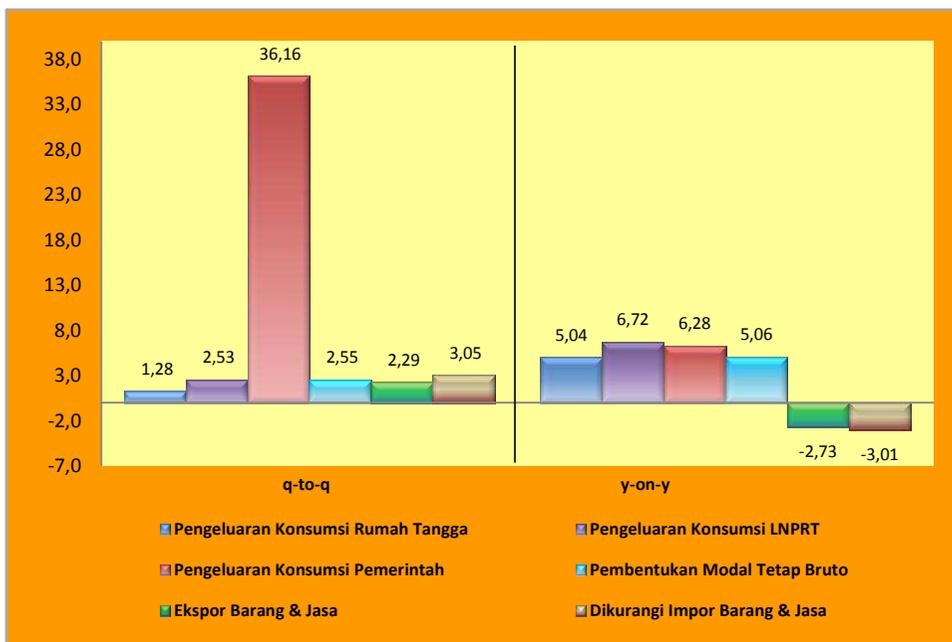
**Tabel 2.2**  
**PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010=100		Distribusi (persen)	
	Triw I-2016	TriwII-2016	TriwI-2016	TriwII-2016	TriwI-2016	TriwII-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	397,6	442,0	287,7	322,0	13,51	14,32
2. Pertambangan dan Penggalian	201,3	210,8	187,8	185,2	6,84	6,83
3. Industri Pengolahan	613,3	632	489,7	507,5	20,85	20,48
4. Pengadaan Listrik dan Gas	33,8	36,1	24,4	25,2	1,15	1,17
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,2	2,2	1,9	1,9	0,07	0,07
6. Konstruksi	316,3	321,6	223,0	226,5	10,75	10,42
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394,1	409,1	303,4	315	13,40	13,26
8. Transportasi dan Pergudangan	150,1	153,2	89,5	91,7	5,10	4,96
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	88,5	89,6	69,2	70,0	3,01	2,90
10. Informasi dan Komunikasi	107,3	109,9	110,5	113	3,65	3,56
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	125,2	128,2	92,0	93,8	4,26	4,15
12. Real Estat	86,3	87,0	69,4	69,8	2,93	2,82
13. Jasa Perusahaan	51,4	52,0	39,0	39,5	1,75	1,68
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	112,7	121,5	78,2	78,3	3,83	3,94
15. Jasa Pendidikan	95,0	106,2	69,1	73,5	3,23	3,44
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,8	32,9	25,0	25,3	1,08	1,07
17. Jasa lainnya	51,1	52,2	37,9	38,7	1,74	1,69
<b>NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR</b>	2858,0	2986,5	2197,7	2276,9	97,15	96,76
<b>PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK</b>	84,0	100,1	64,6	76,3	2,85	3,24
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	2942,0	3086,6	2262,3	2353,2	100,0	100,0

6. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 dibandingkan dengan triwulan I-2016 (*q-to-q*) didukung oleh PK-P yang meningkat sebesar 36,16 persen karena pola penyerapan belanja pemerintah pada triwulan II yang lebih tinggi daripada triwulan I. PMTB meningkat sebesar 2,55 persen, dimana peningkatan belanja modal pemerintah menjadi salah satu pengungkitnya. Peningkatan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (2,53 persen) terutama disebabkan oleh kegiatan terkait Ramadhan yang dilakukan partai-partai politik. Pertumbuhan

Ekspor sebesar 2,29 persen terutama terjadi pada komoditas mesin/peralatan listrik dan kendaraan serta bagiannya. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tercatat meningkat 1,28 persen terutama dikarenakan Ramadhan dan libur sekolah pada triwulan II. Sementara Impor juga tumbuh 3,05 persen dibanding triwulan sebelumnya terutama karena pertumbuhan impor non migas.

**Grafik 2.3**  
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan II-2016 (persen)



- Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 secara *y-on-y* didukung oleh kenaikan Konsumsi LNPRT (6,72 persen) yang mengalami pemulihan (*rebound*) dari kontraksi di triwulan II/2015, PK-P (6,28 persen) terutama didukung oleh realisasi belanja barang dan belanja pegawai yang meningkat, PMTB (5,06persen) terutama didukung oleh pertumbuhan barang modal jenis *Cultivated Biological Resources* (CBR), Peralatan Lainnya dan Bangunan. PK-RT meningkat 5,04 persen terutama karena adanya pergeseran siklus konsumsi Ramadhan serta pencairan gaji ke-13 dan ke-14 PNS/TNI/Polri. Sementara itu, beberapa komponen lain mengalami kontraksi; Ekspor (minus 2,73 persen) disebabkan oleh masih melemahnya harga komoditas ekspor Indonesia di pasar global, dan Impor (minus 3,01 persen) dikarenakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD.

**Tabel 2.3**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)**

Jenis Pengeluaran	Triw I- 2016	Triw II- 2016	Triw I- 2016	Triw II- 2016	Semester I-2016	Sumber Pertumbuhan Triw II-2016 (y-on-y)
	Terhadap Triw IV- 2015	Terhadap Triw I- 2016	Terhadap Triw I- 2015	Terhadap Triw II- 2015	Terhadap Semester I-2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,16	1,28	4,94	5,04	4,99	2,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,89	2,53	6,40	6,72	6,56	0,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-49,44	36,16	2,94	6,28	4,84	0,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-5,75	2,55	5,57	5,06	5,31	1,61
5. Perubahan Inventori Diskrepani Statistik	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang & Jasa	-3,09	2,29	-3,53	-2,73	-3,13	-0,62
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	-7,05	3,05	-5,08	-3,01	-4,04	-0,64
<b>PDB</b>	<b>-0,36</b>	<b>4,02</b>	<b>4,91</b>	<b>5,18</b>	<b>5,04</b>	<b>5,18</b>

8. Dari sisi pengeluaran, Komponen PK-RT mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDB atas dasar harga berlaku (adhb) yaitu 55,23 persen (triwulan II-2016), sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (57,04 persen). Sedangkan kontribusi Komponen PMTB, Ekspor, Impor, dan PK-P pada triwulan II-2016 masing-masing sebesar 32,45 persen, 18,88 persen, 18,64 persen dan 9,44 persen.

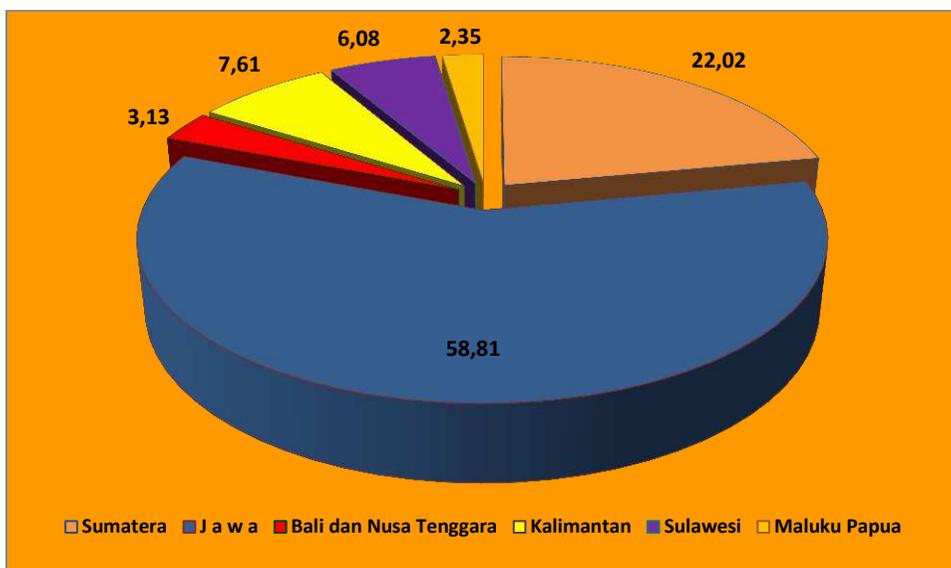
Tabel 2.4  
Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		Harga Konstan 2011 (Triliun Rupiah)		Distribusi <sup>1)</sup> (Persen)	
	Triw I- 2016	Triw II- 2016	Triw I- 2016	Triw II- 2016	Triw I- 2016	Triw II- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 678,0	1 704,8	1 247,5	1 263,4	57,04	55,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	34,1	35,1	25,1	25,8	1,16	1,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	200,4	291,5	137,8	187,6	6,81	9,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	975,2	1.001,6	730,1	748,7	33,15	32,45
5. Perubahan Inventori Diskrepani Statistik	80,6	86,8	53,1	56,2	2,74	2,81
6. Ekspor Barang & Jasa	-37,6	-40,4	32,6	37,9	-1,28	-1,31
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	556,6	582,6	480,9	491,9	18,92	18,88
	545,4	575,4	444,8	458,3	18,54	18,64
<b>PDB</b>	<b>2 942,0</b>	<b>3 086,6</b>	<b>2 262,3</b>	<b>2 353,2</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

1) Atas Dasar Harga Berlaku

9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II-2016 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,81 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,02 persen, Pulau Kalimantan 7,61 persen, Pulau Sulawesi 6,08 persen, dan sisanya 5,48 persen di pulau-pulau lainnya.

Grafik 2.4  
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan II-2016 (persen)



**Tabel 2.5**  
**Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)**

Wilayah/Pulau	2014	2015	2016	
			Trw I	Trw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumatera	23,01	22,21	22,15	22,02
2. Jawa	57,39	58,29	58,85	58,81
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,87	3,06	3,10	3,13
4. Kalimantan	8,76	8,15	7,70	7,61
5. Sulawesi	5,65	5,92	5,90	6,08
6. Maluku dan Papua	2,32	2,37	2,30	2,35
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

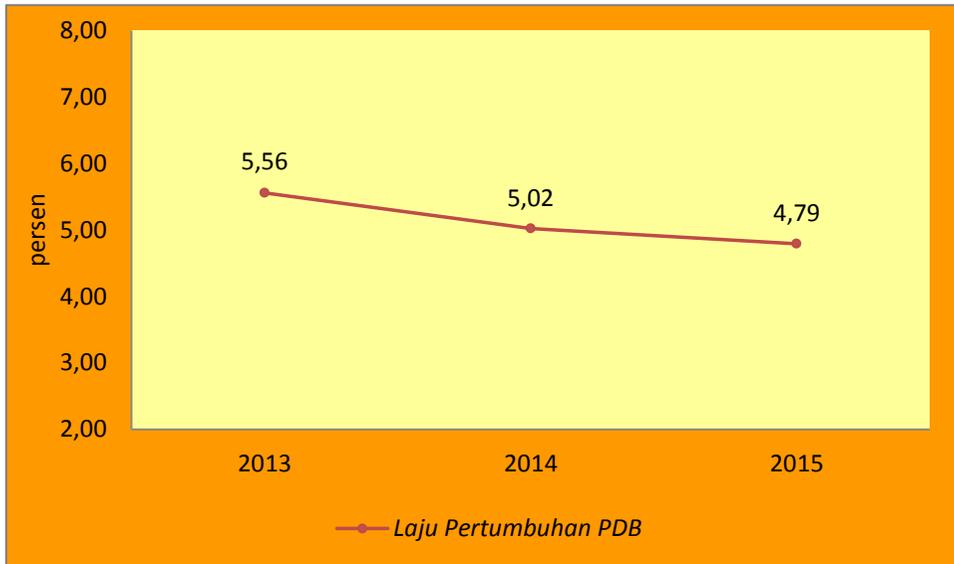
Catatan: atas dasar harga berlaku

10. Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan II-2016 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,87 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 5,86 persen, 5,62 persen, 5,88 persen, dan 5,75 persen.
11. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 meningkat sebesar 4,79 persen terjadi pada hampir semua lapangan usaha ekonomi, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen dan diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Lainnya yang masing-masing tumbuh sebesar 8,53 persen dan 8,08 persen.

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan II-2016 (persen)**

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>	Terhadap Pulau	Terhadap Total 34 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Sumatera</b>	<b>2,12</b>	<b>4,49</b>	<b>4,34</b>	<b>100,00</b>	<b>22,02</b>
01. Aceh	1,28	3,54	3,59	4,92	1,08
02. Sumatra Utara	0,87	5,67	5,34	22,44	4,94
03. Sumatra Barat	2,14	5,78	5,64	6,90	1,52
04. Riau	1,78	2,40	2,36	24,21	5,33
05. Jambi	1,77	3,57	3,51	6,14	1,35
06. Sumatra Selatan	3,73	5,13	5,05	12,81	2,82
07. Bengkulu	1,14	5,41	5,20	1,98	0,44
08. Lampung	4,33	5,21	5,14	10,28	2,26
09. Kep. Bangka Belitung	2,65	3,67	3,50	2,34	0,52
10. Kepulauan Riau	2,12	5,40	4,98	7,97	1,76
<b>Jawa</b>	<b>3,08</b>	<b>5,73</b>	<b>5,53</b>	<b>100,00</b>	<b>58,81</b>
11. DKI Jakarta	2,51	5,86	5,74	29,14	17,14
12. Jawa Barat	3,89	5,88	5,51	22,49	13,23
13. Jawa Tengah	3,05	5,75	5,36	14,89	8,75
14. DI Yogyakarta	0,43	5,57	5,20	1,46	0,86
15. Jawa Timur	3,28	5,62	5,55	25,07	14,75
16. Banten	2,68	5,16	5,13	6,96	4,09
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	<b>3,90</b>	<b>7,36</b>	<b>7,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3,13</b>
17. Bali	3,43	6,53	6,30	49,26	1,54
18. Nusa Tenggara Barat	4,19	9,92	9,97	29,58	0,93
19. Nusa Tenggara Timur	4,54	5,29	5,19	21,16	0,66
<b>Kalimantan</b>	<b>1,02</b>	<b>1,13</b>	<b>1,29</b>	<b>100,00</b>	<b>7,61</b>
20. Kalimantan Barat	-2,44	4,21	5,12	16,30	1,24
21. Kalimantan Tengah	0,90	5,72	5,44	11,53	0,88
22. Kalimantan Selatan	8,09	3,98	3,97	15,35	1,17
23. Kalimantan Timur	0,24	-1,30	-1,15	50,04	3,81
24. Kalimantan Utara	0,88	2,26	1,99	6,78	0,52
<b>Sulawesi</b>	<b>6,35</b>	<b>8,49</b>	<b>8,15</b>	<b>100,00</b>	<b>6,08</b>
25. Sulawesi Utara	7,64	6,14	6,06	12,84	0,78
26. Sulawesi Tengah	4,02	15,52	14,38	15,96	0,97
27. Sulawesi Selatan	6,99	8,05	7,75	49,85	3,03
28. Sulawesi Tenggara	7,86	6,82	6,17	12,62	0,77
29. Gorontalo	-0,12	5,40	6,04	4,08	0,25
30. Sulawesi Barat	6,18	4,57	5,37	4,64	0,28
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>4,07</b>	<b>-1,57</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>
31. Maluku	3,56	6,48	6,07	12,57	0,30
32. Maluku Utara	3,13	5,64	5,39	9,81	0,23
33. Papua Barat	-3,43	3,38	4,43	21,45	0,50
34. Papua	7,72	-5,91	-3,69	56,17	1,32

Grafik 2.5  
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013–2015 (persen)



12. Tahun 2015, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 20,84 persen diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,52 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,29 persen.
13. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.540,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp 8.976,9 triliun.

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (persen)**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan <sup>1</sup>			Distribusi <sup>2</sup>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,20	4,24	4,02	13,36	13,34	13,52
B Pertambangan dan Pengalihan	2,53	0,72	-5,08	11,01	9,87	7,62
C Industri Pengolahan	4,37	4,61	4,25	21,03	21,01	20,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,23	5,57	1,21	1,03	1,08	1,14
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,32	5,87	7,17	0,08	0,07	0,07
F Konstruksi	6,11	6,97	6,65	9,49	9,86	10,34
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,81	5,16	2,47	13,21	13,44	13,29
H Transportasi dan Pergudangan	6,97	7,36	6,68	3,93	4,42	5,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,80	5,77	4,36	3,03	3,04	2,96
J Informasi dan Komunikasi	10,39	10,10	10,06	3,57	3,50	3,52
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8,76	4,68	8,53	3,88	3,87	4,03
L Real Estat	6,54	5,00	4,82	2,77	2,79	2,86
M,N Jasa Perusahaan	7,91	9,81	7,69	1,52	1,57	1,65
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	2,38	4,75	3,90	3,83	3,91
P Jasa Pendidikan	7,44	5,55	7,45	3,22	3,24	3,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,96	7,10	1,01	1,03	1,07
R,S,T,U Jasa Lainnya	6,40	8,93	8,08	1,47	1,55	1,65
<b>NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR</b>	<b>5,20</b>	<b>5,02</b>	<b>4,10</b>	<b>97,51</b>	<b>97,51</b>	<b>96,86</b>
<b>PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK</b>	<b>21,80</b>	<b>5,13</b>	<b>31,98</b>	<b>2,49</b>	<b>2,49</b>	<b>3,14</b>
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>5,56</b>	<b>5,02</b>	<b>4,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Atas dasar harga konstan 2010

<sup>2)</sup> Atas dasar harga berlaku

**Tabel 2.8**  
**PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha**  
**2013–2015 (triliun rupiah)**

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 275,0	1 409,7	1 560,4	1 083,1	1 129,1	1 174,5
B Pertambangan dan Penggalian	1 050,7	1 042,9	879,4	791,1	796,7	756,2
C Industri Pengolahan	2 007,4	2 219,4	2 405,4	1 772,0	1 853,7	1 932,5
D Pengadaan Listrik dan Gas	98,7	114,6	131,3	88,8	93,8	94,9
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,2	7,9	8,6	6,5	6,9	7,4
F Konstruksi	906,0	1 041,9	1 193,3	772,7	826,6	881,6
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 261,1	1 420,1	1 534,1	1 119,3	1 177,1	1 206,1
H Transportasi dan Pergudangan	375,3	467,0	579,0	304,5	326,9	348,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	289,5	321,1	341,8	243,7	257,8	269,1
J Informasi dan Komunikasi	341,0	369,4	406,9	349,2	384,4	423,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi	370,2	408,4	464,7	305,5	319,8	347,1
L Real Estat	264,3	294,6	329,8	244,2	256,4	268,8
M,N Jasa Perusahaan	144,6	166,0	190,3	125,5	137,8	148,4
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	372,2	404,6	450,7	289,5	296,3	310,4
P Jasa Pendidikan	307,9	342,1	388,7	250,0	263,9	283,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,9	109,1	123,4	84,6	91,4	97,8
R,S,T,U Jasa Lainnya	140,3	163,5	190,5	123,1	134,1	144,9
<b>NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR</b>	<b>9 308,3</b>	<b>10 302,3</b>	<b>11 178,3</b>	<b>7 953,3</b>	<b>8 352,7</b>	<b>8 695,0</b>
<b>PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK</b>	<b>237,8</b>	<b>263,5</b>	<b>362,5</b>	<b>203,2</b>	<b>213,6</b>	<b>281,9</b>
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>9 546,1</b>	<b>10 565,8</b>	<b>11 540,8</b>	<b>8 156,5</b>	<b>8 566,3</b>	<b>8 976,9</b>

14. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,79 persen ditopang oleh hampir semua Komponen, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mengalami kontraksi sebesar 1,97 persen dan 0,63 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 5,38 persen, dan diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, masing-masing tumbuh sebesar 5,07 persen, dan 4,96 persen.

**Tabel 2.9**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (persen)**

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan <sup>1</sup>			Distribusi <sup>2</sup>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,43	5,16	4,96	55,74	55,99	55,92
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,18	12,19	-0,63	1,09	1,18	1,13
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,75	1,16	5,38	9,52	9,43	9,75
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5,01	4,57	5,07	31,97	32,58	33,19
5 Perubahan Inventori	-	-	-	1,87	1,99	1,38
6 Ekspor Barang dan Jasa	4,17	1,00	-1,97	23,92	23,63	21,09
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,86	2,19	-5,84	24,71	24,42	20,85
<b>PDB</b>	<b>5,56</b>	<b>5,02</b>	<b>4,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Atas dasar harga konstan 2010

<sup>2)</sup> Atas dasar harga berlaku

15. Tahun 2015, Komponen Konsumsi Rumah Tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 55,92 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 33,19 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,09 persen, Impor Barang dan Jasa sebesar 20,85 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 9,75 persen, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 1,13 persen.

**Tabel 2.10**  
**PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (triliun rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 321,1	5 915,7	6 453,2	4 423,4	4 651,5	4 882,3
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	103,9	124,2	130,9	88,6	99,4	98,8
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	908,6	996,2	1 125,5	727,8	736,3	775,9
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3 051,5	3 442,0	3 830,0	2 654,4	2 775,7	2 916,6
5 Perubahan Inventori	178,1	210,4	158,8	124,5	156,7	112,8
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 283,8	2 497,1	2 434,2	2 026,1	2 046,3	2 005,9
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 359,2	2 580,5	2 405,8	1 945,9	1 988,5	1 872,4
Diskrepansi Statistik	58,4	-39,4	-186,0	57,6	88,9	56,9
<b>PDB</b>	<b>9 546,1</b>	<b>10 565,8</b>	<b>11 540,8</b>	<b>8 156,5</b>	<b>8 566,3</b>	<b>8 976,9</b>

16. Dalam kurun waktu 2010-2015, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp28,8 juta (tahun 2010), sebesar Rp32,4 juta (tahun 2011), sebesar Rp35,1 juta (tahun 2012), sebesar Rp38,4 juta (tahun 2013), sebesar Rp41,9 juta (tahun 2014), dan sebesar Rp45,2 juta (tahun 2015).

**Tabel 2.11**  
**PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2015**

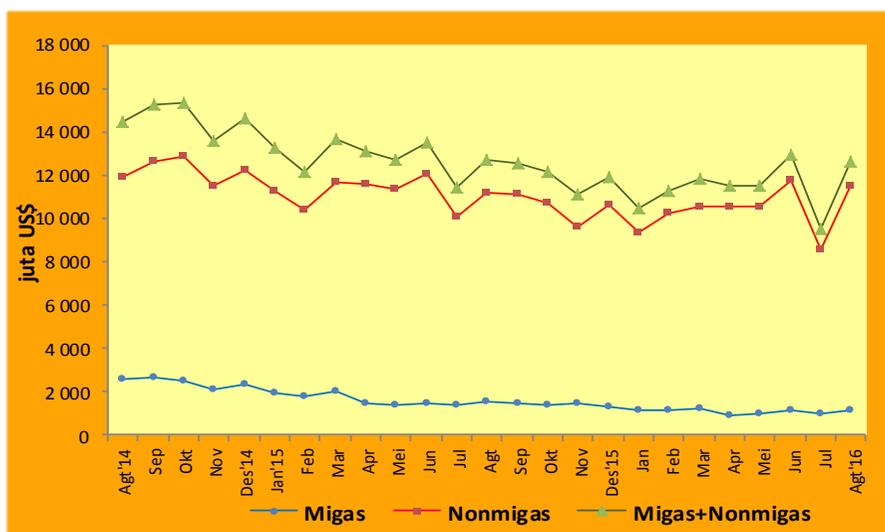
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
PDB Per Kapita						
Atas Dasar Harga Berlaku						
a. Nilai (juta rupiah)	28,80	32,40	35,10	38,40	41,90	45,20
b. Indeks Peningkatan (persen)	-	12,46	8,47	9,29	9,21	7,82
c. Nilai (US\$)	3 171,8	3 691,9	3 740,9	3 666,8	3 530,6	3 377,1

### III. EKSPOR AGUSTUS 2016

1. Nilai ekspor Indonesia Agustus 2016 mencapai US\$12,63 miliar, atau naik sebesar 32,54 persen dibanding ekspor Juli 2016. Sementara dibanding Agustus 2015, ekspor turun sebesar 0,74 persen.

**Nilai ekspor Agustus 2016 mencapai US\$12,63 miliar, naik 32,54 persen**

**Grafik 3.1**  
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)  
Agustus 2014–Agustus 2016



2. Ekspor nonmigas Agustus 2016 mencapai US\$11,50 miliar, naik 34,84 persen dibanding ekspor nonmigas Juli 2016, demikian juga naik 2,76 persen dibanding ekspor Agustus 2015.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Agustus 2016 mencapai US\$91,73 miliar atau turun 10,61 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2015, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US\$83,11 miliar atau turun 7,32 persen.
4. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Agustus 2016 terhadap Juli 2016 terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US\$285,7 juta (151,94 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada benda-benda dari besi dan baja sebesar US\$120,9 juta (54,79 persen).

5. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat Agustus 2016 mencapai angka terbesar, yaitu US\$1,36 miliar, disusul Tiongkok US\$1,36 miliar dan Jepang US\$1,17 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,79 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US\$1,22 miliar.
6. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Agustus 2016 turun sebesar 4,37 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2015, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 20,83 persen, demikian juga ekspor hasil pertanian turun 20,69 persen.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Agustus 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$16,59 miliar (18,09 persen), diikuti Jawa Timur sebesar US\$12,54 miliar (13,67 persen) dan Kalimantan Timur sebesar US\$8,80 miliar (9,59 persen).

**Tabel 3.1**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ( $\Delta\%$ )**

Uraian	2015		2016			$\Delta$ (%)			Peran (%) Jan–Agt 2016
	Agustus	Jan–Agt	Juli	Agustus	Jan–Agt	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Agt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Total Ekspor</b>	<b>12 726,0</b>	<b>102 616,9</b>	<b>9 530,8</b>	<b>12 632,3</b>	<b>91 730,4</b>	<b>-0,74</b>	<b>32,54</b>	<b>-10,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Migas</b>	<b>1 530,9</b>	<b>12 944,8</b>	<b>998,7</b>	<b>1 128,0</b>	<b>8 624,3</b>	<b>-26,32</b>	<b>12,95</b>	<b>-33,38</b>	<b>9,40</b>
Industri pengolahan hasil minyak	141,8	1 385,9	51,7	70,0	526,1	-50,66	35,43	-62,04	0,57
Pengadaan gas	0,4	9,4	0,7	2,5	9,9	597,71	266,98	5,20	0,01
Pertambangan	1 388,7	11 549,5	946,3	1 055,5	8 088,3	-23,99	11,54	-29,97	8,82
- Minyak mentah	620,5	4 485,6	407,4	488,4	3 614,2	-21,29	19,90	-19,43	3,94
- Gas	768,2	7 063,9	538,9	567,1	4 474,1	-26,18	5,22	-36,66	4,88
<b>Nonmigas</b>	<b>11 195,1</b>	<b>89 672,1</b>	<b>8 532,1</b>	<b>11 504,3</b>	<b>83 106,1</b>	<b>2,76</b>	<b>34,84</b>	<b>-7,32</b>	<b>90,60</b>
Pertanian	416,4	2 426,1	181,4	341,6	1 924,3	-17,95	88,35	-20,69	2,10
Industri pengolahan	9 090,1	73 545,1	7 098,6	9 461,0	70 334,5	4,08	33,28	-4,37	76,68
Pertambangan dan lainnya	1 688,6	13 700,9	1 252,1	1 701,7	10 847,3	0,77	35,91	-20,83	11,82

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)**  
**Triwulanan 2015–2016**

Uraian	2015			2016		Perubahan Triwulan (%)				
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	III'15 thd II'15	IV'15 thd III'15	I'16 thd IV'15	II'16 thd I'16	III'16 thd II'15
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Total Ekspor</b>	<b>39 373,4</b>	<b>36 780,2</b>	<b>35 161,0</b>	<b>33 602,7</b>	<b>35 964,6</b>	<b>-6,59</b>	<b>-4,40</b>	<b>-4,43</b>	<b>7,03</b>	<b>-8,66</b>
<b>Migas</b>	<b>4 290,8</b>	<b>4 406,3</b>	<b>4 176,0</b>	<b>3 460,6</b>	<b>3 037,0</b>	<b>2,69</b>	<b>-5,22</b>	<b>-17,13</b>	<b>-12,24</b>	<b>-29,22</b>
Industri pengolahan hasil minyak	510,8	375,3	260,5	203,5	201,0	-26,51	-30,59	-21,88	-1,25	-60,65
Pengadaan gas	7,3	1,2	2,0	2,6	4,0	-83,92	73,96	26,93	56,77	-44,35
Pertambangan	3 772,7	4 029,8	3 913,5	3 254,5	2 832,0	6,81	-2,89	-16,84	-12,98	-24,94
- Minyak mentah	1 577,4	1 638,8	1 403,5	1 402,9	1 315,5	3,89	-14,35	-0,04	-6,24	-16,61
- Gas	2 195,3	2 391,0	2 510,0	1 851,6	1 516,5	8,91	4,98	-26,23	-18,09	-30,92
<b>Nonmigas</b>	<b>35 082,6</b>	<b>32 373,9</b>	<b>30 985,0</b>	<b>30 142,1</b>	<b>32 927,6</b>	<b>-7,72</b>	<b>-4,29</b>	<b>-2,72</b>	<b>9,24</b>	<b>-6,14</b>
Pertanian	867,7	1 090,7	925,4	696,1	705,2	25,7	-15,16	-24,78	1,32	-18,73
Industri pengolahan	29 082,1	26 334,7	25 871,2	25 491,6	28 283,3	-9,45	-1,76	-1,47	10,95	-2,75
Pertambangan dan lainnya	5 132,8	4 948,5	4 188,4	3 954,4	3 939,1	-3,59	-15,36	-5,59	-0,39	-23,26

**Tabel 3.3**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya ( $\Delta$ )**

Golongan Barang (HS)	Juli 2016	Agustus 2016	$\Delta$	$\Delta\%$	Januari–Agustus			
					2015	2016	$\Delta\%$	Peran (%) 2016
					(6)	(7)	(8)	(9)
1. Lemak & minyak hewan/nabati (15)	1 215,1	1 435,9	220,8	18,17	12 617,5	10 571,7	-16,21	12,72
2. Perhiasan/permata (71)	352,4	537,7	185,3	52,58	4 059,8	4 949,8	21,92	5,96
3. Kendaraan dan bagiannya (87)	368,3	552,6	184,3	50,03	3 662,3	3 716,3	1,48	4,47
4. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	372,8	575,9	203,1	54,48	3 534,3	3 578,8	1,26	4,31
5. Bijih, kerak, dan abu logam (26)	188,1	473,8	285,7	151,94	2 360,3	2 093,9	-11,28	2,52
6. Benda-benda dari besi dan baja (73)	220,7	99,8	-120,9	-54,79	1 343,8	1 159,7	-13,7	1,40
7. Ampas/sisa industri makanan (23)	51,4	42,4	-9,0	-17,66	375,7	350,8	-6,62	0,42
8. Pupuk (31)	34,8	12,6	-22,2	-63,67	181,8	195,9	7,75	0,24
9. Minuman (22)	14,0	13,6	-0,4	-2,10	87,1	112,6	29,25	0,14
10. Hasil penggilingan (11)	3,7	3,6	-0,1	-2,84	41,6	35,0	-15,83	0,04
<b>Total 10 Golongan Barang</b>	<b>2 821,3</b>	<b>3 747,9</b>	<b>926,6</b>	<b>32,84</b>	<b>28 264,2</b>	<b>26 764,5</b>	<b>-5,31</b>	<b>32,22</b>
<b>Lainnya</b>	<b>5 710,8</b>	<b>7 756,4</b>	<b>2 045,6</b>	<b>35,82</b>	<b>61 407,9</b>	<b>56 341,6</b>	<b>-8,25</b>	<b>67,78</b>
<b>Total Ekspor Nonmigas</b>	<b>8 532,1</b>	<b>11 504,3</b>	<b>2 972,2</b>	<b>34,84</b>	<b>89 672,1</b>	<b>83 106,1</b>	<b>-7,32</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.4**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)**

Negara Tujuan	Juli 2016	Agustus 2016	Δ	Δ%	Januari–Agustus			Peran (%) 2016
					2015	2016	Δ%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>ASEAN</b>	<b>1 927,4</b>	<b>2 516,1</b>	<b>588,7</b>	<b>30,54</b>	<b>18 330,8</b>	<b>18 195,1</b>	<b>-0,74</b>	<b>21,89</b>
1. Singapura	586,9	708,2	121,3	20,67	5 843,5	5 816,9	-0,46	7,00
2. Malaysia	368,8	471,6	102,8	27,88	4 294,6	3 690,4	-14,07	4,44
3. Thailand	309,0	415,8	106,8	34,57	3 171,9	2 978,7	-6,09	3,58
ASEAN Lainnya	662,7	920,5	257,8	38,9	5 020,8	5 709,1	13,71	6,87
<b>Uni Eropa</b>	<b>954,7</b>	<b>1 223,4</b>	<b>268,7</b>	<b>28,15</b>	<b>10 005,7</b>	<b>9 212,8</b>	<b>-7,92</b>	<b>11,09</b>
4. Jerman	167,6	221,7	54,1	32,29	1 799,1	1 694,6	-5,80	2,04
5. Belanda	249,8	263	13,2	5,30	2 300,6	1 964,1	-14,62	2,36
6. Italia	122,1	146,9	24,8	20,29	1 334,5	1 058,6	-20,68	1,28
Uni Eropa Lainnya	415,2	591,8	176,6	42,53	4 571,5	4 495,5	-1,66	5,41
<b>Negara Utama Lainnya</b>	<b>4 207,8</b>	<b>5 693,6</b>	<b>1 485,8</b>	<b>35,31</b>	<b>44 443,8</b>	<b>39 889,7</b>	<b>-10,25</b>	<b>48,00</b>
7. Tiongkok	915,8	1 355,1	439,3	47,96	8 867,2	8 363,8	-5,68	10,06
8. Jepang	821,6	1 172,2	350,6	42,66	8 783,3	8 424,0	-4,09	10,14
9. Amerika Serikat	993,9	1 359,7	365,8	36,81	10 332,7	10 230,5	-0,99	12,31
10. India	652,9	890,2	237,3	36,34	8 024,2	5 958,9	-25,74	7,17
11. Australia	285,7	222,9	-62,8	-21,96	2 004,8	1 809,4	-9,75	2,18
12. Korea Selatan	363,9	498,6	134,7	37,01	3 801,0	3 413,2	-10,20	4,11
13. Taiwan	174,0	194,9	20,9	12,03	2 630,6	1 689,9	-35,76	2,03
<b>Total 13 Negara Tujuan</b>	<b>6 012,0</b>	<b>7 920,8</b>	<b>1 908,8</b>	<b>31,75</b>	<b>63 188,0</b>	<b>57 093,0</b>	<b>-9,65</b>	<b>68,70</b>
<b>Lainnya</b>	<b>2 520,1</b>	<b>3 583,5</b>	<b>1 063,4</b>	<b>42,20</b>	<b>26 484,1</b>	<b>26 013,1</b>	<b>-1,78</b>	<b>31,30</b>
<b>Total Ekspor Nonmigas</b>	<b>8 532,1</b>	<b>11 504,3</b>	<b>2 972,2</b>	<b>34,84</b>	<b>89 672,1</b>	<b>83 106,1</b>	<b>-7,32</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2014–2016**  
**(FOB:juta US\$)**

Bulan	2014			2015			2016		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	2 501,7	11 970,6	14 472,3	1 959,0	11 285,9	13 244,9	1 108,0	9 372,6	10 480,6
Feb	2 729,2	11 904,9	14 634,1	1 753,4	10 419,4	12 172,8	1 113,3	10 198,7	11 312,0
Mar	2 641,3	12 551,3	15 192,6	1 988,9	11 645,1	13 634,0	1 239,3	10 570,7	11 810,0
Apr	2 651,4	11 641,1	14 292,5	1 458,2	11 646,4	13 104,6	891,8	10 584,1	11 475,9
Mei	2 375,7	12 447,9	14 823,6	1 392,8	11 361,9	12 754,7	957,9	10 556,4	11 514,3
Jun	2 786,0	12 623,5	15 409,5	1 439,9	12 074,2	13 514,1	1 187,3	11 787,1	12 974,4
Jul	2 496,3	11 627,8	14 124,1	1 421,8	10 044,0	11 465,8	998,7	8 532,1	9 530,8
Agt	2 598,1	11 883,5	14 481,6	1 530,9	11 195,2	12 726,0	1 128,0	11 504,3	12 632,3
Sep	2 622,6	12 653,2	15 275,8	1 453,6	11 134,8	12 588,4			
Okt	2 413,2	12 879,5	15 292,8	1 379,6	10 742,2	12 121,7			
Nov	2 035,4	11 509,3	13 544,7	1 497,0	9 625,1	11 122,2			
Des	2 168,0	12 268,3	14 436,3	1 299,5	10 617,6	11 917,1			
<b>Total</b>	<b>30 018,8</b>	<b>145 961,2</b>	<b>175 980,0</b>	<b>18 574,4</b>	<b>131 791,9</b>	<b>150 366,3</b>	<b>8 624,3</b>	<b>83 106,1</b>	<b>91 730,4</b>

**Tabel 3.6**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Agustus 2016**

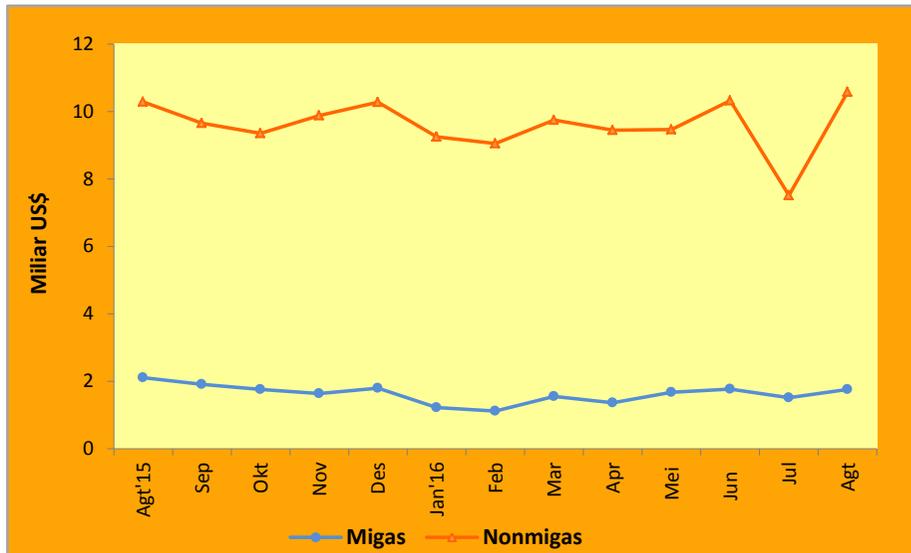
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	15,3	0,02	43,80	19,6	0,08	56,20	34,9	0,04	100,00
2	Sumatera Utara	4 732,3	7,06	99,43	27,3	0,11	0,57	4 759,6	5,19	100,00
3	Sumatera Barat	872,4	1,30	96,56	31,1	0,13	3,44	903,5	0,98	100,00
4	Riau	8 334,1	12,44	98,82	99,4	0,40	1,18	8 433,4	9,19	100,00
5	Kepulauan Riau	6 143,7	9,17	100,00	0,2	0,00	0,00	6 143,9	6,70	100,00
6	Jambi	557,7	0,83	46,81	633,7	2,56	53,19	1 191,3	1,30	100,00
7	Sumatera Selatan	1 136,3	1,70	94,51	66,0	0,27	5,49	1 202,3	1,31	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	700,4	1,05	95,37	34,0	0,14	4,63	734,4	0,80	100,00
9	Bengkulu	33,4	0,05	37,23	56,3	0,23	62,77	89,6	0,10	100,00
10	Lampung	1 780,2	2,66	99,12	15,9	0,06	0,88	1 796,1	1,96	100,00
11	DKI Jakarta	7 372,1	11,00	99,87	9,3	0,04	0,13	7 381,5	8,05	100,00
12	Jawa Barat	362,3	0,54	2,18	16 228,7	65,68	97,82	16 591,0	18,09	100,00
13	Banten	886,4	1,32	14,94	5 046,3	20,42	85,06	5 932,7	6,47	100,00
14	Jawa Tengah	3 387,5	5,05	80,45	823,2	3,33	19,55	4 210,8	4,59	100,00
15	DI Yogyakarta	6,2	0,01	2,95	205,4	0,83	97,05	211,6	0,23	100,00
16	Jawa Timur	12 360,4	18,44	98,57	179,3	0,73	1,43	12 539,7	13,67	100,00
17	Bali	148,7	0,22	45,74	176,4	0,71	54,26	325,2	0,35	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	1 080,0	1,61	99,59	4,4	0,02	0,41	1 084,4	1,18	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	14,6	0,02	77,86	4,2	0,02	22,14	18,7	0,02	100,00
20	Kalimantan Barat	314,3	0,47	97,58	7,8	0,03	2,42	322,1	0,35	100,00
21	Kalimantan Tengah	150,5	0,22	25,28	444,8	1,80	74,72	595,3	0,65	100,00
22	Kalimantan Selatan	3 009,4	4,49	95,95	127,1	0,51	4,05	3 136,5	3,42	100,00
23	Kalimantan Timur	8 742,0	13,04	99,35	57,2	0,23	0,65	8 799,2	9,59	100,00
24	Kalimantan Utara	442,5	0,66	97,41	11,8	0,05	2,59	454,3	0,50	100,00
25	Sulawesi Utara	570,8	0,85	84,47	104,9	0,42	15,53	675,7	0,74	100,00
26	Gorontalo	2,3	0,00	93,12	0,2	0,00	6,88	2,5	0,00	100,00
27	Sulawesi Tengah	871,8	1,30	99,48	4,6	0,02	0,52	876,3	0,96	100,00
28	Sulawesi Selatan	699,7	1,04	97,31	19,3	0,08	2,69	719,1	0,78	100,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	203,5	0,82	100,00	203,5	0,22	100,00
30	Sulawesi Tenggara	62,1	0,09	58,07	44,8	0,18	41,93	106,9	0,12	100,00
31	Maluku	28,0	0,04	64,84	15,2	0,06	35,16	43,2	0,05	100,00
32	Maluku Utara	20,2	0,03	99,23	0,2	0,00	0,77	20,3	0,02	100,00
33	Papua	1 025,6	1,53	100,00	0,0	0,00	0,00	1 025,6	1,12	100,00
34	Papua Barat	1 157,5	1,73	99,34	7,7	0,03	0,66	1 165,2	1,27	100,00
<b>Total Ekspor</b>		<b>67 020,6</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>24 709,7</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>91 730,4</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## IV. IMPOR AGUSTUS 2016

1. Nilai impor Indonesia Agustus 2016 sebesar US\$12,34 miliar atau naik 36,84 persen dibanding impor Juli 2016. Dibanding impor Agustus 2015 turun 0,49 persen.

**Impor Agustus 2016 sebesar US\$12,34 miliar atau naik 36,84 persen**

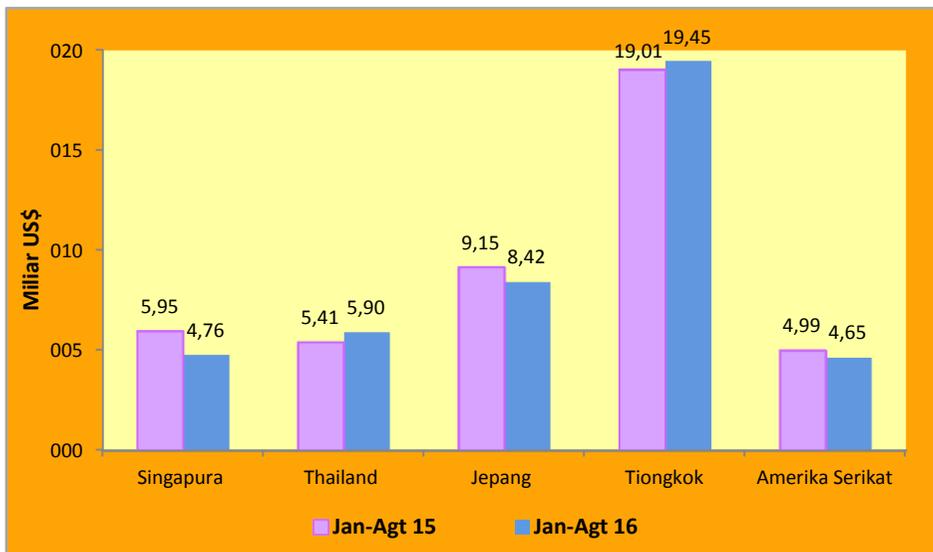
**Grafik 4.1**  
**Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)**  
**Agustus 2015–Agustus 2016**



2. Impor nonmigas Agustus 2016 sebesar US\$10,58 miliar, naik 40,90 persen dibanding Juli 2016 (US\$7,51 miliar). Selama Januari–Agustus 2016 impor nonmigas mencapai US\$75,39 miliar atau turun 4,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$78,93 miliar).
3. Impor migas Agustus 2016 sebesar US\$1,76 miliar, naik 16,55 persen dibanding Juli 2016 (US\$1,51 miliar). Selama Januari–Agustus 2016 impor migas mencapai US\$11,96 miliar atau turun 31,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$17,50 miliar).

4. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Agustus 2016 adalah golongan mesin dan peralatan mekanik sebesar US\$559,7 juta, atau naik 41,68 persen dibanding Juli 2016 (US\$1,34 miliar). Impor golongan barang tersebut pada Januari–Agustus 2016 mencapai US\$13,57 miliar, turun 8,17 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari–Agustus 2016 ditempati Tiongkok 25,80 persen, Jepang 11,17 persen, dan Thailand 7,83 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 21,84 persen dan 9,27 persen.

**Grafik 4.2**  
**Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)**  
**Januari–Agustus 2015 dan 2016**



6. Nilai impor golongan bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–Agustus 2016 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 10,74 persen dan 12,86 persen. Sebaliknya impor golongan barang konsumsi meningkat 11,79 persen.
7. Neraca perdagangan Indonesia Agustus 2016 surplus sebesar US\$293,6 juta.

**Tabel 4.1**  
**Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya**  
**Januari–Agustus 2015 dan 2016**

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan–Agt'16 (%)
	Juli 2016	Agt 2016	Jan–Agt 2015	Jan–Agt 2016	Agt 2016 thd Juli 2016	Jan–Agt 2016 thd Jan–Agt 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Total</b>	<b>9 017,2</b>	<b>12 338,7</b>	<b>96 430,5</b>	<b>87 349,7</b>	<b>36,84</b>	<b>-9,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Migas</b>	<b>1 506,4</b>	<b>1 755,7</b>	<b>17 499,2</b>	<b>11 961,6</b>	<b>16,55</b>	<b>-31,64</b>	<b>13,69</b>
- Minyak Mentah	606,8	652,6	5 560,1	4 486,3	7,55	-19,31	5,14
- Hasil Minyak	784,0	972,2	10 569,3	6 436,8	24,01	-39,10	7,37
- Gas	115,6	130,9	1 369,8	1 038,5	13,24	-24,19	1,19
<b>Nonmigas</b>	<b>7 510,8</b>	<b>10 583,0</b>	<b>78 931,3</b>	<b>75 388,1</b>	<b>40,90</b>	<b>-4,49</b>	<b>86,31</b>

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Impor Indonesia**  
**Agustus 2015–Agustus 2016**

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2015</b>						
<b>Triwulan I</b>	<b>6 102,6</b>	<b>30 628,8</b>	<b>36 731,4</b>	<b>-41,55</b>	<b>-8,20</b>	<b>-16,15</b>
<b>Triwulan II</b>	<b>6 994,3</b>	<b>30 226,7</b>	<b>37 218,0</b>	<b>14,61</b>	<b>-1,32</b>	<b>1,32</b>
Agustus	2 108,0	10 291,2	12 399,2	-8,12	32,15	22,98
September	1 912,4	9 646,2	11 558,6	-9,28	-6,27	-6,78
<b>Triwulan III</b>	<b>6 314,7</b>	<b>27 725,0</b>	<b>34 039,7</b>	<b>-9,72</b>	<b>-8,27</b>	<b>-8,54</b>
Oktober	1 763,0	9 345,9	11 108,9	-7,81	-3,11	-3,89
November	1 640,4	9 879,1	11 519,5	-6,96	5,71	3,70
Desember	1 798,0	10 279,3	12 077,3	9,61	4,05	4,84
<b>Triwulan IV</b>	<b>5 201,5</b>	<b>29 504,2</b>	<b>34 705,7</b>	<b>-17,63</b>	<b>6,42</b>	<b>1,96</b>
<b>Jan–Des</b>	<b>24 613,2</b>	<b>118 081,6</b>	<b>142 694,8</b>	<b>-43,37</b>	<b>-12,35</b>	<b>-19,91</b>
<b>2016</b>						
Januari	1 221,5	9 245,5	10 467,0	-32,06	-10,06	-13,33
Februari	1 122,9	9 052,7	10 175,6	-8,07	-2,09	-2,78
Maret	1 552,4	9 749,3	11 301,7	38,25	7,69	11,07
<b>Triwulan I</b>	<b>3 896,8</b>	<b>28 047,5</b>	<b>31 944,5</b>	<b>-25,08</b>	<b>-4,94</b>	<b>-7,96</b>
April	1 362,1	9 451,5	10 813,6	-12,26	-3,05	-4,32
Mei	1 668,5	9 472,2	11 140,7	22,49	0,22	3,02
Juni	1 772,2	10 323,0	12 095,2	6,22	8,98	8,57
<b>Triwulan II</b>	<b>4 802,8</b>	<b>29 246,8</b>	<b>34 049,5</b>	<b>23,25</b>	<b>4,28</b>	<b>6,59</b>
Juli	1 506,4	7 510,8	9 017,2	-15,00	-27,24	-25,45
Agustus	1 755,7	10 583,0	12 338,7	16,55	40,90	36,84

**Tabel 4.3**  
**Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya**  
**Januari–Agustus 2015 dan 2016**

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan–Agt'16 (%)
	Juli 2016	Agustus 2016	Jan–Agt 2016	Jan–Agt 2016	Agt 2016 thd Jul 2016	Jan–Agt'16 thd Jan–Agt'15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan Peralatan Mekanik (84)	1 342,7	1 902,4	14 780,6	13 572,9	41,68	-8,17	18,00
2. Mesin dan Peralatan Listrik (85)	965,9	1 363,2	10 185,0	9 685,7	41,13	-4,90	12,85
3. Plastik dan Barang dari Plastik (39)	456,6	682,5	4 580,5	4 568,8	49,47	-0,26	6,06
4. Kendaraan dan Bagiannya (87)	372,0	557,6	3 772,1	3 540,9	49,89	-6,13	4,70
5. Ampas dan Sisa Industri Makanan (23)	175,0	304,7	1 818,7	1 619,1	74,11	-10,97	2,15
6. Kapal Laut dan Bangunan Terapung (89)	104,4	67,2	821,9	528,5	-35,63	-35,70	0,70
7. Kapal Terbang dan Bagiannya (88)	59,4	54,1	465,5	523,2	-8,92	12,40	0,69
8. Biji, Kerak dan Abu Logam (26)	25,2	15,8	341,8	172,5	-37,30	-49,53	0,23
9. Wol dan Bulu Hewan (51)	12,6	10,0	79,2	101,0	-20,63	27,53	0,13
10. Lokomotif dan Peralatan Kereta Api (86)	26,3	15,1	111,2	95,9	-42,59	-13,76	0,13
<b>Total 10 Golongan Barang</b>	<b>3 540,1</b>	<b>4 972,6</b>	<b>36 956,5</b>	<b>34 408,5</b>	<b>40,46</b>	<b>-6,89</b>	<b>45,64</b>
<b>Barang Lainnya</b>	<b>3 970,7</b>	<b>5 610,4</b>	<b>41 974,8</b>	<b>40 979,6</b>	<b>41,29</b>	<b>-2,37</b>	<b>54,36</b>
<b>Total Impor Nonmigas</b>	<b>7 510,8</b>	<b>10 583,0</b>	<b>78 931,3</b>	<b>75 388,1</b>	<b>40,90</b>	<b>-4,49</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.4**  
**Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang**  
**Januari–Agustus 2016**

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase terhadap Total (%)			
	Nilai CIF (Juta US\$)	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. ASEAN	2 398,9	17 398,7	2 602,3	22 399,9	10,71	77,67	11,62	100,00
2. Jepang	323,4	6 048,7	2 097,9	8 470,0	3,82	71,41	24,77	100,00
3. Korea Selatan	252,0	3 855,0	390,1	4 497,1	5,60	85,72	8,67	100,00
4. Tiongkok	1 911,6	12 185,4	5 418,4	19 515,4	9,80	62,44	27,76	100,00
5. India	141,8	1 390,0	224,7	1 756,5	8,07	79,13	12,79	100,00
6. Australia	394,0	2 890,5	81,8	3 366,3	11,70	85,87	2,43	100,00
7. Selandia Baru	233,3	204,6	6,3	444,2	52,52	46,06	1,42	100,00
8. Amerika Serikat	431,9	3 494,2	781,5	4 707,6	9,17	74,22	16,60	100,00
9. Uni Eropa	990,9	4 173,1	1 852,6	7 016,6	14,12	59,47	26,40	100,00
10. Lainnya	980,6	13 407,7	787,8	15 176,1	6,46	88,35	5,19	100,00
<b>Total Impor</b>	<b>8 058,4</b>	<b>65 047,9</b>	<b>14 243,4</b>	<b>87 349,7</b>	<b>9,22</b>	<b>74,47</b>	<b>16,31</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.5**  
**Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang**  
**Januari–Agustus 2015 dan 2016**

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan–Agt'16 (%)
	Juli 2016	Agustus 2016	Jan–Agt 2015	Jan–Agt 2016	Agt 2016 thd Jul 2016	Jan–Agt'16 thd Jan–Agt'15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>ASEAN</b>	<b>1 704,9</b>	<b>2 149,8</b>	<b>17 416,8</b>	<b>16 462,3</b>	<b>26,10</b>	<b>-5,48</b>	<b>21,84</b>
1 Singapura	561,3	576,8	5 947,3	4 758,9	2,76	-19,98	6,31
2 Thailand	593,8	792,4	5 409,1	5 901,3	33,45	9,10	7,83
3 Malaysia	274,9	412,9	3 376,4	3 106,5	50,20	-7,99	4,12
<b>ASEAN Lainnya</b>	<b>274,9</b>	<b>367,7</b>	<b>2 684,0</b>	<b>2 695,6</b>	<b>33,76</b>	<b>0,43</b>	<b>3,58</b>
<b>Uni Eropa</b>	<b>655,5</b>	<b>947,0</b>	<b>7 531,2</b>	<b>6 988,1</b>	<b>44,47</b>	<b>-7,21</b>	<b>9,27</b>
4 Jerman	193,8	326,0	2 330,2	2 000,9	68,21	-14,13	2,65
5 Belanda	52,4	56,3	532,0	479,7	7,44	-9,83	0,64
6 Italia	100,9	127,6	948,6	917,9	26,46	-3,24	1,22
<b>Uni Eropa Lainnya</b>	<b>308,4</b>	<b>437,1</b>	<b>3 720,4</b>	<b>3 589,6</b>	<b>41,73</b>	<b>-3,52</b>	<b>4,76</b>
<b>Negara Utama Lainnya</b>	<b>4 265,6</b>	<b>6 200,2</b>	<b>44 630,6</b>	<b>43 001,6</b>	<b>45,35</b>	<b>-3,65</b>	<b>57,04</b>
7 Tiongkok	1 821,0	2 678,1	19 012,5	19 448,6	47,07	2,29	25,80
8 Jepang	916,8	1 239,5	9 153,8	8 423,0	35,20	-7,98	11,17
9 Amerika Serikat	514,6	804,4	4 987,9	4 650,2	56,32	-6,77	6,17
10 Korea Selatan	405,5	525,6	4 272,6	3 872,6	29,62	-9,36	5,14
11 Australia	259,3	434,2	3 207,2	2 950,6	67,45	-8,00	3,91
12 Taiwan	190,2	249,2	2 147,3	1 908,3	31,02	-11,13	2,53
13 India	158,2	269,2	1 849,3	1 748,3	70,16	-5,46	2,32
<b>Total 13 Negara Utama</b>	<b>6 042,7</b>	<b>8 492,2</b>	<b>63 174,2</b>	<b>60 166,8</b>	<b>40,54</b>	<b>-4,76</b>	<b>79,81</b>
<b>Negara Lainnya</b>	<b>1 468,1</b>	<b>2 090,8</b>	<b>15 757,1</b>	<b>15 221,3</b>	<b>42,42</b>	<b>-3,40</b>	<b>20,19</b>
<b>Total Impor Nonmigas</b>	<b>7 510,8</b>	<b>10 583,0</b>	<b>78 931,3</b>	<b>75 388,1</b>	<b>40,90</b>	<b>-4,49</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.6**  
**Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2015–Agustus 2016**  
**(Nilai CIF: Juta US\$)**

Bulan	2015				2016			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	786,3	9 618,3	2 208,1	12 612,7	1 160,8	7 496,8	1 809,4	10 467,0
Februari	823,8	8 762,8	1 923,5	11 510,1	1 005,2	7 376,4	1 794,0	10 175,6
Maret	930,3	9 331,1	2 347,3	12 608,7	986,8	8 614,9	1 700,0	11 301,7
April	910,4	9 680,9	2 035,0	12 626,3	865,5	8 177,6	1 770,5	10 813,6
Mei	944,2	8 720,0	1 949,4	11 613,6	999,3	8 496,8	1 644,6	11 140,7
Juni	1 027,9	9 773,5	2 176,7	12 978,1	1 141,6	8 957,1	1 996,5	12 095,2
Juli	705,6	7 715,0	1 661,3	10 081,9	729,3	6 825,2	1 462,7	9 017,2
Agustus	1 080,1	9 275,1	2 044,0	12 399,2	1 170,0	9 102,9	2 065,8	12 338,7
September	823,1	8 691,9	2 043,6	11 558,6				
Oktober	773,6	8 262,7	2 072,6	11 108,9				
November	966,7	8 524,4	2 028,4	11 519,5				
Desember	1 104,6	8 725,3	2 247,4	12 077,3				
<b>Total</b>	<b>10 876,5</b>	<b>107 081,0</b>	<b>24 737,3</b>	<b>142 694,8</b>	<b>8 058,4</b>	<b>65 047,9</b>	<b>14 243,4</b>	<b>87 349,7</b>
<b>Persentase thd Total (%)</b>	<b>7,62</b>	<b>75,05</b>	<b>17,33</b>	<b>100,00</b>	<b>9,22</b>	<b>74,47</b>	<b>16,31</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.7**  
**Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Agustus 2016**  
**(juta US\$)**

Negara Asal Barang	Juni 2016	Juli 2016	Agustus 2016	Jan-Agt 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tiongkok	2 702,2	1 829,6	2 686,2	19 515,4
2 Singapura	1 364,9	1 067,9	1 239,7	9 006,8
3 Jepang	1 241,8	920,4	1 241,4	8 470,0
4 Thailand	744,1	596,4	805,8	5 938,4
5 Amerika Serikat	623,1	515,7	811,3	4 707,7
6 Malaysia	580,1	468,0	669,6	4 650,6
7 Korea Selatan	651,4	485,7	623,9	4 497,0
8 Australia	515,3	348,1	542,5	3 366,4
9 Vietnam	226,3	252,2	273,5	2 096,3
10 Jerman	262,1	194,2	326,7	2 007,1
11 Taiwan	252,0	190,9	249,7	1 933,8
12 India	249,1	159,0	270,0	1 756,5
13 Saudi Arabia	296,8	222,9	188,3	1 734,4
14 Brazil	187,9	136,1	252,1	1 480,4
15 Hongkong				
<b>Total 15 Negara</b>	<b>10 044,9</b>	<b>7 496,6</b>	<b>10 330,3</b>	<b>72 273,1</b>
<b>Negara Lainnya</b>	<b>2 050,4</b>	<b>1 520,6</b>	<b>2 008,4</b>	<b>15 076,7</b>
<b>Total Impor</b>	<b>12 095,2</b>	<b>9 017,2</b>	<b>12 338,7</b>	<b>87 349,7</b>
<b>Persentase Terhadap Total</b>				
<b>Total 15 Negara</b>	<b>83,05</b>	<b>83,14</b>	<b>83,72</b>	<b>82,74</b>
<b>Negara Lainnya</b>	<b>16,95</b>	<b>16,86</b>	<b>16,28</b>	<b>17,26</b>

**Tabel 4.8**  
**Neraca Perdagangan Indonesia, Agustus 2015–Agustus 2016**  
**(miliar US\$)**

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2015</b>									
Agustus	1,53	11,20	12,73	2,11	10,29	12,40	-0,58	0,91	0,33
September	1,45	11,13	12,58	1,91	9,65	11,56	-0,46	1,48	1,02
Oktober	1,38	10,74	12,12	1,76	9,35	11,11	-0,38	1,39	1,01
November	1,50	9,62	11,12	1,64	9,88	11,52	-0,14	-0,26	-0,40
Desember	1,30	10,62	11,92	1,80	10,28	12,08	-0,50	0,34	-0,16
<b>Jan-Agt</b>	<b>12,95</b>	<b>89,67</b>	<b>102,62</b>	<b>17,50</b>	<b>78,93</b>	<b>96,43</b>	<b>-4,55</b>	<b>10,74</b>	<b>6,19</b>
<b>Jan-Des</b>	<b>18,57</b>	<b>131,79</b>	<b>150,37</b>	<b>24,61</b>	<b>118,08</b>	<b>142,69</b>	<b>-6,04</b>	<b>13,71</b>	<b>7,67</b>
<b>2016</b>									
Januari	1,11	9,37	10,48	1,22	9,25	10,47	-0,11	0,12	0,01
Februari	1,11	10,20	11,31	1,12	9,05	10,17	-0,01	1,15	1,14
Maret	1,24	10,57	11,81	1,55	9,75	11,30	-0,31	0,82	0,51
April	0,89	10,58	11,47	1,36	9,45	10,81	-0,47	1,13	0,66
Mei	0,96	10,55	11,51	1,67	9,47	11,14	-0,71	1,08	0,37
Juni	1,19	11,79	12,98	1,77	10,32	12,09	-0,58	1,47	0,88
Juli	1,00	8,53	9,53	1,51	7,51	9,02	-0,51	1,02	0,51
Agustus	1,13	11,50	12,63	1,76	10,58	12,34	-0,63	0,92	0,29
<b>Jan-Agt</b>	<b>8,62</b>	<b>83,11</b>	<b>91,73</b>	<b>11,96</b>	<b>75,39</b>	<b>87,35</b>	<b>-3,34</b>	<b>7,72</b>	<b>4,38</b>

**Tabel 4.9**  
**Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Agustus 2016**

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2013</b>	<b>2 585 718</b>	<b>1 191 376</b>	<b>472 664 654</b>	<b>246 002 090</b>
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
<b>2014</b>	<b>516 069</b>	<b>759 928</b>	<b>844 163 741</b>	<b>388 178 457</b>
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
<b>2015</b>	<b>519 497</b>	<b>630 391</b>	<b>861 601 001</b>	<b>351 602 090</b>
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Triwulan III	152 844	195 941	35 181 781	14 964 060
Triwulan IV	165 898	176 180	631 989 895	251 719 733
<b>2016</b>	<b>965 833</b>	<b>804 042</b>	<b>1 128 546 701</b>	<b>464 186 669</b>
Januari	94 653	59 179	382 546 178	155 676 867
Februari	525 000	190 511	296 371 000	121 221 578
Maret	8 000	11 982	303 075 556	124 448 261
Triwulan I	627 653	261 673	981 992 734	401 346 706
April	149 933	209 052	36 579 487	14 936 303
Mei	22 126	44 351	28 947 140	12 803 462
Juni	85 370	185 054	26 193 908	12 273 165
Triwulan II	257 429	438 457	91 720 535	40 012 930
Juli	78 581	95 483	16 343 930	6 367 570
Agustus	2 170	8 429	38 489 502	16 459 463

## V. KEPENDUDUKAN JUNI 2016

1. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 129.988,7 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 128.716,3 ribu orang. Rasio Jenis Kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

**Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705 ribu orang**

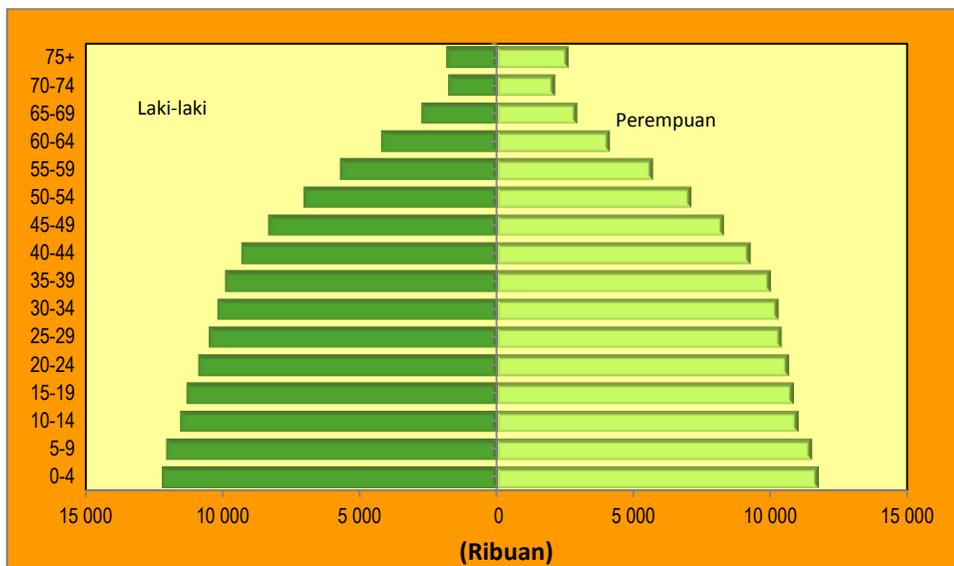
**Tabel 5.1**  
**Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016**  
**(ribu orang)**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki+Perempuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 221,6	11 738,7	23 960,3
5-9	12 069,5	11 490,0	23 559,5
10-14	11 571,9	11 005,2	22 577,1
15-19	11 335,7	10 825,3	22 161,0
20-24	10 911,7	10 657,3	21 569,0
25-29	10 513,3	10 398,1	20 911,4
30-34	10 210,3	10 286,7	20 497,0
35-39	9 931,1	10 005,4	19 936,5
40-44	9 347,0	9 262,3	18 609,3
45-49	8 352,9	8 304,0	16 657,0
50-54	7 064,2	7 114,8	14 179,0
55-59	5 737,3	5 719,8	11 457,1
60-64	4 247,2	4 150,5	8 397,8
65-69	2 780,8	2 962,0	5 742,8
70-74	1 817,9	2 145,6	3 963,5
75+	1 876,3	2 650,6	4 526,9
<b>Total</b>	<b>129 988,7</b>	<b>128 716,3</b>	<b>258 705,0</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

2. Piramida Penduduk Indonesia tahun 2016 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Grafik 5.1 menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

**Grafik 5.1**  
**Piramida Penduduk Indonesia, 2016**

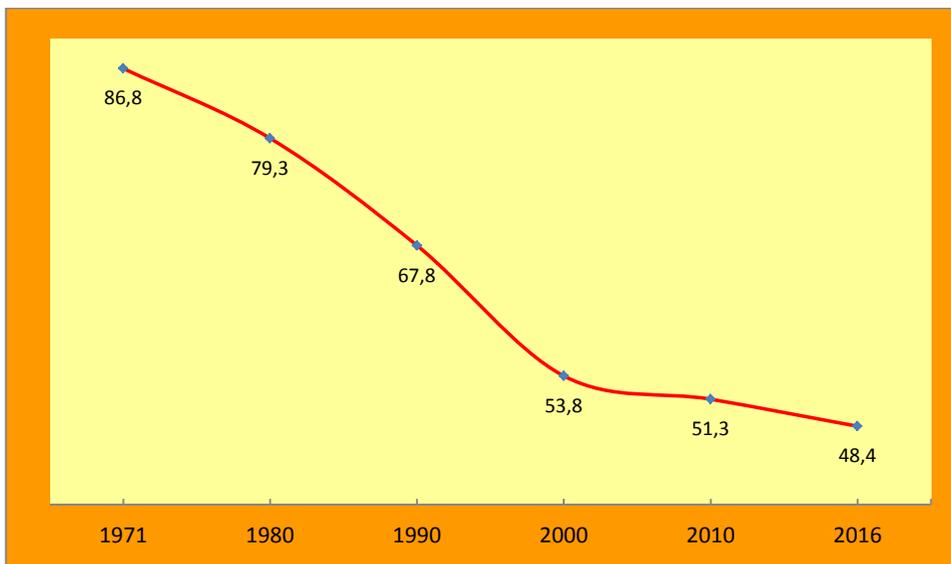


Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

3. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2016. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 48,4. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48-49 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia memiliki tren yang menurun (Grafik 5.2). Jika pada tahun 1971 rasio ketergantungan sebesar 86,8 maka pada tahun 2016 kondisinya semakin membaik. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Era bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2025–2030. Pulau dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara (55,1), dan yang terendah Pulau Jawa (45,9). Tiga provinsi dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (66), Sulawesi Tenggara (59,9) dan Maluku (59,3).

Sedangkan tiga provinsi dengan rasio ketergantungan terendah adalah DKI Jakarta (40,3), Jawa Timur (44,0) dan Kalimantan Timur (44,8).

**Grafik 5.2**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2016**

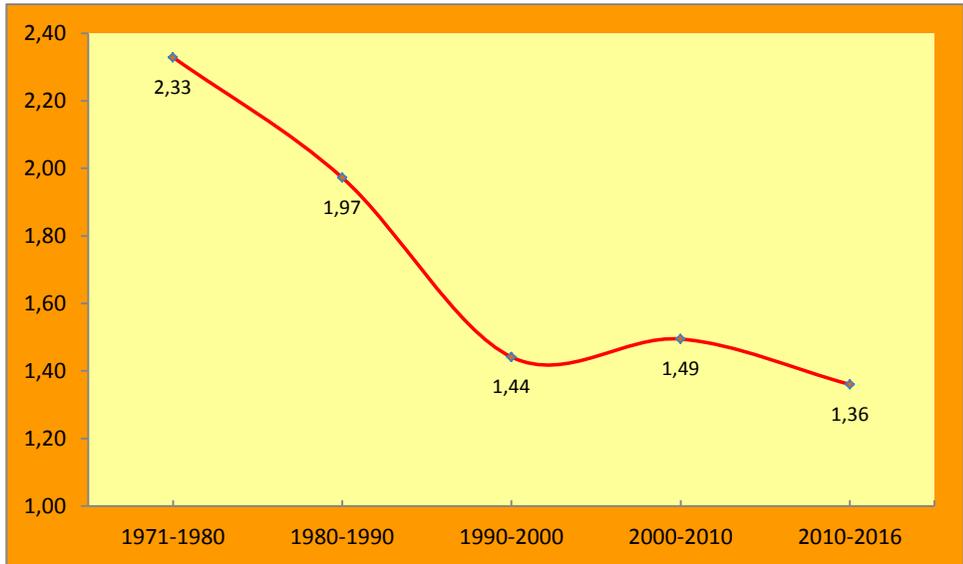


Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

4. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010–2016 sebesar 1,36 persen. Dibandingkan dengan periode 1971–1980 (2,33 persen), 1980–1990 (1,97 persen), 1990–2000 (1,44 persen), dan 2000–2010 (1,49 persen), maka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010–2016 menunjukkan penurunan.
5. Pulau dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kalimantan, yaitu sebesar 2,04 persen. Lima pulau lainnya secara berurutan Maluku dan Papua (2,03 persen), Sumatera (1,65 persen), Bali dan Nusa Tenggara (1,43 persen), Sulawesi (1,42 persen) serta Jawa (1,14 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Provinsi Kalimantan Utara (3,93 persen), Kepulauan Riau (3,06 persen), dan Papua Barat (2,61 persen). Tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Provinsi Jawa Timur (0,66 persen), Jawa Tengah (0,79 persen) dan DKI Jakarta (1,07 persen).

**Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010–2016 sebesar 1,36 persen**

**Grafik 5.3**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971–2016**



Sumber : SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

6. Penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,7 persen. Kemudian, secara berturut-turut diikuti Pulau Sumatera (21,7 persen), Sulawesi (7,3 persen), Kalimantan (6,0 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,5 persen) serta Maluku dan Papua (2,7 persen). Menurut provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terbesar yaitu masing-masing 18,3 persen; 15,1 persen; dan 13,1 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terendah adalah Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo yaitu masing-masing 0,3 persen; 0,3 persen; dan 0,4 persen.
7. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 135 jiwa per km<sup>2</sup>. Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya (1.133 per km<sup>2</sup>), kemudian secara berurutan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (196 per km<sup>2</sup>), Sumatera (117 per km<sup>2</sup>), Sulawesi (101 per km<sup>2</sup>), Kalimantan (29 per km<sup>2</sup>), dan yang paling jarang penduduknya adalah Kepulauan Maluku dan Papua (14 per km<sup>2</sup>). Kepadatan penduduk menurut provinsi, terpadat di DKI Jakarta (15.478 per km<sup>2</sup>), Jawa Barat (1.339 per km<sup>2</sup>) dan

**Kepadatan penduduk  
Indonesia pada tahun 2016  
sebesar 135 jiwa per km<sup>2</sup>**

- Banten (1.263 per km<sup>2</sup>). Sedangkan tiga provinsi yang terjarang, yaitu Kalimantan Utara (8 per km<sup>2</sup>), Papua Barat (9 per km<sup>2</sup>), dan Papua (10 per km<sup>2</sup>).
8. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 107,7 sedangkan yang terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 97,8. Tiga provinsi dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu Kalimantan Utara (113,0), Papua (111,4), dan Papua Barat (111,3) sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Barat (94,3), Sulawesi Selatan (95,5) dan Jawa Timur (97,5).
  9. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, lansia di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 8,7 persen. Penduduk lansia terbesar terdapat di Pulau Jawa (10 persen), kemudian berturut-turut Bali dan Nusa Tenggara (8,5 persen), Sulawesi (8,3 persen), Sumatera (7 persen), Kalimantan (6,3 persen) serta Maluku dan Papua (4,5 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penduduk lansia terbesar adalah Yogyakarta (13,6 persen), Jawa Tengah (12,2 persen) dan Jawa Timur (11,9 persen), sedangkan yang terkecil adalah Papua (3 persen), Papua Barat (4,1 persen) dan Kepulauan Riau (4,2 persen).
  10. Umur Harapan Hidup adalah kemungkinan umur yang akan dicapai seseorang dari sejak lahir. Hasil proyeksi penduduk tahun 2016 menunjukkan umur harapan hidup penduduk Indonesia sebesar 70,9 tahun. Tiga provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta (74,7 tahun), Kalimantan Timur (74,1 tahun) dan Jawa Tengah (73,8 tahun). Sedangkan tiga provinsi dengan umur harapan hidup terendah adalah Sulawesi Barat (64,1 tahun), Papua (65,2 tahun) dan Maluku (65,4 tahun).

**Hasil proyeksi tahun 2016  
menunjukkan umur harapan  
hidup penduduk Indonesia  
sebesar 70,9 tahun**

Tabel 5.2  
Demografi Penduduk Indonesia, 2016

Provinsi	Penduduk (000)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2010-2016	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergan- tungan	Pendu- duk Lansia (%)	Umur Harapan Hidup
	2010	2016	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Aceh	4 523	5 096	2,01	88	99,8	54,5	6,4	69,7
02. Sumatera Utara	13 029	14 103	1,33	193	99,6	56,1	7,0	68,5
03. Sumatera Barat	4 865	5 260	1,31	125	99,1	55,3	9,0	68,8
04. Riau	5 575	6 501	2,59	75	105,5	51,1	5,0	71,1
05. Kepulauan Riau	1 693	2 028	3,06	247	104,3	49,3	4,2	69,6
06. Jambi	3 108	3 459	1,80	69	104,2	46,7	6,7	70,8
07. Sumatera Selatan	7 482	8 161	1,46	89	103,3	49,3	7,2	69,3
08. Kep. Bangka Belitung	1 230	1 402	2,20	85	108,2	45,7	7,0	70,1
09. Bengkulu	1 722	1 905	1,69	96	104,0	47,4	6,7	68,8
10. Lampung	7 634	8 205	1,21	237	105,2	49,3	8,1	70,1
<b>Sumatera</b>	<b>50 860</b>	<b>56 119</b>	<b>1,65</b>	<b>117</b>	<b>102,4</b>	<b>51,9</b>	<b>7,0</b>	
11. DKI Jakarta	9 640	10 278	1,07	15 478	100,8	40,3	6,8	72,4
12. Jawa Barat	43 227	47 379	1,54	1 339	102,8	47,3	8,4	72,8
13. Banten	10 689	12 203	2,23	1 263	104,0	46,1	5,5	69,5
14. Jawa Tengah	32 444	34 019	0,79	1 037	98,4	47,9	12,2	73,8
15. Yogyakarta	3 468	3 721	1,18	1 188	97,8	45,0	13,6	74,7
16. Jawa Timur	37 566	39 075	0,66	817	97,5	44,0	11,9	70,8
<b>Jawa</b>	<b>137 033</b>	<b>146 675</b>	<b>1,14</b>	<b>1 133</b>	<b>100,1</b>	<b>45,9</b>	<b>10,0</b>	
17. Bali	3 907	4 200	1,21	727	101,4	45,2	10,5	71,6
18. Nusa Tenggara Barat	4 516	4 896	1,36	264	94,3	53,4	7,8	65,6
19. Nusa Tenggara Timur	4 706	5 204	1,69	107	98,2	66,0	7,6	66,4
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	<b>13 130</b>	<b>14 300</b>	<b>1,43</b>	<b>196</b>	<b>97,8</b>	<b>55,1</b>	<b>8,5</b>	
20. Kalimantan Barat	4 411	4 862	1,63	33	103,8	50,6	7,0	70,2
21. Kalimantan Tengah	2 221	2 550	2,33	17	109,4	45,5	5,4	67,7
22. Kalimantan Selatan	3 643	4 055	1,81	105	102,8	48,5	6,7	68,0
23. Kalimantan Timur	3047	3501	2,34	28	110,3	44,8	5,4	74,1
24. Kalimantan Utara	529	666	3,93	8	113,0	50,9	5,6	73,2
<b>Kalimantan</b>	<b>13 851</b>	<b>15 635</b>	<b>2,04</b>	<b>29</b>	<b>106,2</b>	<b>47,9</b>	<b>6,3</b>	<b>*)</b>
24. Sulawesi Utara	2 278	2 437	1,13	176	104,2	46,4	10,1	71,3
25. Gorontalo	1 045	1 151	1,62	102	100,4	48,2	7,3	67,4
26. Sulawesi Tengah	2 646	2 922	1,67	47	104,4	50,2	7,5	67,9
27. Sulawesi Selatan	8 060	8 606	1,10	184	95,5	52,5	9,0	70,0
28. Sulawesi Barat	1 165	1 306	1,93	78	100,7	55,3	6,4	64,1
29. Sulawesi Tenggara	2 244	2 551	2,16	67	101,1	59,9	6,5	70,8
<b>Sulawesi</b>	<b>17 437</b>	<b>18 973</b>	<b>1,42</b>	<b>101</b>	<b>99,3</b>	<b>52,2</b>	<b>8,3</b>	
30. Maluku	1 542	1 716	1,79	37	101,7	59,3	6,7	65,4
31. Maluku Utara	1 043	1 186	2,16	37	104,2	58,1	5,7	67,8
32. Papua	2 857	3 207	1,95	10	111,4	46,6	3,0	65,2
33. Papua Barat	765	893	2,61	9	111,3	49,3	4,1	65,5
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>6 208</b>	<b>7 002</b>	<b>2,03</b>	<b>14</b>	<b>107,7</b>	<b>51,8</b>	<b>4,5</b>	
<b>Indonesia</b>	<b>238 519</b>	<b>258 705</b>	<b>1,36</b>	<b>135</b>	<b>101,0</b>	<b>48,4</b>	<b>8,7</b>	<b>70,9</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

\*) Angka Sementara

## VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2016

### A. Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2016

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2016 sebesar 5,50 persen menurun dibanding TPT Agustus 2015 (6,18 persen) dan TPT Februari 2015 (5,81 persen).

**Jumlah penganggur  
Februari 2016 sebanyak  
7,02 juta orang**

**Tabel 6.1**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2014–2016**  
**(juta orang)**

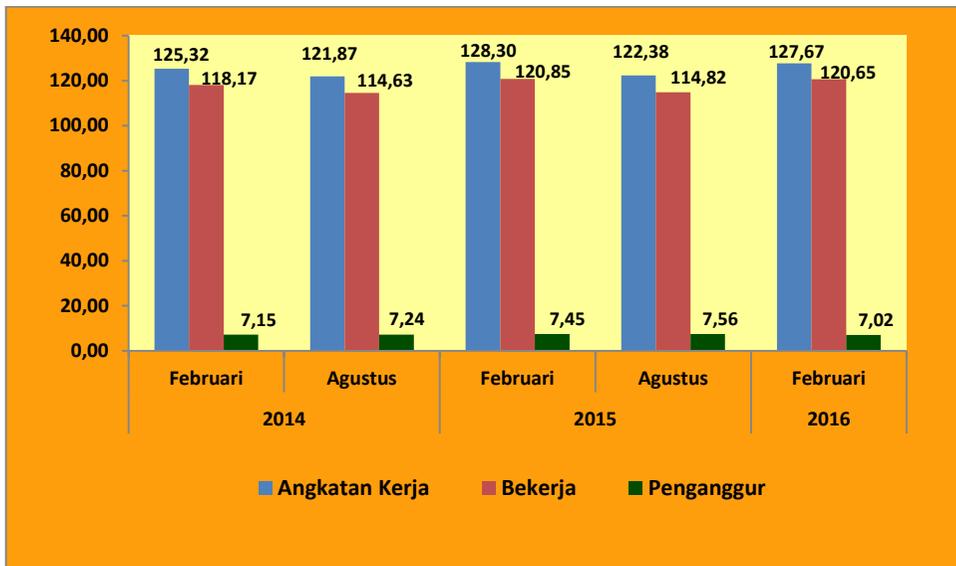
Jenis Kegiatan Utama	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	125,32	121,87	128,30	122,38	127,67
Bekerja	118,17	114,63	120,85	114,82	120,65
Penganggur	7,15	7,24	7,45	7,56	7,02
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,17	66,60	69,50	65,76	68,06
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,70	5,94	5,81	6,18	5,50
4. Pekerja tidak penuh	36,97	35,77	35,68	34,31	36,33
Setengah penganggur	10,57	9,68	10,04	9,74	10,46
Paruh waktu	26,40	26,09	25,64	24,57	25,87
Bekerja di bawah 15 jam perminggu	7,28	6,69	7,54	6,46	8,54

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Februari 2016 sebesar 68,06 persen mengalami kenaikan sebesar 2,30 persen jika dibandingkan dengan TPAK Agustus 2015 sebesar 65,76 persen.
3. Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Februari 2016 sebanyak 36,33 juta orang (30,11 persen) mengalami kenaikan dibanding Agustus 2015 sebanyak 34,31 juta orang (29,88 persen).
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Februari 2016 mencapai 8,54 juta orang (7,08 persen), mengalami kenaikan jika dibandingkan Agustus 2015 sebanyak 6,46 juta orang (5,63 persen).
5. Pada Februari 2016 terdapat 10,46 juta orang (8,67 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

## B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2016 sebanyak 127,7 juta orang, bertambah sebanyak 5,3 juta orang dibanding Agustus 2015 dan berkurang sebanyak 630 ribu orang dibanding Februari 2015.

Grafik 6.1  
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur  
2014–2016 (juta orang)



2. Jumlah Penduduk yang bekerja pada Februari 2016 sebanyak 120,6 juta orang, bertambah 5,8 juta orang dibanding keadaan Agustus 2015, akan tetapi berkurang 200 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2015.
3. Pada Februari 2016, jumlah pengangguran mencapai 7,02 juta orang, mengalami penurunan yaitu sebanyak 540 ribu orang dibanding Agustus 2015 atau turun 430 ribu orang jika dibanding Februari 2015.

## C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2016 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Masyarakat, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Penduduk bekerja pada Sektor Perdagangan meningkat sebanyak 1,8 juta orang (6,94 persen), dan Sektor Jasa Masyarakat meningkat sebanyak 380 ribu orang (1,96 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan terutama adalah Sektor Pertanian sebanyak 1,8 juta orang (4,56 persen), Sektor Industri sebanyak 410 ribu orang (2,50 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 170 ribu orang (4,66 persen).

**Tabel 6.2**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014–2016**  
**(juta orang)**

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	40,83	38,97	40,12	37,75	38,29
2. Industri	15,39	15,26	16,38	15,25	15,97
3. Konstruksi	7,21	7,28	7,72	8,21	7,71
4. Perdagangan	25,81	24,83	26,65	25,68	28,50
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,33	5,11	5,19	5,11	5,19
6. Keuangan	3,19	3,03	3,65	3,27	3,48
7. Jasa Kemasyarakatan	18,48	18,42	19,41	17,94	19,79
8. Lainnya <sup>1)</sup>	1,93	1,73	1,73	1,61	1,72
<b>Jumlah</b>	<b>118,17</b>	<b>114,63</b>	<b>120,85</b>	<b>114,82</b>	<b>120,65</b>

<sup>1)</sup>Lapangan pekerjaan utama pada Sektor Lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan dan Sektor Listrik, Gas, dan Air

#### D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

1. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2016 sebanyak 50,3 juta orang (41,72 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 70,3 juta orang (58,28 persen) bekerja pada kegiatan informal.
2. Dalam setahun terakhir (Februari 2015–Februari 2016), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap berkurang sebanyak 180 ribu orang, begitu pula penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan berkurang sebanyak 320 ribu orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal berkurang sekitar 500 ribu orang dan persentase pekerja formal turun dari 42,06 persen pada Februari 2015 menjadi 41,72 persen pada Februari 2016.
3. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2015–Februari 2016), pekerja informal bertambah sebanyak 300 ribu orang, dan persentase pekerja informal meningkat dari 57,94 persen pada Februari 2015 menjadi 58,28 persen pada Februari 2016. Peningkatan pekerja informal berasal dari mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja bebas baik di pertanian maupun nonpertanian, sementara penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tak dibayar justru mengalami penurunan.

**Tabel 6.3**  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2014–2016  
(juta orang)

Status Pekerjaan Utama (1)	2014		2015		2016
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)	Februari (6)
1. Berusaha sendiri	20,32	20,49	21,65	19,53	20,39
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19,74	19,27	18,80	18,19	21,00
3. Berusaha dibantu buruh tetap	4,14	4,18	4,21	4,07	4,03
4. Buruh/karyawan	43,35	42,38	46,62	44,43	46,30
5. Pekerja bebas di pertanian	4,74	5,09	5,08	5,09	5,24
6. Pekerja bebas di nonpertanian	6,75	6,41	6,80	7,45	7,00
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	19,13	16,81	17,69	16,06	16,69
<b>Jumlah</b>	<b>118,17</b>	<b>114,63</b>	<b>120,85</b>	<b>114,82</b>	<b>120,65</b>

#### E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 52,4 juta orang (43,46 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,5 juta (17,80 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 13,7 juta orang mencakup sebanyak 3,2 juta orang (2,65 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 10,5 juta orang (8,69 persen) berpendidikan Universitas.

**Tabel 6.4**  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut  
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016  
(juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	2014		2015		2016
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)	Februari (6)
1. SD ke bawah	55,31	53,96	54,61	50,83	52,43
2. Sekolah Menengah Pertama	21,06	20,35	21,47	20,70	21,48
3. Sekolah Menengah Atas	18,91	18,58	19,81	19,81	20,71
4. Sekolah Menengah Kejuruan	10,91	10,52	11,80	10,84	12,34
5. Diploma I/II/III	3,13	2,96	3,14	3,08	3,20
6. Universitas	8,85	8,26	10,02	9,56	10,49
<b>Jumlah</b>	<b>118,17</b>	<b>114,63</b>	<b>120,85</b>	<b>114,82</b>	<b>120,65</b>

2. Perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 76,1 juta orang (62,96 persen)

pada Februari 2015 menjadi 73,9 juta orang (61,26 persen) pada Februari 2016. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 13,1 juta orang (10,89 persen) pada Februari 2015 menjadi 13,7 juta orang (11,34 persen) pada Februari 2016.

#### F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

1. Jumlah pengangguran pada Februari 2016 mencapai 7,0 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,50 persen pada Februari 2016.
2. Pada Februari 2016, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,84 persen, disusul oleh TPT Diploma I/II/III sebesar 7,22 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,44 persen.
3. Jika dibandingkan keadaan Februari 2015, TPT mengalami penurunan hampir pada setiap jenjang pendidikan kecuali pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Universitas.

**Tabel 6.5**  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas  
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014–2016  
(persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	3,69	3,04	3,61	2,74	3,44
2. Sekolah Menengah Pertama	7,44	7,15	7,14	6,22	5,76
3. Sekolah Menengah Atas	9,10	9,55	8,17	10,32	6,95
4. Sekolah Menengah Kejuruan	7,21	11,24	9,05	12,65	9,84
5. Diploma I/II/III	5,87	6,14	7,49	7,54	7,22
6. Universitas	4,31	5,65	5,34	6,40	6,22
<b>Jumlah</b>	<b>5,70</b>	<b>5,94</b>	<b>5,81</b>	<b>6,18</b>	<b>5,50</b>

#### G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Februari 2016, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Timur masing-masing sebesar 9,03 persen dan 8,86 persen sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebesar 2,12 persen dan 2,72 persen.
2. Dibanding Agustus 2015, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang mengalami peningkatan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2,83 persen poin, sedangkan TPT yang mengalami penurunan terbesar di Provinsi Maluku yaitu 2,95 persen poin.

**Tabel 6.6**  
**Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi 2015–2016**

Provinsi	2015				2016	
	Februari		Agustus		Februari	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	174,7	7,73	216,8	9,93	181,8	8,13
Sumatera Utara	421,2	6,39	428,8	6,71	428,0	6,49
Sumatera Barat	148,7	5,99	161,6	6,89	149,7	5,81
Riau	199,8	6,72	217,1	7,83	176,9	5,94
Jambi	46,2	2,73	70,3	4,34	79,1	4,66
Sumatera Selatan	202,2	5,03	238,9	6,07	159,5	3,94
Bengkulu	31,3	3,21	46,7	4,91	38,3	3,84
Lampung	139,5	3,44	196,9	5,14	183,5	4,54
Kep. Bangka Belitung	23,2	3,35	41,9	6,29	42,4	6,17
Kepulauan Riau	81,0	9,05	55,3	6,20	82,5	9,03
DKI Jakarta	463,9	8,36	368,2	7,23	306,2	5,77
Jawa Barat	1 875,9	8,40	1 794,9	8,72	1 899,7	8,57
Jawa Tengah	970,6	5,31	863,8	4,99	752,5	4,20
DI Yogyakarta	85,5	4,07	80,2	4,07	59,0	2,81
Jawa Timur	892,0	4,31	906,9	4,47	849,3	4,14
Banten	488,9	8,58	509,4	9,55	452,1	7,95
Bali	33,6	1,37	47,2	1,99	50,4	2,12
Nusa Tenggara Barat	120,1	4,98	128,4	5,69	87,2	3,66
Nusa Tenggara Timur	75,1	3,12	88,4	3,83	87,7	3,59
Kalimantan Barat	113,2	4,78	121,3	5,15	110,8	4,58
Kalimantan Tengah	40,4	3,14	57,8	4,54	47,2	3,67
Kalimantan Selatan	100,0	4,83	97,7	4,92	74,4	3,63
Kalimantan Timur	118,2	7,17	115,5	7,50	146,2	8,86
Kalimantan Utara	16,6	5,79	16,1	5,68	11,2	3,92
Sulawesi Utara	102,6	8,69	99,2	9,03	92,6	7,82
Sulawesi Tengah	42,6	2,99	56,8	4,10	51,7	3,46
Sulawesi Selatan	218,3	5,81	220,6	5,95	193,0	5,11
Sulawesi Tenggara	42,3	3,62	63,1	5,55	45,8	3,78
Gorontalo	16,3	3,06	24,1	4,65	21,9	3,88
Sulawesi Barat	11,7	1,81	20,6	3,35	17,4	2,72
Maluku	47,8	6,72	72,2	9,93	51,2	6,98
Maluku Utara	28,8	5,56	31,1	6,05	18,2	3,43
Papua Barat	18,8	4,61	33,4	8,08	25,0	5,73
Papua	63,6	3,72	69,5	3,99	51,7	2,97
<b>Indonesia</b>	<b>7 454,8</b>	<b>5,81</b>	<b>7 560,8</b>	<b>6,18</b>	<b>7 024,2</b>	<b>5,50</b>

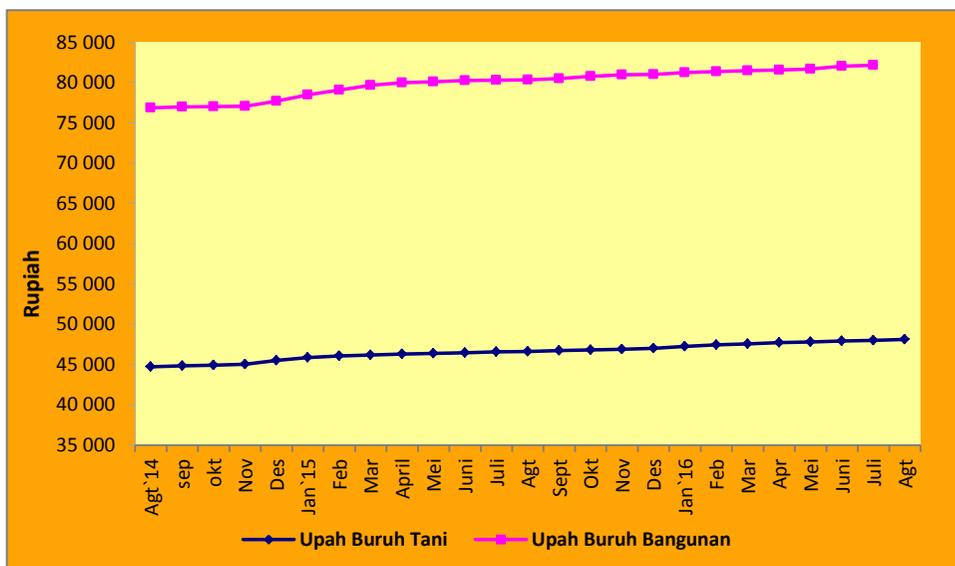
## VII. UPAH BURUH AGUSTUS 2016

### 1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Agustus 2016 naik sebesar 0,28 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp47.985,00 menjadi Rp48.120,00. Secara riil naik sebesar 0,22 persen, yaitu dari Rp37.208,00 menjadi Rp37.290,00.

**Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Agustus 2016 sebesar Rp48.120,00, naik 0,28 persen**

**Grafik 7.1**  
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan  
Agustus 2014–Agustus 2016



## 2. Upah Buruh Bangunan

Pada Agustus 2016, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,25 persen dibanding upah nominal Juli 2016, yaitu dari Rp82.143,00 menjadi Rp82.348,00, sedangkan upah riil naik sebesar 0,27 persen, yaitu dari Rp65.636,00 menjadi Rp65.810,00.

**Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Agustus 2016 sebesar Rp82.348,00, naik 0,25 persen**

**Tabel 7.1**  
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)  
Agustus 2014–Agustus 2016

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil <sup>1)</sup>	Nominal	Riil <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Agustus 2014	44 717	39 119	76 854	67 665
September	44 833	39 045	76 991	67 601
Oktober	44 924	38 955	77 011	67 305
November	45 026	38 466	77 056	66 348
Desember	45 491	37 839	77 682	65 279
Januari 2015	45 846	38 144	78 484	66 114
Februari	46 059	38 605	79 083	66 861
Maret	46 180	38 522	79 657	67 233
April	46 306	38 546	79 970	67 253
Mei	46 386	38 383	80 087	67 019
Juni	46 458	38 130	80 237	66 786
Juli	46 572	37 887	80 293	66 216
Agustus	46 629	37 757	80 342	66 000
September	46 739	37 855	80 494	66 158
Oktober	46 800	37 918	80 744	66 418
November	46 881	37 822	80 946	66 447
Desember	46 995	37 486	81 002	65 861
Januari 2016	47 241	37 372	81 221	65 702
Februari	47 437	37 494	81 367	65 879
Maret	47 559	37 236	81 481	65 843
April	47 731	37 559	81 554	66 202
Mei	47 796	37 563	81 677	66 146
Juni	47 898	37 421	82 028	65 997
Juli	47 985	37 208	82 143	65 636
Agustus	48 120	37 290	82 348	65 810

Catatan: <sup>1)</sup> Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

<sup>2)</sup> Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

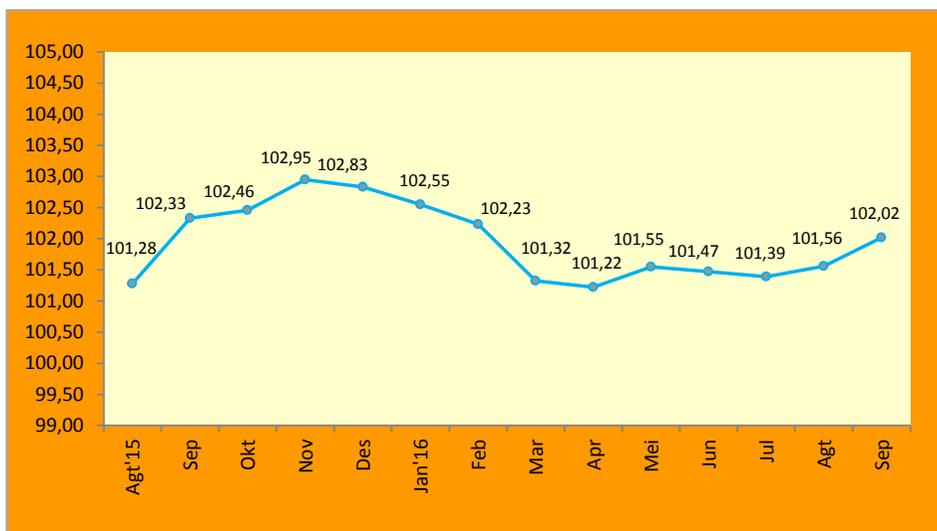
## VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN SEPTEMBER 2016

### A. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. NTP September 2016 tercatat 102,02 atau naik sebesar 0,45 persen dibanding NTP Agustus 2016 sebesar 101,56. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di empat subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan naik masing-masing 0,42 persen, 0,34 persen, 0,14 persen, dan 0,94 persen. Sebaliknya Subsektor Perikanan turun sebesar 0,06 persen.

**NTP September 2016 naik sebesar 0,45 persen**

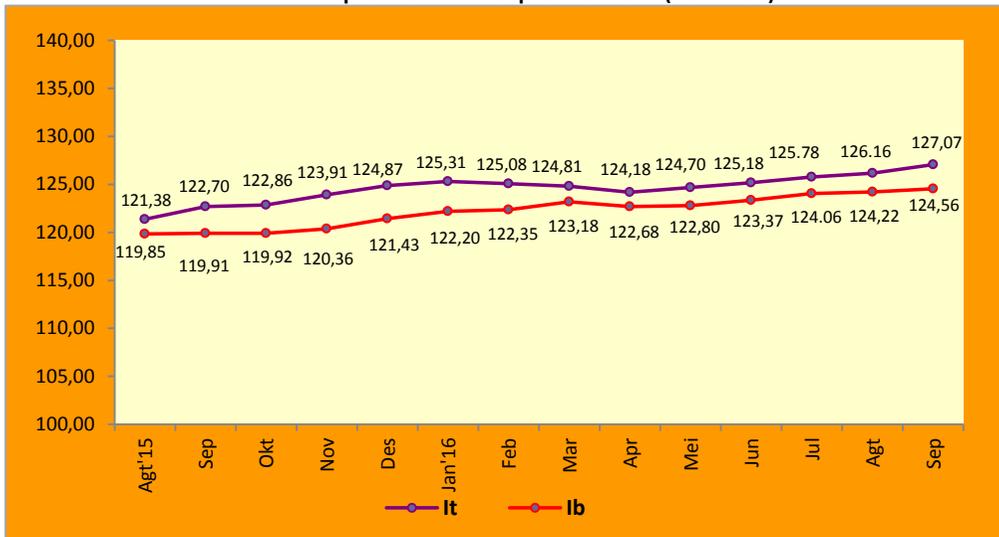
**Grafik 8.1**  
Nilai Tukar Petani (NTP), September 2015–September 2016 (2012=100)



2. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada September 2016 naik 0,73 persen bila dibanding It pada Agustus 2016, yaitu dari 126,12 menjadi 127,07. Kenaikan indeks tersebut disebabkan naiknya It di semua subsektor, yaitu Tanaman Pangan (0,72 persen), Tanaman Hortikultura (0,60 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,46 persen), Peternakan (1,17 persen), dan Perikanan (0,18 persen).

3. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada September 2016 naik sebesar 0,28 persen dibanding Ib Agustus 2016. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga dan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,16 persen.

**Grafik 8.2**  
**Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)**  
**September 2015–September 2016 (2012=100)**



4. NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada September 2016 naik sebesar 0,42 persen dibanding NTPP Agustus 2016. Kenaikan NTPP disebabkan kenaikan It Tanaman Pangan (0,72 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Pangan (0,30 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) naik sebesar 0,34 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Hortikultura (0,60 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura (0,27 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) naik sebesar 0,14 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Perkebunan Rakyat (0,46 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Perkebunan Rakyat (0,33 persen). NTP Peternakan (NTPT) naik sebesar 0,94 persen disebabkan kenaikan It Peternakan (1,17 persen) lebih besar dari kenaikan Ib Peternakan (0,22 persen). NTP Perikanan (NTNP) turun 0,06 persen disebabkan kenaikan It Perikanan (0,18 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Perikanan (0,24 persen).

**Tabel 8.1**  
**Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)**

Subsektor	Agustus 2016	September 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Gabungan/Nasional</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	<b>101,56</b>	<b>102,02</b>	<b>0,45</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>126,16</b>	<b>127,07</b>	<b>0,73</b>
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>124,22</b>	<b>124,56</b>	<b>0,28</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,04	129,46	0,32
- Indeks BPPBM	114,61	114,80	0,16
<b>Gabungan/Nasional tanpa Perikanan</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	<b>101,48</b>	<b>101,94</b>	<b>0,46</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>126,10</b>	<b>127,03</b>	<b>0,74</b>
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>124,26</b>	<b>124,61</b>	<b>0,28</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,02	129,43	0,32
- Indeks BPPBM	114,68	114,88	0,17
<b>1. Tanaman Pangan</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	<b>98,12</b>	<b>98,53</b>	<b>0,42</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>124,59</b>	<b>125,49</b>	<b>0,72</b>
- Padi	121,53	122,45	0,75
- Palawija	133,72	134,45	0,55
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>126,98</b>	<b>127,36</b>	<b>0,30</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,61	130,02	0,32
- Indeks BPPBM	118,78	119,05	0,23
<b>2. Tanaman Hortikultura</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	<b>102,89</b>	<b>103,23</b>	<b>0,34</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>129,01</b>	<b>129,79</b>	<b>0,60</b>
- Sayur-sayuran	126,16	127,42	0,99
- Buah-buahan	131,69	132,19	0,38
- Tanaman Obat	119,87	119,54	-0,28
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>125,39</b>	<b>125,73</b>	<b>0,27</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,04	129,41	0,29
- Indeks BPPBM	114,28	114,49	0,18
<b>3. Tanaman Perkebunan Rakyat</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	<b>98,01</b>	<b>98,14</b>	<b>0,14</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>122,17</b>	<b>122,73</b>	<b>0,46</b>
- Tanaman Perkebunan Rakyat	122,17	122,73	0,46
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>124,65</b>	<b>125,05</b>	<b>0,33</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	128,15	128,63	0,37
- Indeks BPPBM	113,69	113,80	0,10

Subsektor	Agustus 2016	September 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>4. Peternakan</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	<b>108,84</b>	<b>109,86</b>	<b>0,94</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>129,82</b>	<b>131,33</b>	<b>1,17</b>
- Ternak Besar	132,29	134,77	1,87
- Ternak Kecil	125,47	127,86	1,90
- Unggas	127,47	127,67	0,15
- Hasil Ternak	123,84	122,90	-0,76
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>119,28</b>	<b>119,55</b>	<b>0,22</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,11	129,50	0,30
- Indeks BPPBM	110,51	110,66	0,14
<b>5. Perikanan</b>			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	<b>103,15</b>	<b>103,09</b>	<b>-0,06</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	<b>126,64</b>	<b>126,87</b>	<b>0,18</b>
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	<b>122,78</b>	<b>123,07</b>	<b>0,24</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,28	129,71	0,33
- Indeks BPPBM	111,91	111,97	0,06
<b>5.1. Perikanan Tangkap</b>			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	<b>109,07</b>	<b>109,23</b>	<b>0,15</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	<b>132,87</b>	<b>133,37</b>	<b>0,38</b>
- Penangkapan Perairan Umum	129,72	130,14	0,32
- Penangkapan Laut	132,77	133,25	0,36
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>121,82</b>	<b>122,10</b>	<b>0,23</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	128,48	128,89	0,32
- Indeks BPPBM	111,38	111,46	0,07
<b>5.2. Perikanan Budidaya</b>			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	<b>98,93</b>	<b>98,72</b>	<b>-0,22</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	<b>122,17</b>	<b>122,21</b>	<b>0,03</b>
- Budidaya Air Tawar	122,56	122,47	-0,07
- Budidaya Laut	115,44	115,39	-0,04
- Budidaya Air Payau	120,02	120,35	0,28
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	<b>123,49</b>	<b>123,79</b>	<b>0,24</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,89	130,33	0,34
- Indeks BPPBM	112,30	112,36	0,05

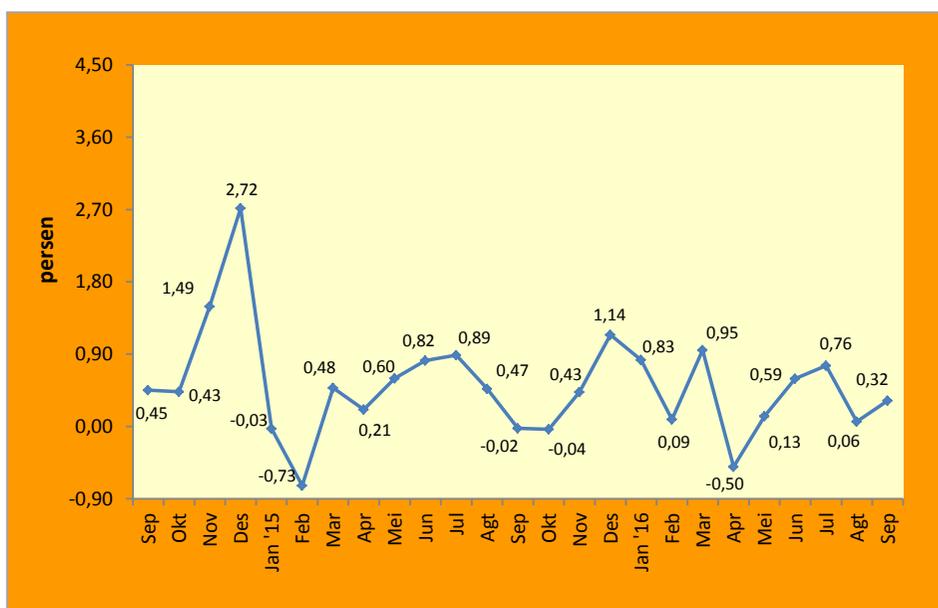
BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

## B. Inflasi Perdesaan

1. Pada September 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,32 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 129,46. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 27 provinsi dan deflasi di 6 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 0,94 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,03 persen. Deflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo sebesar 0,31 persen, sedangkan deflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat sebesar 0,10 persen.

**Pada September 2016  
terjadi inflasi perdesaan  
sebesar 0,32 persen**

**Grafik 8.3**  
Inflasi Perdesaan, September 2014–September 2016



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada September 2016, terjadi kenaikan indeks harga di semua kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan 0,44 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,34 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,16 persen; Sandang 0,23 persen; Kesehatan 0,33 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,10 persen serta Transportasi dan Komunikasi 0,09 persen.
3. Inflasi perdesaan September 2016 sebesar 0,32 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas cabai merah, bawang merah, rokok kretek filter, bawang putih, dan rokok kretek.

**Tabel 8.2**  
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran  
September 2014–September 2016

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
September 2014	0,48	0,51	0,61	0,08	0,38	0,22	0,33	0,45
Oktober	0,59	0,32	0,47	0,22	0,34	0,25	0,24	0,43
November	1,79	0,47	0,61	0,37	0,59	0,20	4,39	1,49
Desember	3,29	1,10	1,32	1,08	0,80	0,27	7,07	2,72
Januari 2015	0,52	0,88	1,18	0,70	0,83	0,42	-5,22	-0,03
Februari	-1,41	0,44	0,40	0,35	0,48	0,21	-2,68	-0,73
Maret	0,33	0,48	0,46	0,25	0,42	0,13	1,31	0,48
April	-0,68	0,60	0,52	0,38	0,43	0,18	2,24	0,21
Mei	0,97	0,46	0,31	0,38	0,26	0,08	0,30	0,60
Juni	1,35	0,70	0,36	0,53	0,23	0,30	0,15	0,82
Agustus	1,52	0,38	0,28	1,65	0,31	0,56	0,24	0,89
Agustus	0,83	0,29	0,15	0,12	0,21	0,42	0,11	0,47
September	-0,40	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,17	-0,02
Oktober	-0,43	0,44	0,14	0,15	0,23	0,20	0,09	-0,04
November	0,62	0,47	0,28	0,18	0,21	0,18	0,13	0,43
Desember	2,22	0,61	0,26	0,21	0,22	0,13	0,14	1,14
Januari 2016	1,60	0,93	0,40	0,39	0,53	0,33	-1,28	0,83
Februari	-0,10	0,50	0,10	0,29	0,28	0,13	-0,16	0,09
Maret	1,88	0,48	0,18	0,25	0,29	0,09	0,03	0,95
April	-0,83	0,38	0,14	0,17	0,25	0,10	-2,28	-0,50
Mei	-0,22	0,90	0,21	0,24	0,23	0,14	-0,15	0,13
Juni	0,63	1,05	0,28	0,92	0,26	0,17	0,14	0,59
Juli	1,24	0,63	0,23	0,48	0,26	0,47	0,12	0,76
Agustus	-0,10	0,14	0,21	0,21	0,29	0,35	0,04	0,06
September	0,44	0,34	0,16	0,23	0,33	0,10	0,09	0,32

4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender 2016 (September 2016 terhadap Desember 2015) adalah sebesar 3,26 persen dan tingkat inflasi perdesaan *year-on-year* (September 2016 terhadap September 2015) adalah sebesar 4,85 persen.

**Tabel 8.3**  
**Tingkat Inflasi Perdesaan September 2016, Tahun Kalender, dan Year-on-Year 2016**  
**Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**(2012=100)**

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan September 2016	Tingkat Inflasi Perdesaan 2016	
	September 2015	Desember 2015	September 2016		Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Umum</b>	<b>123,47</b>	<b>125,37</b>	<b>129,46</b>	<b>0,32</b>	<b>3,26</b>	<b>4,85</b>
1. Bahan Makanan	130,75	133,89	140,07	0,44	4,61	7,13
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	118,47	120,28	126,86	0,34	5,47	7,08
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	118,09	118,91	121,22	0,16	1,94	2,64
4. Sandang	118,30	118,95	122,80	0,23	3,24	3,80
5. Kesehatan	114,45	115,22	118,38	0,33	2,74	3,43
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	112,29	112,86	114,99	0,10	1,88	2,40
7. Transportasi dan Komunikasi	123,85	124,29	120,05	0,09	-3,41	-3,07

### C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- Pada September 2016 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,56 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It (0,73 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPPBM (0,16 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya NTUP di semua subsektor penyusun NTUP yaitu NTUP Tanaman Pangan (0,49 persen), Tanaman Hortikultura (0,42 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,36 persen), Peternakan (1,02 persen), dan Perikanan (0,12 persen).
- Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 22 provinsi mengalami kenaikan dan 10 provinsi mengalami penurunan, 1 provinsi relatif stabil. Kenaikan NTUP tertinggi pada September 2016 terjadi di Provinsi Jambi sebesar 1,94 persen, penurunan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi utara, yaitu sebesar 0,68 persen, sedang NTUP Provinsi D.I. Yogyakarta relatif stabil.

**Tabel 8.4**  
**Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya**  
**(2012=100)**

Subsektor	Agustus 2016	September 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	104,90	105,41	0,49
2. Tanaman Hortikultura	112,89	113,36	0,42
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	107,45	107,85	0,36
4. Peternakan	117,48	118,68	1,02
5. Perikanan	113,17	113,31	0,12
a. Tangkap	119,30	119,66	0,31
b. Budidaya	108,80	108,77	-0,03
<b>Nasional</b>	<b>110,08</b>	<b>110,69</b>	<b>0,56</b>

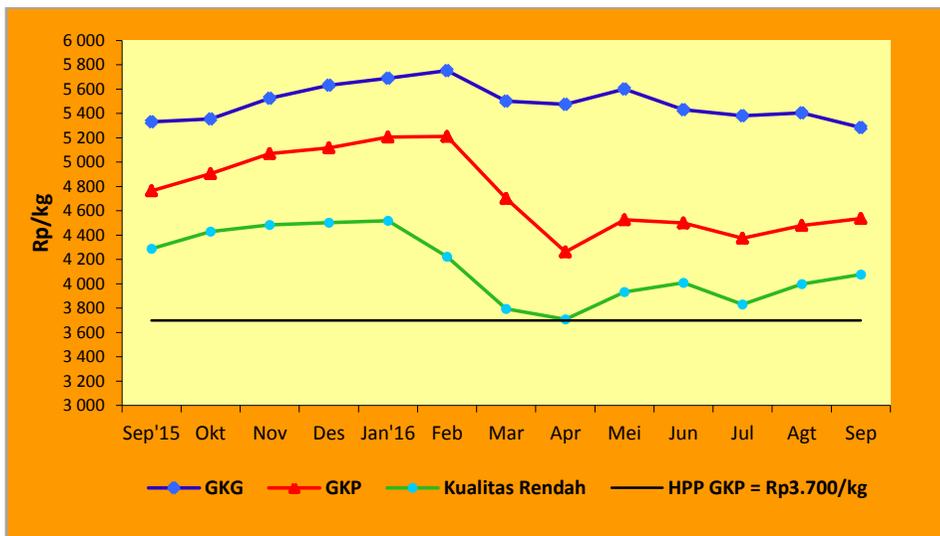
## IX. HARGA PANGAN SEPTEMBER 2016

### A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama September 2016, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 1,29 persen menjadi Rp4.537,00 per kg dan di tingkat penggilingan naik 1,26 persen menjadi Rp4.621,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

**Rata-rata harga GKP di tingkat petani September 2016 sebesar Rp4.537,00 per kg naik 1,29 persen**

**Grafik 9.1**  
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas September 2015–September 2016



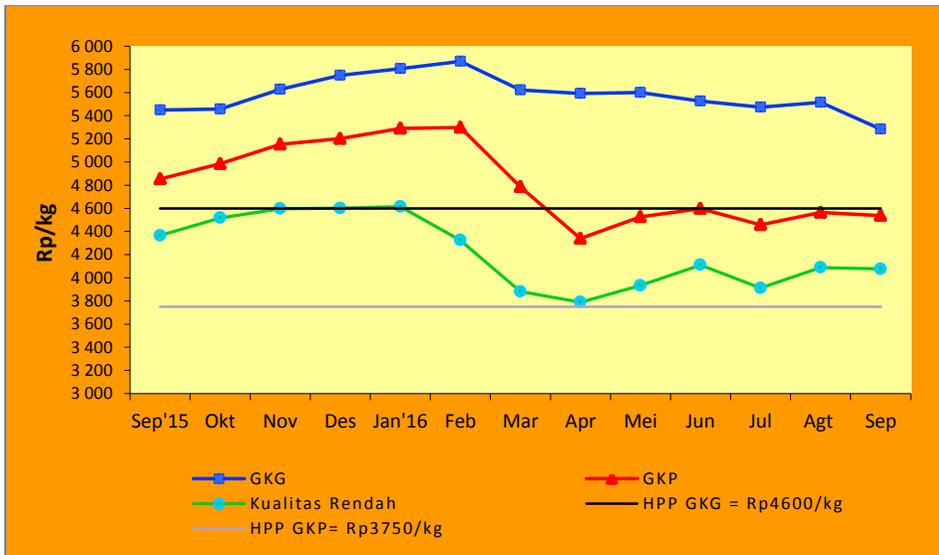
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani Rp7.909,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp8.009,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan masing-masing Rp3.200,00 per kg dan Rp3.300,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari kualitas GKP varietas Siam Baba yang terjadi di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciherang. Untuk tingkat petani terjadi di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), sedangkan di tingkat penggilingan terjadi di Kecamatan Caringin.

**Tabel 9.1**  
**Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air**  
**serta Perubahannya, September 2015–September 2016**

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Sep	18,47	4 765	3,70	12,56	5 330	1,57	25,22	4 287	0,74
Okt	18,22	4 905	2,93	12,54	5 356	0,48	25,13	4 428	3,29
Nov	18,36	5 070	3,38	12,33	5 524	3,13	28,57	4 485	1,28
Des	18,38	5 118	0,93	12,66	5 632	1,96	26,48	4 504	0,43
2016 Jan	17,81	5 206	1,72	12,23	5 689	1,02	26,09	4 520	0,35
Feb	18,01	5 211	0,10	12,64	5 753	1,13	25,78	4 223	-6,57
Mar	19,33	4 703	-9,76	12,72	5 501	-4,39	26,24	3 794	-10,15
Apr	18,98	4 262	-9,36	12,37	5 474	-0,49	25,36	3 709	-2,25
Mei	17,80	4 440	4,17	12,70	5 510	0,65	25,00	3 838	3,48
Jun	18,17	4 501	1,37	12,31	5 430	-1,45	24,54	4 008	4,42
Jul	18,96	4 376	-2,79	12,80	5 380	-0,92	26,02	3 831	-4,41
Agt	18,88	4 480	2,38	12,79	5 405	0,46	26,90	3 997	4,34
Sep	18,43	4 537	1,29	12,45	5 285	-2,23	24,73	4 076	1,98
<b>Perubahan (%) Sep'16 thd Sep'15</b>			<b>-4,78</b>			<b>-0,84</b>			<b>-4,92</b>

- Rata-rata harga GKG di tingkat petani selama September 2016 turun 2,23 persen menjadi Rp5.285,00 per kg, sedangkan di tingkat penggilingan turun 2,13 persen menjadi Rp5.397,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Untuk harga gabah kualitas rendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan mengalami kenaikan masing-masing 1,98 persen menjadi Rp4.076,00 per kg dan 2,35 persen menjadi Rp4.184,00 per kg.
- Selama periode September 2015–September 2016, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.211,00 per kg dan Rp5.753,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas rendah Rp4.520,00 per kg terjadi pada Januari 2016. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.262,00 per kg dan Rp3.709,00 per kg terjadi pada April 2016, sedangkan GKG Rp5.285,00 per kg terjadi pada September 2016.

**Grafik 9.2**  
**Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas**  
**September 2015–September 2016**



5. Pada periode September 2015–September 2016, di tingkat penggilingan, rata-rata harga tertinggi untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.298,00 per kg dan Rp5.869,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas rendah Rp4.614,00 per kg terjadi pada Januari 2016. Untuk rata-rata harga terendah pada GKG Rp5.397,00 terjadi pada September 2016, sedangkan GKP dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.340,00 per kg dan Rp3.790,00 per kg terjadi pada April 2016.
6. Dibandingkan September 2015, rata-rata harga di tingkat petani pada September 2016 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah semua mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,78 persen, 0,84 persen, dan 4,92 persen. Di tingkat penggilingan pada September 2016 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,76 persen, 0,97 persen, dan 4,15 persen.
7. Berdasarkan komposisinya, jumlah 1.255 observasi harga gabah masih didominasi transaksi penjualan gabah kering panen (GKP) sebanyak 858 observasi (68,37 persen), diikuti oleh gabah kualitas rendah sebanyak 251 observasi (20,00 persen), dan gabah kering giling (GKG) sebanyak 146 observasi (11,63 persen). Dari sejumlah observasi tersebut tidak terdapat kasus harga gabah di bawah HPP.

**Tabel 9.2**  
**Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air**  
**serta Perubahan, September 2015–September 2016**

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Sep	18,47	4 852	3,73	12,56	5 450	1,76	25,22	4 365	0,84
Okt	18,22	4 984	2,73	12,54	5 457	0,12	25,13	4 518	3,49
Nov	18,36	5 151	3,36	12,33	5 629	3,15	28,57	4 597	1,75
Des	18,38	5 202	0,98	12,66	5 748	2,12	26,48	4 601	0,09
2016 Jan	17,81	5 291	1,71	12,23	5 805	1,00	26,09	4 614	0,29
Feb	18,01	5 298	0,14	12,64	5 869	1,09	25,78	4 325	-6,26
Mar	19,33	4 783	-9,72	12,72	5 622	-4,20	26,24	3 881	-10,28
Apr	18,98	4 340	-9,27	12,37	5 593	-0,53	25,36	3 790	-2,34
Mei	17,80	4 527	4,32	12,70	5 600	0,14	25,00	3 934	3,80
Jun	18,17	4 598	1,56	12,31	5 526	-1,32	24,54	4 110	4,48
Jul	18,96	4 458	-3,03	12,80	5 473	-0,97	26,02	3 912	-4,82
Agt	18,88	4 564	2,37	12,79	5 514	0,75	26,90	4 088	4,50
Sep	18,43	4 621	1,26	12,45	5 397	-2,13	24,73	4 184	2,35
<b>Perubahan (%)</b> <b>Sep'16 thd Sep'15</b>			<b>-4,76</b>			<b>-0,97</b>			<b>-4,15</b>

8. Pada September 2016, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.111,00 per kg turun sebesar 2,74 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp8.965,00 per kg naik sebesar 0,72 persen. Rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.578,00 per kg naik sebesar 0,89 persen.

**Pada September 2016,  
rata-rata harga beras  
medium di penggilingan  
sebesar Rp8.965,00 per  
kg, naik 0,72 persen**

9. Dibandingkan dengan September 2015, rata-rata harga beras di penggilingan pada September 2016 untuk kualitas premium dan rendah mengalami penurunan harga, masing-masing sebesar 3,53 persen dan 3,68 persen, sedangkan kualitas medium naik sebesar 0,28 persen.

**Tabel 9.3**  
**Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (Broken), September 2015–September 2016**

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah		
	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Sep	9 444	3,48	7,48	8 940	2,27	15,32	8 906	2,08	23,37
Okt	9 455	0,12	7,34	8 961	0,24	15,56	8 917	0,12	22,91
Nov	9 564	1,16	7,46	9 272	3,47	15,29	9 032	1,29	22,85
Des	9 664	1,04	7,54	9 451	1,93	15,40	9 203	1,90	23,04
2016 Jan	9 723	0,62	7,17	9 548	1,03	15,29	9 280	0,84	23,52
Feb	9 785	0,63	7,17	9 622	0,77	15,41	9 195	-0,93	23,61
Mar	9 572	-2,18	7,33	9 444	-1,84	15,37	8 995	-2,17	23,39
Apr	9 128	-4,64	7,29	8 959	-5,14	15,51	8 511	-5,39	23,40
Mei	9 182	0,59	7,24	8 836	-1,38	15,74	8 488	-0,26	22,90
Jun	9 354	1,88	7,35	8 973	1,55	15,55	8 582	1,10	23,04
Jul	9 374	0,21	7,26	8 932	-0,45	15,58	8 558	-0,28	23,55
Agt	9 367	-0,08	7,47	8 901	-0,35	15,87	8 502	-0,65	22,75
Sep	9 111	-2,74	7,15	8 965	0,72	15,53	8 578	0,89	22,89
<b>Perubahan (%) Sep'16 thd Sep'15</b>		<b>-3,53</b>			<b>0,28</b>			<b>-3,68</b>	

Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%  
Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1% - 20%  
Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1% - 25%

## B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

1. Secara nasional, rata-rata harga beras pada September 2016 turun 0,13 persen dibanding Agustus 2016. Dibandingkan September 2015, harga beras naik 1,33 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,07 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami penurunan nilai riil sebesar 1,74 persen. Penurunan tertinggi terjadi di Tasikmalaya (3 persen) serta Purwokerto, Cilacap, Bekasi, Madiun, dan Mamuju (masing-masing 2 persen).

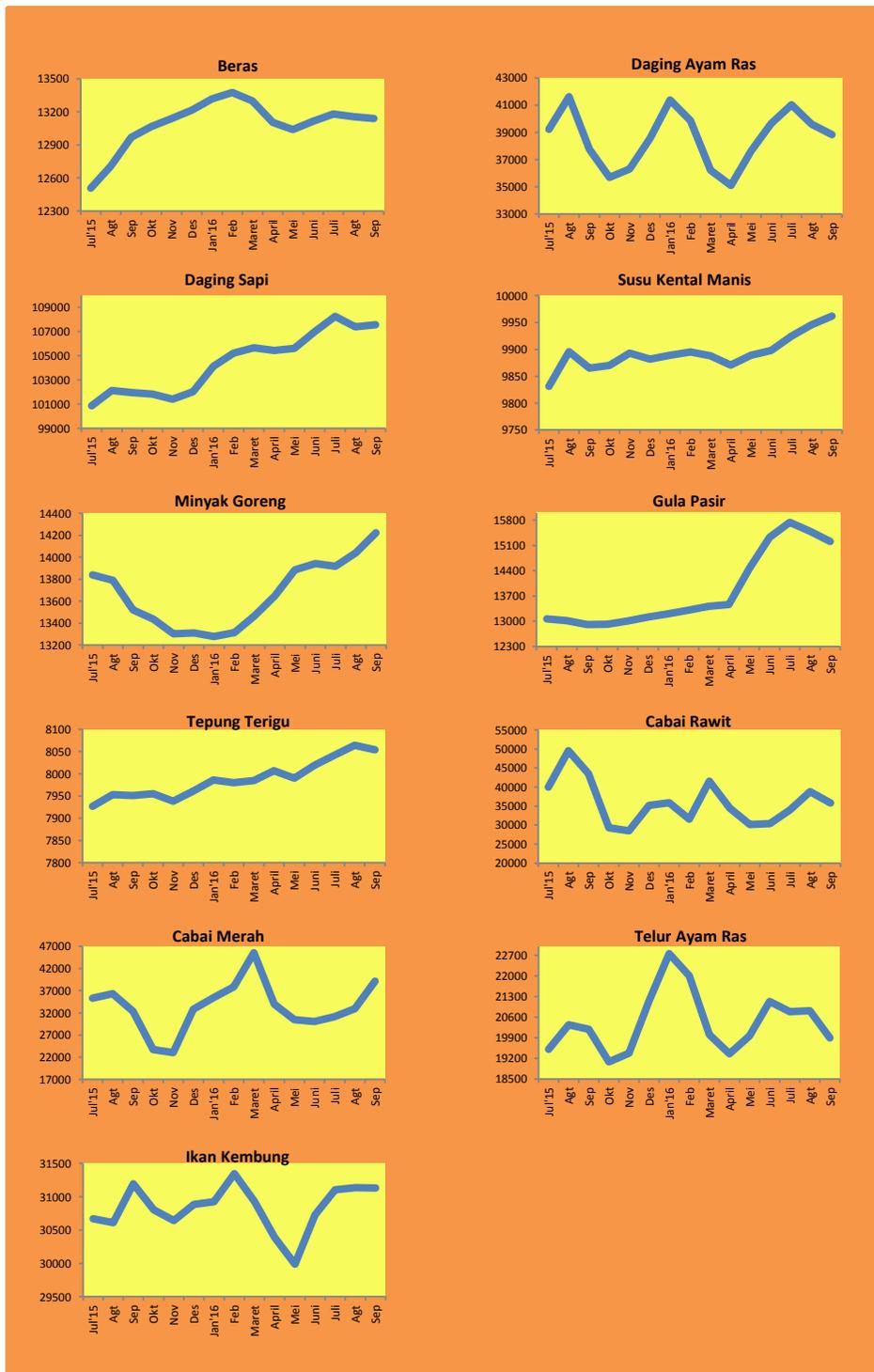
**Rata-rata harga beras September 2016 sebesar Rp13.140 per kg, turun 0,13 persen.**

2. Harga cabai merah naik 18,80 persen dibanding Agustus 2016 atau naik 21,05 persen dibanding September 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Cilacap (97 persen) dan Banda Aceh (81 persen). Harga minyak goreng naik 1,29 persen dibanding Agustus 2016 atau naik 5,18 persen dibanding September 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Lubuklinggau (8 persen) dan Pontianak (7 persen). Harga cabai rawit turun 7,77 persen dibanding Agustus 2016 atau turun 17,67 persen dibanding September 2015. Penurunan tertinggi terjadi di Mataram (41 persen) dan Sumenep (36 persen). Harga telur ayam ras turun sebesar 4,41 persen dibanding Agustus 2016 atau turun 1,47 persen dibanding September 2015. Penurunan tertinggi terjadi di Sorong (13 persen) dan Gorontalo (11 persen). Harga daging ayam ras turun 1,96 persen dibanding Agustus 2016 atau naik 2,88 persen dibanding September 2015. Penurunan tertinggi terjadi di Sibolga (19 persen) dan Medan (17 persen). Harga gula pasir turun 1,80 persen dibanding Agustus 2016 atau naik 17,86 persen dibanding September 2015. Penurunan tertinggi terjadi di Meulaboh dan Singaraja (masing-masing sebesar 12 persen), serta Pematangsiantar dan Sibolga (masing-masing sebesar 9 persen).
3. Komoditas lain seperti daging sapi, susu kental manis, ikan kembung, dan tepung terigu perubahannya relatif rendah.

**Tabel 9.4**  
**Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok**  
**September 2015–September 2016 (rupiah)**

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
September'15	12 968	37 742	101 959	9 865	13 521	12 906	7 951	43 471	32 344	20 194	31 195
Oktober	13 067	35 693	101 826	9 870	13 436	12 918	7 955	29 282	23 740	19 079	30 805
November	13 139	36 296	101 409	9 893	13 302	13 008	7 938	28 465	23 028	19 379	30 642
Desember	13 217	38 550	102 038	9 882	13 310	13 116	7 961	35 157	32 831	21 156	30 884
Januari'16	13 319	41 372	104 120	9 889	13 277	13 208	7 986	35 881	35 412	22 760	30 927
Februari	13 376	39 862	105 224	9 895	13 313	13 310	7 980	31 557	37 845	22 007	31 348
Maret	13 301	36 203	105 676	9 888	13 466	13 415	7 985	41 504	45 554	20 009	30 931
April	13 105	35 102	105 444	9 871	13 649	13 463	8 007	34 498	33 979	19 361	30 390
Mei	13 039	37 619	105 623	9 889	13 885	14 459	7 990	30 158	30 445	19 965	29 989
Juni	13 115	39 635	106 986	9 898	13 941	15 327	8 019	30 339	30 031	21 135	30 727
Juli	13 181	41 034	108 256	9 925	13 919	15 745	8 042	34 004	31 160	20 786	31 105
Agustus	13 157	39 606	107 393	9 946	14 041	15 490	8 064	38 805	32 955	20 815	31 136
September	13 140	38 830	107 576	9 962	14 222	15 211	8 054	35 790	39 151	19 897	31 133
<b>September'16 thd Agustus'16</b>	<b>-0,13</b>	<b>-1,96</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>1,29</b>	<b>-1,80</b>	<b>-0,12</b>	<b>-7,77</b>	<b>18,80</b>	<b>-4,41</b>	<b>-0,01</b>
<b>September'16 thd September'15 (dalam persen)</b>	<b>1,33</b>	<b>2,88</b>	<b>5,51</b>	<b>0,98</b>	<b>5,18</b>	<b>17,86</b>	<b>1,30</b>	<b>-17,67</b>	<b>21,05</b>	<b>-1,47</b>	<b>-0,20</b>

**Grafik 9.3**  
**Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok**  
**Juni 2015–September 2016 (rupiah)**



## X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN II-2016 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR SEPTEMBER 2016

### A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Data IHP (2010=100) disajikan BPS secara triwulanan untuk tingkat nasional yang meliputi IHP Gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan), IHP Sektor Akomodasi, Makanan/Minuman dan sejak triwulan II-2016 diperluas dengan IHP Sektor Angkutan Penumpang. Survei Harga Produsen Sektor Angkutan Penumpang telah dilakukan sejak tahun 2014 mencakup angkutan darat, kereta api, laut, sungai, danau, dan penyeberangan serta udara. Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan dari Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan pada triwulan II-2016 sebesar 128,87. Pada triwulan II-2016, IHP gabungan tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibandingkan IHP triwulan I-2016 sebesar 128,64 (q-to-q). IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian dan IHP Sektor Industri Pengolahan naik masing-masing sebesar 6,59 persen dan 0,10 persen, sebaliknya IHP Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar 2,09 persen. Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan II-2016 sebesar 124,83 naik 0,23 persen dibandingkan IHP triwulan I-2016 sebesar 124,55 (q-to-q). Demikian pula dengan IHP Sektor Angkutan Penumpang triwulan-II 2016 sebesar 212,45 naik 0,54 persen dibandingkan dengan IHP triwulan I-2016 sebesar 211,31 (q-to-q). Perubahan IHP gabungan triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (y-on-y) sebesar 1,19 persen, yaitu dari 127,35 pada triwulan II-2015 menjadi 128,87 pada triwulan II-2016. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 3,14 persen dan 2,45 persen. Sebaliknya Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami deflasi (y-on-y) sebesar 11,34 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (y-on-y) mengalami kenaikan sebesar 0,95 persen, yaitu dari 123,65 pada triwulan II-2015 menjadi 124,83 pada triwulan II-2016. Demikian juga dengan Sektor Angkutan Penumpang mengalami kenaikan 1,84 persen, yaitu dari 208,62 pada triwulan II-2015 menjadi 212,45 pada triwulan II-2016.

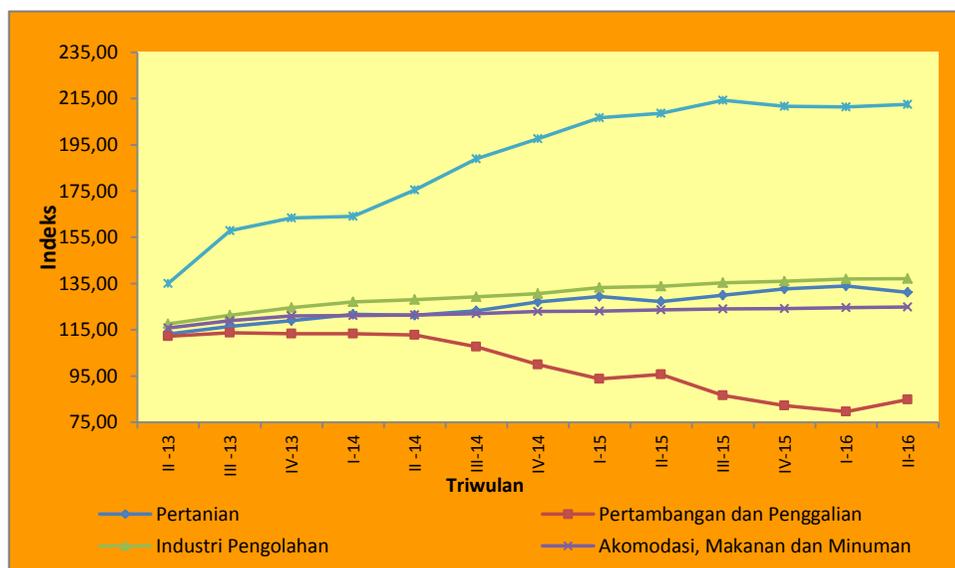
**Pada triwulan II-2016 terjadi inflasi harga produsen sebesar 0,18 persen**

**Tabel 10.1**  
**Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor**  
**Triwulan II-2016**

Sektor	IHP Triw II- 2015	IHP Triw I- 2016	IHP Triw II- 2016	Inflasi Harga Produsen ( <i>q-to-q</i> ) <sup>1)</sup> (%)		Inflasi Harga Produsen ( <i>y-on-y</i> ) <sup>2)</sup> (%)	
				Triw I- 2016	Triw II- 2016	Triw II- 2015	Triw II- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Gabungan (1+2+3)</b>	<b>127,35</b>	<b>128,64</b>	<b>128,87</b>	<b>0,44</b>	<b>0,18</b>	<b>2,16</b>	<b>1,19</b>
1. Pertanian	127,17	133,96	131,16	0,96	-2,09	4,87	3,14
2. Pertambangan dan Penggalian	95,68	79,59	84,83	-3,18	6,59	-15,21	-11,34
3. Industri Pengolahan	133,82	136,95	137,09	0,73	0,10	4,48	2,45
4. Akomodasi, Makanan dan Minuman	123,65	124,55	124,83	0,30	0,23	1,78	0,95
5. Angkutan Penumpang	208,62	211,31	212,45	-0,16	0,54	18,91	1,84

Keterangan: 1). Inflasi Produsen (*q-to-q*) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan t-1  
2). Inflasi Produsen (*y-on-y*) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t-2016 terhadap Triwulan t-2015

**Grafik 10.1**  
**Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor**  
**Triwulan II-2013 s.d. Triwulan II-2016**



### 1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan II-2016 turun 2,09 persen (*q-to-q*), yaitu dari 133,96 pada triwulan I-2016 menjadi 131,16 pada triwulan II-2016. Deflasi harga produsen pada sektor ini terutama dipengaruhi oleh turunnya IHP pada Subsektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 5,98 persen. Sedangkan Subsektor pada Sektor Pertanian yang mengalami kenaikan tertinggi tiga diantaranya adalah Subsektor Perkebunan (2,55 persen), Subsektor Kehutanan (1,10 persen), dan Subsektor Peternakan (1,05 persen). Apabila dibandingkan dengan triwulan II-2015, Sektor Pertanian pada triwulan II-2016 mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 3,14 persen, yaitu dari 127,17 pada triwulan II-2015 menjadi 131,16 pada triwulan II-2016. Subsektor Peternakan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 5,57 persen, diikuti oleh Subsektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 3,72 persen dan Subsektor Kehutanan 3,65 persen.

### 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II-2016 sebesar 84,83 mengalami kenaikan sebesar 6,59 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya sebesar 79,59 (*q-to-q*). Inflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh naiknya semua Subsektor pada Sektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing 8,93 persen untuk Subsektor Pertambangan dan 0,23 persen untuk Subsektor Penggalian. Sedangkan IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (*y-on-y*) mengalami penurunan sebesar 11,34 persen, yaitu dari 95,68 pada triwulan II-2015 menjadi 84,83 pada triwulan II-2016. Deflasi harga produsen (*y-on-y*) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh turunnya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 15,01 persen. Sedangkan pada Sektor Penggalian mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen terhadap triwulan II-2015 (*y-on-y*)

### 3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan II-2016, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 136,95 pada triwulan I-2016 menjadi 137,09 pada triwulan II-2016 (*q-to-q*). Tiga subsektor pada Sektor Industri Pengolahan yang mengalami inflasi tinggi adalah Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (2,59 persen); Subsektor Industri Minuman dan Rokok (1,39 persen); dan Subsektor Industri Karet, Plastik dan Hasil-hasilnya (1,10 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi antara lain Subsektor Industri Pupuk (8,04

persen); Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung, dan Pakan Ternak (2,26 persen); dan Subsektor Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan Cetakan (1,40 persen). Dibandingkan triwulan II-2015, IHP Sektor Industri Pengolahan pada triwulan II-2016 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (2,45 persen) dari 133,82 menjadi 137,09. Penyebab kenaikan IHP terutama terjadi pada Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (8,65 persen); Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak (6,69 persen); dan Subsektor Industri Minuman dan Rokok (5,41 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi adalah Subsektor Industri Pupuk (6,06 persen); Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas (3,92 persen); dan Subsektor Industri Logam Dasar (3,83 persen).

#### 4. Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan II-2016 sebesar 124,83 mengalami kenaikan 0,23 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 124,55 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makanan dan Minuman masing-masing sebesar 0,30 persen dan 0,21 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (*y-on-y*) naik sebesar 0,95 persen, yaitu dari 123,65 menjadi 124,83. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makanan dan Minuman masing-masing sebesar 1,02 persen dan 0,94 persen

#### 5. Sektor Angkutan Penumpang

IHP Sektor Angkutan penumpang pada triwulan II-2016 sebesar 212,45 mengalami kenaikan 0,54 persen dibandingkan IHP triwulan sebelumnya yang sebesar 211,31 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Angkutan Udara Penumpang dan Angkutan Kereta Api Penumpang masing-masing sebesar 1,10 persen dan 0,17 persen. IHP Sektor Angkutan penumpang triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (*y-on-y*) naik sebesar 1,84 persen, yaitu dari 208,62 menjadi 212,45. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Angkutan Udara Penumpang dan Angkutan Kereta Api Penumpang masing-masing sebesar 3,28 persen dan 0,35 persen.

Tabel 10.2  
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor  
Triwulan II-2016

Sektor/Subsektor	IHP Triw II- 2015	IHP Triw I- 2016	IHP Triw II- 2016	Inflasi Harga Produsen ( $q-t_0-q$ ) <sup>1)</sup> (%)		Inflasi Harga Produsen ( $y-on-y$ ) <sup>2)</sup> (%)	
				Triw I- 2016	Triw II- 2016	Triw II- 2015	Triw II- 2016
				(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pertanian</b>	<b>127,17</b>	<b>133,96</b>	<b>131,16</b>	<b>0,96</b>	<b>-2,09</b>	<b>4,87</b>	<b>3,14</b>
1. Tanaman Bahan Makanan	132,29	145,93	137,21	0,77	-5,98	5,88	3,72
2. Perkebunan	119,99	117,08	120,07	1,65	2,55	-0,22	0,07
3. Peternakan	122,29	127,76	129,10	1,49	1,05	5,62	5,57
4. Perikanan	124,14	126,97	127,29	0,34	0,26	6,01	2,54
5. Kehutanan	138,35	141,85	143,41	1,00	1,10	8,96	3,65
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>95,68</b>	<b>79,59</b>	<b>84,83</b>	<b>-3,18</b>	<b>6,59</b>	<b>-15,21</b>	<b>-11,34</b>
1. Pertambangan	88,51	69,06	75,23	-4,63	8,93	-19,95	-15,01
2. Penggalian	133,97	135,81	136,13	0,98	0,23	7,17	1,61
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>133,82</b>	<b>136,95</b>	<b>137,09</b>	<b>0,73</b>	<b>0,10</b>	<b>4,48</b>	<b>2,45</b>
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	137,80	145,94	149,72	3,29	2,59	2,27	8,65
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	115,52	116,41	116,49	0,06	0,07	5,34	0,84
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	139,73	152,51	149,07	1,38	-2,26	9,18	6,69
4. Industri Makanan Lainnya	128,34	132,09	133,18	1,35	0,83	4,40	3,78
5. Industri Minuman dan Rokok	134,80	140,14	142,09	2,14	1,39	5,85	5,41
6. Industri Pemintalan dan Pertenunan Tekstil	127,22	132,12	133,26	0,80	0,86	3,69	4,75
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	150,36	154,25	154,60	0,90	0,23	6,06	2,82
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	156,37	158,39	157,70	-0,42	-0,44	3,59	0,85
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	133,25	131,84	129,99	-0,80	-1,40	4,91	-2,45
10. Industri Pupuk	126,08	128,78	118,43	-1,38	-8,04	-0,44	-6,06
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	144,52	144,41	144,00	-0,17	-0,28	8,49	-0,36
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	129,63	124,43	124,54	-2,09	0,09	-1,18	-3,92
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	115,16	113,90	115,15	-0,23	1,10	2,02	-0,01
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	141,19	142,86	142,23	1,21	-0,44	2,82	0,73
15. Industri Logam Dasar	114,34	109,74	109,96	-1,22	0,21	5,69	-3,83
16. Industri Barang-Barang dari Logam	119,23	119,04	120,00	0,03	0,81	4,99	0,65
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	135,42	139,17	138,36	1,12	-0,58	5,79	2,17
18. Industri Alat Angkutan	128,59	131,50	132,03	0,49	0,40	2,44	2,68
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	145,35	148,51	148,52	0,54	0,01	5,38	2,18
<b>Akomodasi, Makanan dan Minuman</b>	<b>123,65</b>	<b>124,55</b>	<b>124,83</b>	<b>0,30</b>	<b>0,23</b>	<b>1,78</b>	<b>0,95</b>
1. Akomodasi	138,34	139,32	139,75	0,08	0,30	1,13	1,02
2. Makanan dan Minuman	121,50	122,38	122,64	0,33	0,21	1,89	0,94
<b>Angkutan Penumpang</b>	<b>208,62</b>	<b>211,31</b>	<b>212,45</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,54</b>	<b>18,91</b>	<b>1,84</b>
3. Angkutan Kereta Api Penumpang	181,10	181,43	181,73	0,18	0,17	23,27	0,35
4. Angkutan Darat Penumpang	151,29	151,48	151,22	-0,25	-0,17	17,21	-0,05
5. Angkutan Laut Penumpang	109,43	109,43	109,24	0,00	-0,18	1,59	-0,18
6. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang	159,74	159,59	157,45	0,17	-1,35	17,16	-1,44
7. Angkutan Udara Penumpang	292,94	299,26	302,54	-0,13	1,10	20,66	3,28

Keterangan: 1) Inflasi Produsen ( $q-t_0-q$ ) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan t-1

2) Inflasi Produsen ( $y-on-y$ ) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t-2016 terhadap Triwulan t-2015

## B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

1. Pada September 2016, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,52 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas, yaitu sebesar 1,97 persen dan terendah pada Sektor Pertanian sebesar 0,15 persen.

**Pada September 2016 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,52 persen**

Pada Agustus 2016 IHPB Umum naik sebesar 0,35 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 2,76 persen dan kenaikan terkecil adalah Sektor Industri sebesar 0,10 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian, Kelompok Barang Impor, serta Kelompok Barang Ekspor turun masing-masing sebesar 0,34 persen; 0,08 persen; dan 0,94 persen.

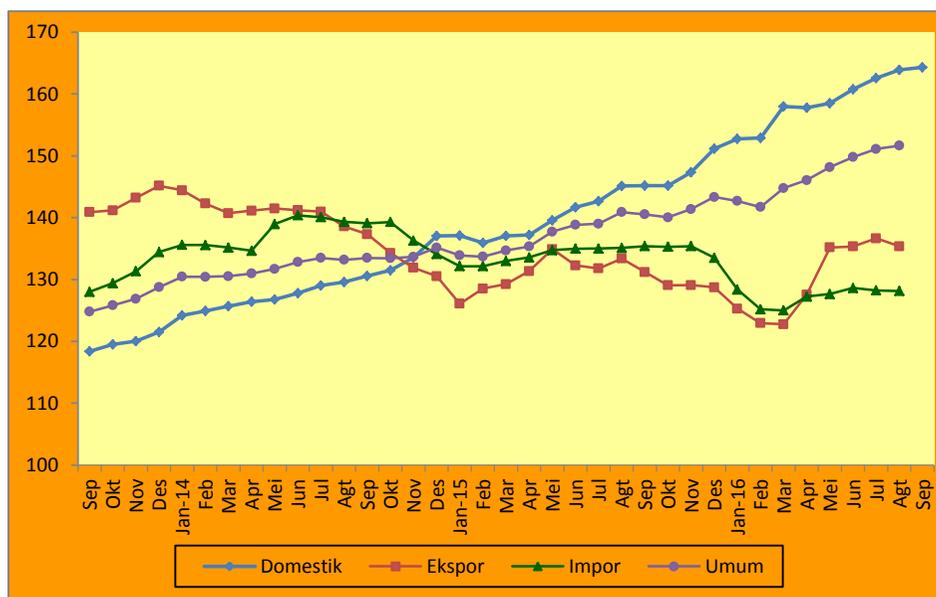
**Tabel 10.3**  
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia  
Juli 2016–September 2016, (2010=100)

Sektor/Kelompok	Juli 2016	Agustus 2016	September 2016	Perubahan	
				Agustus 2016 terhadap Juli 2016 (%)	September 2016 terhadap Agustus 2016 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	367,23	377,35	377,93	2,76	0,15
2. Pertambangan dan Penggalian	118,14	117,75	118,19	-0,34	0,38
3. Industri	135,05	135,18	135,54	0,10	0,27
Domestik	162,59	163,91	164,31	0,82	0,24
4. Impor Nonmigas	136,21	136,37	136,62	0,12	0,18
Impor	128,23	128,13		-0,08	
5. Ekspor Nonmigas	150,56	148,52	151,45	-1,35	1,97
Ekspor	136,65	135,36		-0,94	
<b>Umum Nonmigas</b>	<b>156,47</b>	<b>157,03</b>	<b>157,84</b>	<b>0,36</b>	<b>0,52</b>
<b>Umum</b>	<b>151,11</b>	<b>151,64</b>		<b>0,35</b>	

**Tabel 10.4**  
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar September 2016 (2010=100)

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan September terhadap Agustus 2016	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	September 2015	Desember 2015	Agustus 2016	September 2016		Tahun Kalender 2016	Year-on- Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	263,79	303,63	377,35	377,93	0,15	24,47	43,27
2. Pertambangan dan Penggalian	119,97	119,17	117,75	118,19	0,38	-0,82	-1,48
3. Industri	129,18	130,55	135,18	135,54	0,27	3,82	4,92
4. Impor Nonmigas	132,58	132,86	136,37	136,62	0,18	2,83	3,04
5. Ekspor Nonmigas	139,37	138,38	148,52	151,45	1,97	9,45	8,67
<b>Umum Nonmigas</b>	<b>142,25</b>	<b>146,14</b>	<b>157,03</b>	<b>157,84</b>	<b>0,52</b>	<b>8,01</b>	<b>10,96</b>

**Grafik 10.2**  
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia  
September 2013–September 2016



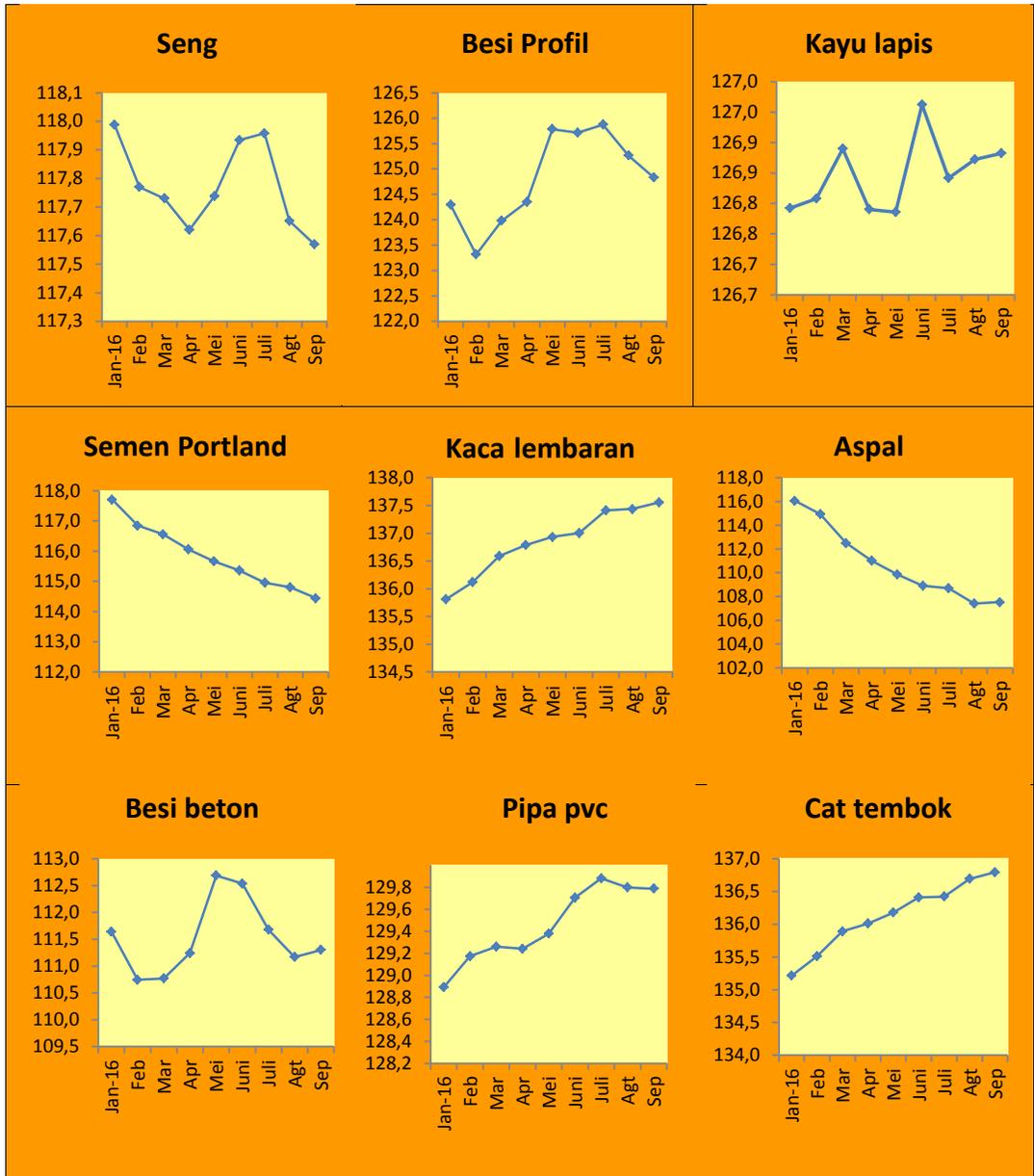
- IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada September 2016 naik sebesar 0,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal sebesar 0,16 persen.

**Tabel 10.5**  
**Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia September 2016**  
**Menurut Jenis Bangunan (2010=100)**

Jenis Bangunan	September 2015	Desember 2015	Agustus 2016	September 2016	Perubahan September terhadap Agustus 2016	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2016	Year-on- Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	130,17	131,08	132,41	132,62	0,16	1,18	1,88
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	127,29	128,24	129,13	129,19	0,05	0,74	1,49
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	124,75	125,19	125,08	125,17	0,08	-0,01	0,34
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	128,22	129,55	130,49	130,64	0,11	0,84	1,89
Bangunan Lainnya	126,52	127,50	128,20	128,24	0,03	0,58	1,36
<b>Konstruksi Indonesia</b>	<b>128,21</b>	<b>129,10</b>	<b>129,97</b>	<b>130,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,80</b>	<b>1,49</b>

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (aspal, kayu lapis, cat tembok, kaca lembaran, dan besi beton) pada September 2016 naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada besi beton sebesar 0,12 persen dan terkecil terjadi pada kayu lapis sebesar 0,01 persen. Aspal, cat tembok, dan kaca lembaran naik masing-masing sebesar 0,11 persen; 0,07 persen; 0,09 persen. Semen, seng, pipa pvc, dan besi profil turun masing-masing sebesar 0,31 persen; 0,07 persen; 0,01 persen; dan 0,34 persen.

Grafik 10.3  
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Januari–September 2016



## XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN II-2016

### A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

#### A.1. ITB TRIWULAN II-2016

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan II-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai ITB sebesar 110,24. Pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan II-2016 lebih optimis dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 99,46).
2. Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan II-2016 terjadi pada 16 lapangan usaha. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan kondisi bisnis tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi (nilai ITB sebesar 118,37), diikuti oleh Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (nilai ITB sebesar 113,73), dan Jasa Pendidikan (nilai ITB sebesar 111,76). Sedangkan penurunan usaha terjadi hanya pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 96,59).
3. Kondisi bisnis pada triwulan II-2016 meningkat karena adanya peningkatan pada semua komponen indeks, yaitu pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 114,70), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 113,09), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai ITB sebesar 104,95).

**Kondisi bisnis triwulan II-2016 meningkat dengan nilai Indeks Tendensi Bisnis (ITB) sebesar 110,24**

**Tabel 11.1**  
**Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2016**  
**Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan II-2016			ITB Triwulan II-2016
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	111,02	-	111,02
2. Pertambangan dan Penggalian	99,34	100,00	92,86	96,59
3. Industri Pengolahan	115,86	116,88	102,52	110,13
4. Pengadaan Listrik dan Gas	117,82	119,57	100,00	110,24
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	118,37	108,16	100,99	108,74
6. Konstruksi	107,49	108,44	102,60	105,50
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	121,23	117,72	105,80	113,73
8. Transportasi dan Pergudangan	115,72	104,76	108,89	110,64
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,45	111,17	110,57	110,64
10. Informasi dan Komunikasi	123,44	129,69	109,38	118,37
11. Jasa Keuangan	117,84	112,50	105,51	111,37
12. Real Estat	112,07	105,83	109,91	109,94
13. Jasa Perusahaan	110,12	111,95	109,27	110,09
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	109,76	107,32	107,32	108,22
15. Jasa Pendidikan	111,76	111,76	111,76	111,76
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,45	109,29	108,16	108,11
17. Jasa Lainnya	107,67	114,00	110,00	109,89
<b>Indeks Tendensi Bisnis (ITB)</b>	<b>114,70</b>	<b>113,09</b>	<b>104,95</b>	<b>110,24</b>

**A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN III-2016**

1. Selain pada triwulan berjalan, indeks komposit persepsi pengusaha mengenai kondisi bisnis dan perekonomian secara umum pada triwulan mendatang juga dihitung. Nilai ITB triwulan III-2016 diprediksi sebesar 109,06, artinya secara umum kondisi bisnis pada triwulan III-2016 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan II-2016. Tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan III-2016 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016 (nilai ITB sebesar 110,24). Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan III-2016 terjadi di semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 98,39). Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi diperkirakan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai Indeks sebesar 119,58.

**Kondisi bisnis pada triwulan III-2016 diprediksi meningkat (ITB 109,06)**

**Tabel 11.2**  
**Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2016**  
**Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk**

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan III-2016				Perkiraan ITB Triwulan III-2016
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109,41	99,59	112,89	-	108,04
2. Pertambangan dan Penggalian	96,71	88,42	103,27	101,47	98,39
3. Industri Pengolahan	117,88	100,48	113,05	104,78	109,50
4. Pengadaan Listrik dan Gas	116,40	-	112,00	109,84	112,59
5. Pengadaan Air	116,17	-	106,12	107,50	110,18
6. Konstruksi	110,10	-	114,61	101,63	107,49
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	113,07	104,45	107,75	108,37	109,01
8. Transportasi dan Pergudangan	112,87	-	110,88	-	112,08
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,03	-	107,97	-	111,03
10. Informasi dan Komunikasi	126,26	-	109,38	-	119,58
11. Jasa Keuangan	124,98	-	88,94	-	110,71
12. Real Estat	110,34	-	105,26	-	108,33
13. Jasa Perusahaan	112,20	-	100,00	-	107,37
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	115,12	-	114,63	-	114,93
15. Jasa Pendidikan	107,84	-	104,08	-	106,35
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,29	-	102,94	-	106,17
17. Jasa Lainnya	110,50	-	110,34	-	110,44
<b>Indeks Tendensi Bisnis (ITB)</b>	<b>113,62</b>	<b>100,59</b>	<b>109,01</b>	<b>105,57</b>	<b>109,06</b>

**Grafik 11.1**  
**Indeks Tendensi Bisnis<sup>1)</sup> Triwulan II-2011–Triwulan II-2016 dan**  
**Perkiraan Triwulan III-2016**



**Keterangan:**

<sup>1)</sup> ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.

<sup>2)</sup> Angka perkiraan ITB triwulan III-2016.

## B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

### B.1. ITK TRIWULAN II-2016

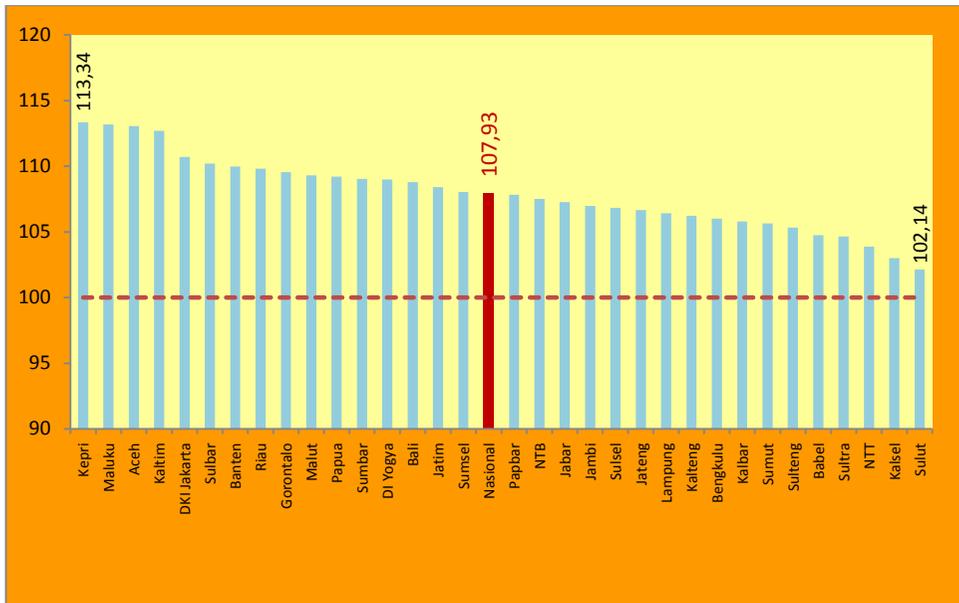
1. Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan II-2016 lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2016. Nilai ITK triwulan II-2016 sebesar 107,93 sedangkan triwulan I-2016 hanya sebesar 102,89. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2016 terutama didorong oleh naiknya tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 111,87), diikuti oleh naiknya daya beli dilihat dari indeks pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 110,37). Sedangkan kenaikan pendapatan rumah tangga tidak setinggi komponen lainnya (nilai indeks sebesar 104,97).
2. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 33 provinsi di Indonesia. Provinsi yang memiliki nilai ITK triwulan II-2016 tertinggi adalah Kepulauan Riau (nilai ITK sebesar 113,34). Sementara Provinsi Sulawesi Utara tercatat memiliki nilai ITK triwulan II-2016 terendah (nilai ITK sebesar 102,14).

**Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2016 meningkat (ITK 107,93)**

**Tabel 11.3**  
**Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016 dan Triwulan II-2016**  
**Menurut Variabel Pembentuk**

Variabel Pembentuk	ITK Triw I-2016	ITK Triw II-2016
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	102,43	104,97
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	103,83	110,37
Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	102,80	111,87
<b>Indeks Tendensi Konsumen</b>	<b>102,89</b>	<b>107,93</b>

**Grafik 11.2**  
**Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2016**  
**Tingkat Nasional dan Provinsi**



## B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN III-2016

1. Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2016 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan II-2016. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan III-2016 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan II-2016. Perkiraan nilai ITK triwulan III-2016 sebesar 109,26 sedangkan triwulan II-2016 sebesar 107,93.

**Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2016 diprediksi meningkat (ITK 109,26)**

2. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, dimana 17 provinsi diantaranya (51,52 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks di atas nasional. Provinsi yang memiliki nilai perkiraan ITK tertinggi adalah Provinsi D.I Yogyakarta (nilai ITK sebesar 117,30), sementara Provinsi Jambi memiliki nilai perkiraan ITK terendah (nilai ITK sebesar 100,43).

**Tabel 11.4**  
**Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016**  
**Menurut Variabel Pembentuk**

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw III-2016
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	111,64
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	105,09
<b>Indeks Tendensi Konsumen</b>	<b>109,26</b>

**Grafik 11.3**  
**Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016**  
**Tingkat Nasional dan Provinsi**



**Tabel 11.5**  
**Indeks Tendensi Konsumen<sup>1)</sup> Triwulan II-2015–Triwulan II-2016 dan**  
**Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi**

No	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		II-2015	III-2015	IV-2015	I-2016	II-2016	III-2016 <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	107,92	110,29	102,21	100,99	113,04	105,72
2.	Sumatera Utara	101,60	102,17	102,52	100,55	105,65	104,69
3.	Sumatera Barat	101,07	100,61	99,10	101,85	109,04	105,19
4.	R i a u	104,74	105,65	94,27	95,99	109,81	103,87
5.	J a m b i	99,57	101,02	100,94	100,53	106,97	100,43
6.	Sumatera Selatan	101,97	107,31	100,35	96,44	108,05	105,47
7.	Bengkulu	105,55	107,07	101,20	100,57	106,01	111,55
8.	Lampung	102,57	101,51	101,19	101,55	106,42	106,17
9.	Kep. Bangka Belitung	97,90	105,54	93,91	94,71	104,74	111,54
10.	Kep. R i a u	108,82	101,92	100,68	101,56	113,34	103,59
11.	DKI Jakarta	109,71	111,88	106,64	105,20	110,71	112,75
12.	Jawa Barat	105,67	109,69	102,38	104,03	107,28	107,70
13.	Jawa Tengah	103,60	109,81	99,87	100,28	106,66	110,09
14.	D.I. Yogyakarta	111,73	110,33	103,02	107,96	108,98	117,30
15.	Jawa Timur	103,88	115,98	102,12	105,38	108,42	111,19
16.	Banten	108,19	111,21	103,29	105,25	109,97	110,23
17.	B a l i	105,42	111,66	105,84	108,40	108,78	109,00
18.	Nusa Tenggara Barat	101,43	109,07	106,47	108,20	107,50	109,41
19.	Nusa Tenggara Timur	100,30	102,42	106,32	98,15	103,87	108,43
20.	Kalimantan Barat	105,05	106,86	104,07	104,15	105,80	103,34
21.	Kalimantan Tengah	106,37	104,46	104,74	103,04	106,22	107,39
22.	Kalimantan Selatan	107,21	103,25	101,51	99,34	103,00	111,52
23.	Kalimantan Timur	107,40	110,92	105,90	102,40	112,69	106,67
24.	Sulawesi Utara	103,46	100,28	108,42	96,08	102,14	108,62
25.	Sulawesi Tengah	105,03	111,42	103,85	107,58	105,34	116,79
26.	Sulawesi Selatan	106,24	103,38	102,68	101,91	106,83	114,12
27.	Sulawesi Tenggara	102,70	110,64	106,06	100,57	104,65	109,26
28.	Gorontalo	109,08	108,02	101,40	101,14	109,53	116,77
29.	Sulawesi Barat	111,64	107,24	109,15	105,58	110,20	109,96
30.	Maluku	107,38	108,48	112,03	109,96	113,17	115,37
31.	Maluku Utara	103,81	108,94	99,14	100,45	109,30	103,87
32.	Papua Barat	109,12	109,31	110,22	98,53	107,81	111,32
33.	Papua	107,57	109,13	111,72	99,78	109,20	114,53
	<b>Indonesia</b>	<b>105,22</b>	<b>109,00</b>	<b>102,77</b>	<b>102,89</b>	<b>107,93</b>	<b>109,26</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

<sup>2)</sup> Angka perkiraan ITK triwulan III-2016.

## XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA TETAP (ATAP) 2015

### A. PADI

1. Produksi Padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebanyak 4,55 juta ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi padi tahun 2015 terjadi di Pulau Jawa sebanyak 2,31 juta ton, dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,24 juta ton. Peningkatan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan produktivitas sebesar 2,06 kuintal/hektar (4,01 persen).

**Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton GKG atau naik 6,42 persen dibandingkan tahun 2014**

**Tabel 12.1**  
**Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015**

URAIAN	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	6 467 073	6 400 038	6 429 126	-67 035	-1,04	29 088	0,45
- Luar Jawa	7 368 179	7 397 269	7 687 512	29 090	0,39	290 243	3,92
- Indonesia	<b>13 835 252</b>	<b>13 797 307</b>	<b>14 116 638</b>	<b>-37 945</b>	<b>-0,27</b>	<b>319 331</b>	<b>2,31</b>
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	57,98	57,29	60,61	-0,69	-1,19	3,32	5,80
- Luar Jawa	45,85	46,21	47,39	0,36	0,79	1,18	2,55
- Indonesia	<b>51,52</b>	<b>51,35</b>	<b>53,41</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,33</b>	<b>2,06</b>	<b>4,01</b>
c. Produksi (ton)							
- Jawa	37 493 020	36 663 049	38 970 026	-829 971	-2,21	2 306 977	6,29
- Luar Jawa	33 786 689	34 183 416	36 427 815	396 727	1,17	2 244 399	6,57
- Indonesia	<b>71 279 709</b>	<b>70 846 465</b>	<b>75 397 841</b>	<b>-433 244</b>	<b>-0,61</b>	<b>4 551 376</b>	<b>6,42</b>

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

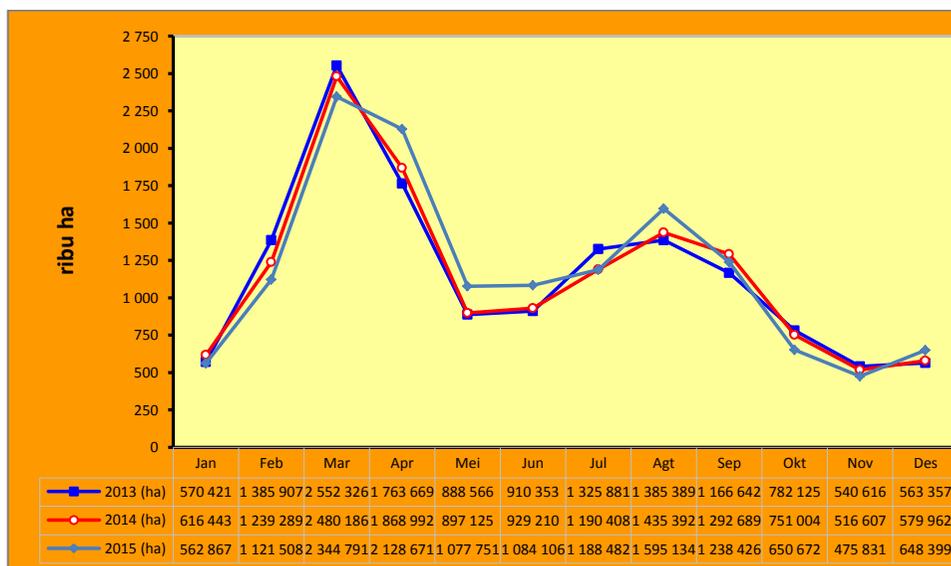
**Tabel 12.2**  
**Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Subround, 2013–2015**

URAIAN	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>a. Luas Panen (ha)</b>							
- Januari–April	6 272 323	6 204 910	6 157 837	-67 413	-1,07	-47 073	-0,76
- Mei–Agustus	4 510 189	4 452 135	4 945 473	-58 054	-1,29	493 338	11,08
- September–Desember	3 052 740	3 140 262	3 013 328	87 522	2,87	-126 934	-4,04
- <b>Januari–Desember</b>	<b>13 835 252</b>	<b>13 797 307</b>	<b>14 116 638</b>	<b>-37 945</b>	<b>-0,27</b>	<b>319 331</b>	<b>2,31</b>
<b>b. Produktivitas (ku/ha)</b>							
- Januari–April	51,65	50,87	53,68	-0,78	-1,51	2,81	5,52
- Mei–Agustus	50,92	51,12	52,12	0,20	0,39	1,00	1,96
- September–Desember	52,13	52,63	54,97	0,50	0,96	2,34	4,45
- <b>Januari–Desember</b>	<b>51,52</b>	<b>51,35</b>	<b>53,41</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,33</b>	<b>2,06</b>	<b>4,01</b>
<b>c. Produksi (ton)</b>							
- Januari–April	32 398 677	31 562 789	33 057 115	-835 888	-2,58	1 494 326	4,73
- Mei–Agustus	22 967 655	22 757 916	25 776 257	-209 739	-0,91	3 018 341	13,26
- September–Desember	15 913 377	16 525 760	16 564 469	612 383	3,85	38 709	0,23
- <b>Januari–Desember</b>	<b>71 279 709</b>	<b>70 846 465</b>	<b>75 397 841</b>	<b>-433 244</b>	<b>-0,61</b>	<b>4 551 376</b>	<b>6,42</b>

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

2. Pola panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2015 relatif sama dengan pola panen tahun 2014 dan tahun 2013. Puncak panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2015, 2014, dan 2013 terjadi pada bulan Maret.

**Grafik 12.1**  
**Pola Panen Padi, 2013–2015**



**B. JAGUNG**

1. Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,60 juta ton (3,18 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi jagung tersebut terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebanyak 0,46 juta ton dan 0,15 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 2,24 kuintal/hektar (4,52 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 49,65 ribu hektar (1,29 persen).

**Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, naik 3,18 persen dibandingkan tahun 2014**

**Tabel 12.3**  
**Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015**

Uraian	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	1 958 883	1 954 175	1 952 289	-4 708	-0,24	-1 886	-0,10
- Luar Jawa	1 862 621	1 882 844	1 835 078	20 223	1,09	-47 766	-2,54
- <b>Indonesia</b>	<b>3 821 504</b>	<b>3 837 019</b>	<b>3 787 367</b>	<b>15 515</b>	<b>0,41</b>	<b>-49 652</b>	<b>-1,29</b>
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	51,54	51,98	54,37	0,44	0,85	2,39	4,60
- Luar Jawa	45,19	47,00	49,03	1,81	4,01	2,03	4,32
- <b>Indonesia</b>	<b>48,44</b>	<b>49,54</b>	<b>51,78</b>	<b>1,10</b>	<b>2,27</b>	<b>2,24</b>	<b>4,52</b>
c. Produksi (ton)							
- Jawa	10 095 486	10 158 725	10 614 441	63 239	0,63	455 716	4,49
- Luar Jawa	8 416 367	8 849 701	8 997 994	433 334	5,15	148 293	1,68
- <b>Indonesia</b>	<b>18 511 853</b>	<b>19 008 426</b>	<b>19 612 435</b>	<b>496 573</b>	<b>2,68</b>	<b>604 009</b>	<b>3,18</b>

Keterangan: kualitas produksi jagung adalah pipilan kering

### C. KEDELAI

1. Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,18 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 8,19 ribu ton (0,86 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi kedelai tersebut terjadi di Luar Pulau Jawa sebanyak 30,50 ribu ton sedangkan di Pulau Jawa terjadi penurunan produksi kedelai sebanyak 22,31 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 0,17 kuintal/hektar (1,10 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 1,59 ribu hektar (0,26 persen).

**Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,18 ribu ton biji kering atau naik 0,86 persen dibandingkan tahun 2014**

**Tabel 12.4**  
**Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015**

Uraian	2013	2014	2015	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	342 796	378 986	358 070	36 190	10,56	-20 916	-5,52
- Luar Jawa	207 997	236 699	256 025	28 702	13,80	19 326	8,16
- <b>Indonesia</b>	<b>550 793</b>	<b>615 685</b>	<b>614 095</b>	<b>64 892</b>	<b>11,78</b>	<b>-1 590</b>	<b>-0,26</b>
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	15,23	16,42	16,75	1,19	7,81	0,33	2,01
- Luar Jawa	12,41	14,06	14,19	1,65	13,30	0,13	0,92
- <b>Indonesia</b>	<b>14,16</b>	<b>15,51</b>	<b>15,68</b>	<b>1,35</b>	<b>9,53</b>	<b>0,17</b>	<b>1,10</b>
c. Produksi (ton)							
- Jawa	521 954	622 155	599 843	100 201	19,20	-22 312	-3,59
- Luar Jawa	258 038	332 842	363 340	74 804	28,99	30 498	9,16
- <b>Indonesia</b>	<b>779 992</b>	<b>954 997</b>	<b>963 183</b>	<b>175 005</b>	<b>22,44</b>	<b>8 186</b>	<b>0,86</b>

Keterangan: kualitas produksi kedelai adalah biji kering

**Tabel 12.5**  
**Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lainnya, 2013–2015**

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	Perkembangan			
					2013–2014		2014–2015	
					Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1 Kacang Tanah</b>								
-Luas Panen	ha	519 056	499 338	454 349	-19 718	-3,80	-44 989	-9,01
-Produktivitas	ku/ha	13,52	12,79	13,33	-0,73	-5,40	0,54	4,22
-Produksi (biji kering)	ton	701 680	638 896	605 449	-62 784	-8,95	-33 447	-5,24
<b>2 Kacang Hijau</b>								
-Luas Panen	ha	182 075	208 016	229 475	25 941	14,25	21 459	10,32
-Produktivitas	ku/ha	11,24	11,76	11,83	0,52	4,63	0,07	0,60
-Produksi (biji kering)	ton	204 670	244 589	271 463	39 919	19,50	26 874	10,99
<b>3 Ubi Kayu</b>								
-Luas Panen	ha	1 065 752	1 003 494	949 916	-62 258	-5,84	-53 578	-5,34
-Produktivitas	ku/ha	224,60	233,55	229,51	8,95	3,98	-4,04	-1,73
-Produksi (umbi basah)	ton	23 936 921	23 436 384	21 801 415	-500 537	-2,09	-1 634 969	-6,98
<b>4 Ubi Jalar</b>								
-Luas Panen	ha	161 850	156 758	143 125	-5 092	-3,15	-13 633	-8,70
-Produktivitas	ku/ha	147,47	152,00	160,53	4,53	3,07	8,53	5,61
-Produksi (umbi basah)	ton	2 386 729	2 382 658	2 297 634	-4 071	-0,17	-85 024	-3,57

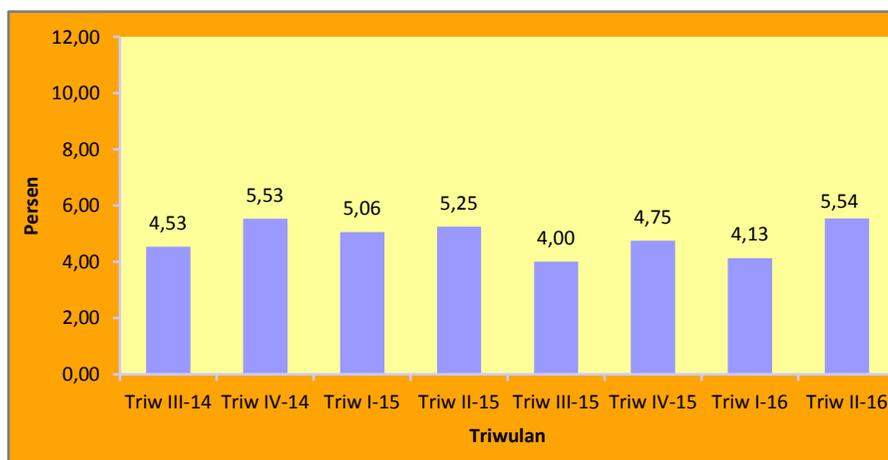
### XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN II-2016

#### A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

1. Pertumbuhan IBS triwulan II-2016 naik sebesar 5,54 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2015, triwulan I-2016 naik sebesar 4,13 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 4,75 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2014, triwulan III-2015 naik sebesar 4,00 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014, triwulan II-2015 naik sebesar 5,25 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014, triwulan I-2015 naik sebesar 5,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 5,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2013, dan triwulan III-2014 naik sebesar 4,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2013.

**Pertumbuhan produksi IBS triwulan II-2016 naik sebesar 5,54 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2015**

**Grafik 13.1**  
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*)  
Triwulan II-2014–Triwulan II-2016



2. Pertumbuhan produksi IBS triwulan I-2016 turun sebesar 1,34 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 2,41 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2015, triwulan III-2015 naik sebesar 0,83 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2015, triwulan II-2015 naik sebesar 2,16 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2015, triwulan I-2015 turun sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2014, dan triwulan IV-2014 naik sebesar 1,68 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2014.

3. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2016 (*y-on-y*) adalah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang naik 10,50 persen, industri barang galian bukan logam yang naik sebesar 8,58 persen, serta industri logam dasar naik 7,61 persen.
4. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2016 (*q-to-q*) adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya naik 5,60 persen, industri logam dasar naik 3,76 persen, dan industri alat angkutan lainnya naik 3,51 persen.
5. Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* Januari 2016 mengalami penurunan sebesar 1,12 persen. Sementara pada Februari 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,30 persen dan pada Maret 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen.

**Tabel 13.1**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2014–2016 (persen) 2010=100**

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014	-0,25	1,97	2,04	1,68	3,51	4,19	4,53	5,53	4,76
2015	-0,70	2,16	0,83	2,41	5,06	5,25	4,00	4,75	4,76
2016	-1,29	3,54			4,13	5,54			

**Tabel 13.2**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2014–2016 (persen) 2010=100**

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	2,99	5,12	2,57	-0,03	-1,29	-0,27
Februari	3,82	2,63	7,38	-0,61	-2,97	1,58
Maret	3,74	7,42	2,55	0,17	4,84	0,13
April	2,74	8,41	0,17 <sup>*)</sup>	0,39	1,31	-1,04 <sup>*)</sup>
Mei	3,79	2,39	7,41 <sup>**)</sup>	2,48	-3,21	3,78 <sup>**)</sup>
Juni	6,07	5,02	9,12 <sup>***)</sup>	0,05	2,62	4,26 <sup>***)</sup>
Juli	1,54	4,41		-2,64	-3,20	
Agustus	5,96	5,73		2,63	3,93	
September	9,77	2,01		6,34	2,60	
Oktober	5,35	6,20		-2,64	1,35	
November	4,76	6,60		-2,12	-1,74	
Desember	6,47	1,52		2,64	-2,26	

Catatan: <sup>\*)</sup> Angka Sementara  
<sup>\*\*)</sup> Angka Sangat Sementara  
<sup>\*\*\*)</sup> Angka Sangat Sangat Sementara

**Tabel 13.3**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan II-2016**  
**Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)**

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	10.39	5.17
11	Minuman	3.14	2.07
12	Pengolahan Tembakau	3.45	-0.39
13	Tekstil	-7.12	-4.51
14	Pakaian Jadi	-1.54	-6.81
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	1.69	5.68
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	-1.64	2.37
17	Kertas dan Barang dari Kertas	7.86	-0.80
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5.48	1.61
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-10.50	1.05
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	8.66	12.21
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-4.14	-11.33
23	Barang Galian Bukan Logam	8.57	4.15
24	Logam Dasar	5.24	-2.78
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	6.29	-1.21
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	5.66	-1.03
27	Peralatan Listrik	-9.76	-9.86
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	7.10	7.01
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	1.63	4.85
30	Alat Angkutan Lainnya	3.55	8.92
31	Furnitur	3.71	0.34
32	Pengolahan Lainnya	-1.02	-7.68
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	10.32	6.41
<b>Industri Manufaktur Besar dan Sedang</b>		<b>3.54</b>	<b>5.54</b>

**B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)**

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan II-2016 naik sebesar 6,56 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2015, triwulan I-2016 naik sebesar 5,91 persen dari triwulan I-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 5,79 persen dari triwulan IV-2014, dan triwulan III-2015 naik sebesar 6,87 persen dari triwulan III-2014.

**Pertumbuhan produksi IMK triwulan II-2016 naik 6,56 persen dari triwulan II-2015**

**Grafik 13.2**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)**  
**Triwulan II-2014–Triwulan II-2016**



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan II-2016 naik 5,74 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2016, triwulan I-2016 naik 0,76 persen dari triwulan IV-2015, triwulan IV-2015 naik 1,35 persen dari triwulan III-2015, triwulan III-2015 turun 1,31 persen dari triwulan II-2015, dan triwulan II-2015 naik 5,09 persen dari triwulan I-2015.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan II-2016 (*y-on-y*) adalah industri pengolahan tembakau naik 24,43 persen, industri komputer, barang elektronika dan optik naik 21,98 persen serta industri percetakan dan reproduksi media rekaman naik 21,09 persen.
4. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan II-2016 (*q-to-q*) adalah industri tekstil naik 11,78 persen, industri pengolahan tembakau naik 11,67 persen, dan industri peralatan listrik naik 10,17 persen.

**Tabel 13.4**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan**  
**Triwulan I-2014–Triwulan II-2016 (persen)**

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014	0,99	6,17	-3,43	2,39	4,41	4,07	5,18	6,02	4,91
2015	0,64	5,09	-1,31	1,35	5,65	4,57	6,87	5,79	5,71
2016	0,76	5,74			5,91	6,56			

**Tabel 13.5**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan II-2016**  
**Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)**

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	5,87	6,49
11	Minuman	9,43	14,42
12	Pengolahan tembakau	11,67	24,43
13	Tekstil	11,78	7,78
14	Pakaian jadi	10,17	8,45
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	8,80	7,18
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya)	0,86	1,41
17	Kertas dan barang dari kertas	5,15	11,48
18	Percetakan dan reproduksi media rekaman	1,95	21,09
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	3,74	17,66
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	-3,54	10,73
22	Karet, barang dari karet dan plastik	-1,37	-0,67
23	Barang galian bukan logam	2,11	1,74
24	Logam dasar	4,90	-0,60
25	Barang logam, bukan mesin & peralatannya	1,04	-13,65
26	Komputer, barang elektronik dan optik	5,27	21,98
27	Peralatan listrik	10,17	15,40
28	Mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)	-6,49	9,74
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	4,45	14,72
30	Alat angkutan lainnya	1,34	12,97
31	Furnitur	6,61	1,50
32	Pengolahan lainnya	2,50	-2,84
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	9,38	-6,67
<b>Industri Manufaktur Mikro dan Kecil</b>		<b>5,74</b>	<b>6,56</b>

## XIV. PARIWISATA AGUSTUS 2016

### A. Kunjungan Wisman

- Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari–Agustus 2016 mencapai 7,36 juta kunjungan atau naik 8,39 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015, yang tercatat sebanyak 6,18 juta kunjungan.

**Jumlah kunjungan wisman selama Januari–Agustus 2016 mencapai 7,36 juta kunjungan atau naik 8,39 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015**

**Tabel 14.1**  
Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia

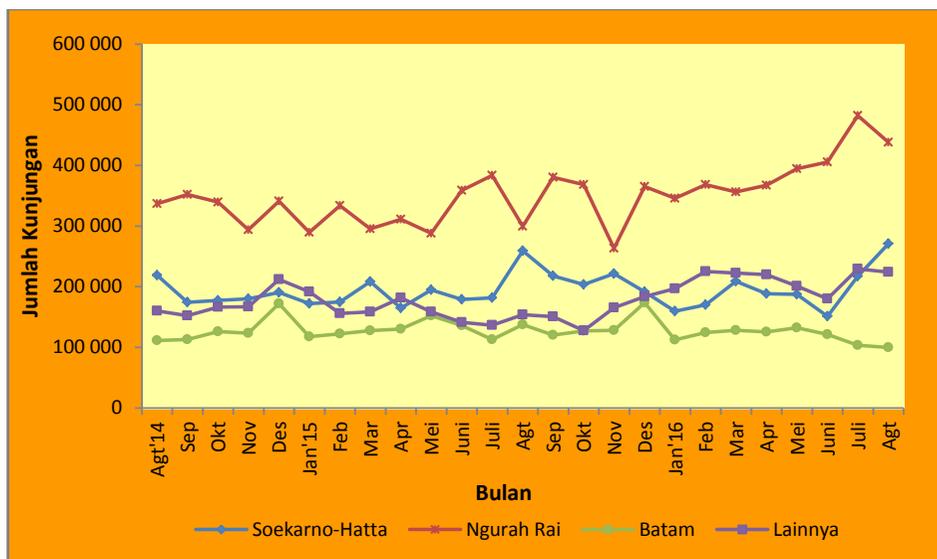
Jenis Pengunjung	Agustus 2015 (kunjungan)	Juli 2016 (kunjungan)	Agustus 2016 (kunjungan)	Januari– Agustus 2015 (kunjungan)	Januari– Agustus 2016 (kunjungan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Wisman melalui 19 pintu utama</b>	<b>841 548</b>	<b>968 651</b>	<b>970 021</b>	<b>6 184 513</b>	<b>6 826 435</b>
a. Wisman Reguler	813 185	931 694	944 455	5 982 496	6 585 553
b. Wisman khusus (wisman lansia, rohaniawan, diklat, riset, dll)	28 363*	36 522	25 566	202 017	240 882
<b>2. Wisman non 19 pintu utama</b>	<b>70 156</b>	<b>64 525</b>	<b>61 965</b>	<b>602 393</b>	<b>519 875</b>
a. Pos Lintas Batas**)	30 097	25 735	24 087	243 890	212 984
b. Pintu lainnya**)	40 059	38 790	37 878	358 503	316 891
<b>Jumlah</b>	<b>911 704</b>	<b>1 032 741</b>	<b>1 031 986</b>	<b>6 786 906</b>	<b>7 356 310</b>

\*) Termasuk TKA < 1 tahun

\*\*)Angka sementara

- Jumlah kunjungan wisman selama Agustus 2016 mencapai 1,03 juta kunjungan atau naik 13,19 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan selama Agustus 2015, yang tercatat sebanyak 911,7 ribu kunjungan. Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman bulan Agustus 2016 sedikit menurun sebesar 0,07 persen.

**Grafik 14.1**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk**  
**Agustus 2014–Agustus 2016**



3. Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Agustus 2016 mengalami kenaikan sebesar 46,17 persen dibandingkan Agustus 2015, yaitu dari 299,59 ribu kunjungan menjadi 437,93 ribu kunjungan. Namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami penurunan sebesar 9,18 persen.
4. Dari sekitar 1,03 juta kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada Agustus 2016, sebanyak 14,99 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Tionghoa, diikuti oleh wisman Australia (10,49 persen), Singapura (9,96 persen), Malaysia (9,85 persen), dan Jepang (5,64 persen).

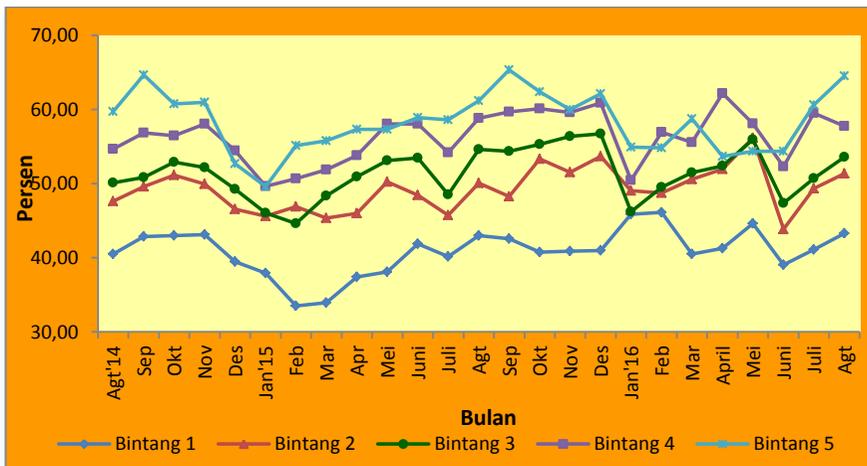
**B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang**

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi selama Agustus 2016 mencapai 55,21 persen, yang berarti terjadi penurunan 0,40 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada periode yang sama tahun 2015. Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Agustus 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,44 poin.

**TPK Hotel Berbintang Agustus 2016 mencapai 55,21 persen atau turun 0,40 poin dibanding TPK Agustus 2015**

2. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Angka TPK hanya menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Kinerja sektor perhotelan tidak hanya diukur dari besaran TPK tetapi juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

**Grafik 14.2**  
**Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Agustus 2014–Agustus 2016**



3. TPK Hotel Berbintang di Bali pada Agustus 2016 sebesar 72,40 persen, atau naik sebesar 4,91 poin dibandingkan TPK Agustus 2015. Demikian pula jika dibandingkan dengan Juli 2016, TPK Agustus 2016 di Bali mengalami kenaikan sebesar 1,78 poin.

4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Agustus 2016 mencapai 1,80 hari, atau mengalami penurunan 0,13 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama Agustus 2015. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebesar 0,01 poin.

**Tabel 14.2**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel**  
**Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Agustus 2015–Agustus 2016**

Bulan/ Tahun	Wisman		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK 27 Prov.		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- Bahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2015</b>	<b>10 230 775</b>	<b>3,12</b>	<b>3 936 066</b>	<b>5,15</b>	<b>53,04</b>	<b>1,20</b>	<b>60,55</b>	<b>0,21</b>	<b>1,98</b>	<b>-0,01</b>
<b>Jan–Agustus</b>	<b>6 322 592</b>	<b>2,71</b>	<b>2 551 854</b>	<b>6,08</b>	<b>51,25</b>	<b>0,17</b>	<b>59,27</b>	<b>-1,38</b>	<b>2,05</b>	<b>0,05</b>
Agustus	895 420	3,88	299 594	-27,93	55,61	4,36	67,49	3,20	1,93	0,03
September	905 806	1,15	380 491	21,26	56,26	0,65	67,65	0,16	1,96	0,03
Oktober	861 505	-5,14	368 026	-3,39	56,60	0,34	65,01	-2,64	1,92	-0,04
November	820 669	-4,98	263 232	-39,81	56,08	-0,52	59,09	-5,92	1,75	-0,17
Desember	971 866	15,56	364 903	27,86	57,25	1,17	60,32	1,23	1,83	0,08
<b>2016</b>	<b>6 826 435</b>	<b>10,38</b>	<b>3 153 094</b>	<b>23,56</b>	<b>52,74</b>	<b>1,49</b>	<b>61,15</b>	<b>1,88</b>	<b>1,82</b>	<b>-0,23</b>
Januari	814 303	-16,21	345 727	-5,55	49,33	-7,92	54,38	-5,94	1,83	0,00
Februari	888 309	9,09	368 389	6,15	52,15	2,82	62,46	8,08	1,83	0,00
Maret	915 019	3,01	356 198	-3,31	52,88	0,73	58,56	-3,90	1,81	-0,02
April	901 095	-1,52	367 370	3,55	54,38	1,50	55,08	-3,48	1,88	0,07
Mei	915 206	1,57	394 443	7,37	55,46	1,08	60,06	4,96	1,75	-0,13
Juni	857 651	-6,29	405 686	2,85	48,63	-6,83	56,77	-5,51	1,84	-0,09
Juli	1 032 741	20,42	482 201	18,86	53,77	5,14	70,62	13,85	1,81	-0,03
Agustus	1 031 986	-0,07	437 929	-9,18	55,21	1,44	72,40	1,78	1,80	-0,01

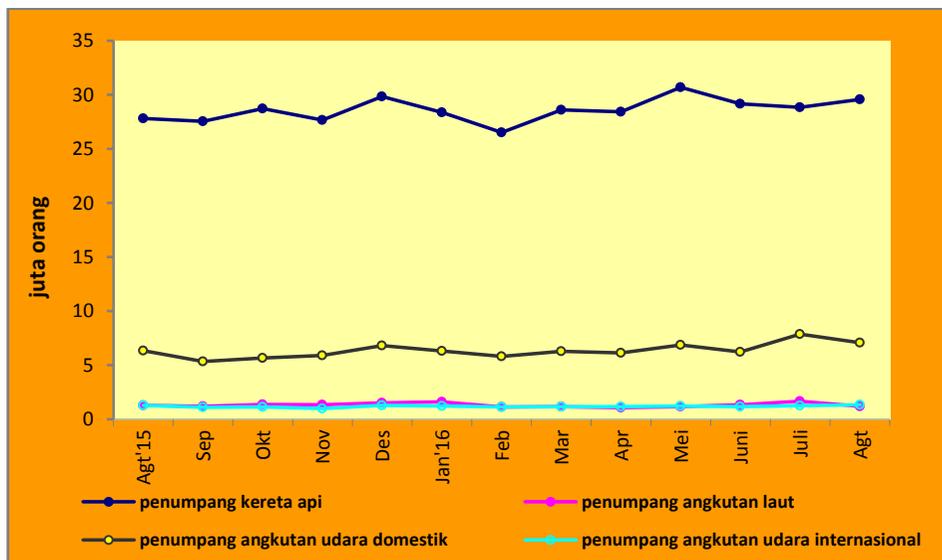
## XV. TRANSPORTASI NASIONAL AGUSTUS 2016

### A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Agustus 2016 mencapai 7,1 juta orang atau turun 10,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 11,54 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

**Jumlah penumpang angkutan udara domestik Agustus 2016 mencapai 7,1 juta orang, turun 10,16 persen**

**Grafik 15.1**  
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Agustus 2015–Agustus 2016



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Agustus 2016 mencapai 1,3 juta orang atau naik 6,20 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 5,25 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

**B. Angkutan Laut Dalam Negeri**

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Agustus 2016 mencapai 1,2 juta orang atau turun 27,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 5,18 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Agustus 2016 mencapai 23,6 juta ton atau naik 12,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 17,64 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

**Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Agustus 2016 mencapai 1,2 juta orang, turun 27,16 persen**

**C. Angkutan Kereta Api**

1. Jumlah penumpang kereta api Agustus 2016 mencapai 29,6 juta orang atau naik 2,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 6,45 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Agustus 2016 mencapai 2,8 juta ton atau naik 1,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun turun 1,28 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

**Jumlah penumpang kereta api Agustus 2016 mencapai 29,6 juta orang, naik 2,63 persen**

**Tabel 15.1**  
**Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi**  
**Agustus 2015–Agustus 2016**

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>2015</b>	<b>68 780,8</b>	<b>-</b>	<b>13 658,2</b>	<b>-</b>	<b>15 130,0</b>	<b>-</b>	<b>238 308,5</b>	<b>-</b>	<b>325 945</b>	<b>-</b>	<b>32 035</b>	<b>-</b>
Agustus	6 343,9	-1,20	1 268,5	9,09	1 271,9	-18,76	20 065,6	11,80	27 796	0,67	2 881	7,58
September	5 330,6	-15,97	1 092,9	-13,84	1 195,8	-5,98	21 474,2	7,02	27 549	-0,89	2 801	-2,78
Oktober	5 676,5	6,49	1 125,1	2,95	1 375,2	15,00	21 906,2	2,01	28 718	4,24	2 844	1,54
November	5 903,8	4,00	985,6	-12,40	1 330,1	-3,28	22 081,7	0,80	27 669	-3,65	2 677	-5,87
Desember	6 799,1	15,16	1 287,2	30,60	1 509,7	13,50	22 345,7	1,20	29 831	7,81	2 887	7,84
<b>2016</b>	<b>52 629,7</b>	<b>-</b>	<b>9 686,3</b>	<b>-</b>	<b>10 325,5</b>	<b>-</b>	<b>169 272,3</b>	<b>-</b>	<b>230 202</b>	<b>-</b>	<b>22 556</b>	<b>-</b>
Januari	6 322,5	-7,01	1 229,6	-4,47	1 593,1	5,52	20 141,5	-9,86	28 358	-4,94	2 941	1,87
Februari	5 815,8	-8,01	1 133,7	-7,80	1 122,8	-29,52	19 594,5	-2,72	26 511	-6,51	2 682	-8,81
Maret	6 293,5	8,21	1 178,9	3,99	1 161,4	3,44	20 444,9	4,34	28 617	7,94	2 729	1,75
April	6 142,8	-2,39	1 165,7	-1,12	1 064,1	-8,38	20 849,9	1,98	28 435	-0,64	2 883	5,64
Mei	6 883,0	12,05	1 219,4	4,61	1 174,2	10,35	21 692,1	4,04	30 703	7,98	2 683	-6,94
Juni	6 219,4	-9,64	1 166,7	-4,32	1 348,2	14,82	22 028,7	1,55	29 159	-5,03	2 983	11,18
Juli	7 876,6	26,65	1 257,2	7,76	1 655,7	22,81	20 916,6	-5,05	28 831	-1,12	2 811	-5,77
Agustus	7 076,1	-10,16	1 335,1	6,20	1 206,0	-27,16	23 604,1	12,85	29 588	2,63	2 844	1,17

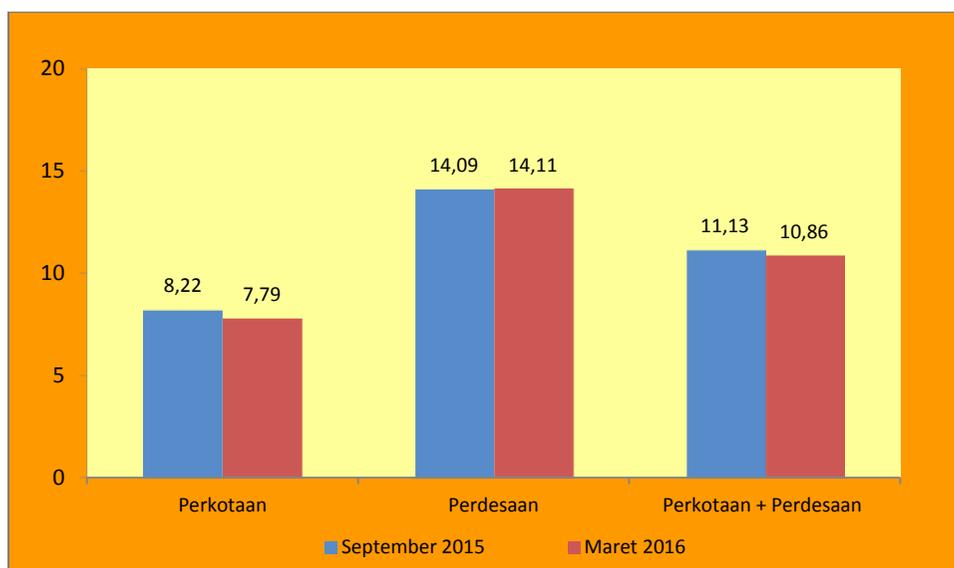
## XVI. KEMISKINAN MARET 2016 DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2016

### A. Perkembangan Kemiskinan September 2015–Maret 2016

1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), menurun 0,50 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang sebanyak 28,51 juta orang (11,13 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1. dan Tabel 16.1.

**Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang**

**Grafik 16.1**  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah  
September 2015–Maret 2016



2. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun lebih banyak dibanding penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan. Selama periode September 2015–Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sekitar 0,28 juta orang, sementara di daerah perdesaan menurun sekitar 0,22 juta orang.

3. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada Maret 2016, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 63,08 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada September 2015 sebesar 62,75 persen.

**Tabel 16.1**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Daerah, September 2015–Maret 2016**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkotaan</b>					
September 2015	247 840	108 538	356 378	10,62	8,22
Maret 2016	255 181	109 346	364 527	10,34	7,79
<b>Perdesaan</b>					
September 2015	256 120	76 914	333 034	17,89	14,09
Maret 2016	266 132	77 514	343 646	17,67	14,11
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>					
September 2015	251 943	92 866	344 809	28,51	11,13
Maret 2016	260 469	93 917	354 386	28,01	10,86

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015 dan Maret 2016

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2015–Maret 2016 adalah:

- Selama periode September 2015–Maret 2016 terjadi inflasi umum relatif rendah yaitu tercatat sebesar 1,71 persen.
- Secara nasional, rata-rata harga daging ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,08 persen yaitu dari Rp37.742,- per kg pada September 2015 menjadi Rp36.203,- per kg pada Maret 2016. Selain itu, harga eceran komoditas bahan pokok lain yang mengalami penurunan adalah telur ayam ras yaitu mengalami penurunan sebesar 0,92 persen dan minyak goreng yang mengalami penurunan sebesar 0,41 persen.
- Nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2016 naik sebesar 1,75 persen dibanding upah buruh tani per hari September 2015, yaitu dari Rp46.739,00 menjadi Rp47.559,00. Selain itu, rata-rata upah buruh bangunan per hari pada Maret 2016 naik sebesar 1,23 persen dibanding upah buruh tani per hari September 2015, yaitu dari Rp79.657,00 menjadi Rp81.481,00.

- d. Persentase kenaikan pendapatan (*proxy* pengeluaran) penduduk miskin di desil 1 dan desil 2 cukup tinggi sebesar masing-masing 7,53 persen dan 7,82 persen (Maret 2015–Maret 2016).
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2016 mencapai 5,50 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan pada Agustus 2015 yang sebesar 6,18 persen.

## **B. Perubahan Garis Kemiskinan September 2015–Maret 2016**

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode September 2015–Maret 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,78 persen, yaitu dari Rp344.809,- per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp354.386,- per kapita per bulan pada Maret 2016. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,50 persen pada Maret 2016. Dibedakan wilayah, sumbangan GKM terhadap GK di perkotaan adalah 70,00 persen sementara di perdesaan 77,44 persen.

**Tabel 16.2**  
**Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap**  
**Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, Maret 2016**

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan</b>	<b>70,00</b>	<b>Makanan</b>	<b>77,44</b>
Beras	21,55	Beras	29,54
Rokok kretek filter	9,08	Rokok kretek filter	7,96
Telur ayam ras	3,66	Telur ayam ras	3,02
Daging ayam ras	3,01	Gula pasir	2,99
Mie instan	2,80	Mie instan	2,43
Gula pasir	2,14	Bawang merah	2,26
Roti	2,01	Kopi bubuk& kopi instan (sachet)	1,76
Bawang merah	1,82	Roti	1,69
Tempe	1,80	Daging ayam ras	1,68
Tahu	1,75	Tempe	1,67
Lainnya	20,38	Lainnya	22,44
<b>Bukan Makanan</b>	<b>30,00</b>	<b>Bukan Makanan</b>	<b>22,56</b>
Perumahan	9,76	Perumahan	7,56
Listrik	2,96	Bensin	2,33
Bensin	2,95	Listrik	1,54
Pendidikan	2,37	Pendidikan	1,36
Perlengkapan mandi	1,49	Perlengkapan mandi	1,11
Angkutan	1,18	Kayu bakar	1,06
Lainnya	9,29	Lainnya	7,60

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016

2. Pada Maret 2016, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, tempe, gula pasir, dan roti. Terdapat komoditi lainnya yang memberi sumbangan agak berbeda terhadap GK antara perkotaan dan perdesaan, seperti daging ayam ras di perkotaan memberikan sumbangan sebesar 3,01 persen sementara di perdesaan hanya sebesar 1,68 persen. Demikian juga untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK hampir sama antara daerah perkotaan dan perdesaan, seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Sementara itu, juga terdapat komoditi bukan makanan lainnya yang memberi sumbangan berbeda pada GK di perkotaan dan perdesaan, yaitu angkutan yang hanya memberi sumbangan besar terhadap GK di perkotaan atau kayu bakar yang hanya memberi sumbangan besar terhadap GK di

perdesaan. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 16.2.

### C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode September 2015–Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2015 sebesar 1,84 dan mengalami peningkatan menjadi 1,94 pada Maret 2016. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,51 menjadi 0,52 pada periode yang sama (Tabel 16.3). Peningkatan ini lebih banyak dikarenakan oleh peningkatan di perdesaan, sementara di perkotaan baik  $P_1$  dan  $P_2$  tercatat menurun.

**Tabel 16.3**  
Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )  
di Indonesia Menurut Daerah, September 2015–Maret 2016

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (<math>P_1</math>)</b>			
September 2015	1,29	2,40	1,84
Maret 2016	1,19	2,74	1,94
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (<math>P_2</math>)</b>			
September 2015	0,35	0,67	0,51
Maret 2016	0,27	0,79	0,52

3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) untuk daerah perkotaan sebesar 1,19 sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,74. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) untuk perkotaan adalah 0,27 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,79.

**Tabel 16.4**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2016**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P <sub>0</sub>	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P <sub>0</sub>	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P <sub>0</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	427 970	159,50	10,82	403 985	688,94	19,15	410 956	848,44	16,73
Sumatera Utara	398 408	690,80	9,75	377 748	765,15	10,97	388 156	1 455,95	10,35
Sumatera Barat	441 523	118,96	5,54	413 790	252,59	8,16	425 141	371,55	7,09
Riau	426 346	162,45	6,40	425 777	352,95	9,00	426 001	515,40	7,98
Jambi	438 600	115,35	10,86	342 137	174,46	7,32	371 875	289,81	8,41
Sumatera Selatan	388 060	374,53	12,74	331 570	726,67	13,99	351 984	1 101,20	13,54
Bengkulu	430 572	97,34	16,19	409 863	231,27	17,85	416 427	328,61	17,32
Lampung	392 488	233,39	10,53	354 678	936,21	15,69	364 922	1 169,60	14,29
Bangka Belitung	521 773	19,63	2,78	546 998	53,13	7,72	534 229	72,76	5,22
Kepulauan Riau	494 418	87,78	5,16	466 989	32,63	10,43	490 157	120,41	5,98
DKI Jakarta	510 359	384,30	3,75	-	-	-	510 359	384,30	3,75
Jawa Barat	325 017	2 497,59	7,67	324 937	1 726,73	11,80	324 992	4 224,32	8,95
Jawa Tengah	315 269	1 824,08	11,44	319 188	2 682,81	14,89	317 348	4 506,89	13,27
DI Yogyakarta	364 786	297,71	11,79	331 308	197,23	16,63	354 084	494,94	13,34
Jawa Timur	319 662	1 518,79	7,94	323 779	3 184,51	16,01	321 761	4 703,30	12,05
Banten	377 052	377,10	4,51	347 765	281,01	7,45	367 949	658,11	5,42
Bali	348 571	96,98	3,68	322 660	81,20	5,23	338 967	178,18	4,25
Nusa Tenggara Barat	343 580	385,22	18,20	326 656	419,23	15,17	333 996	804,45	16,48
Nusa Tenggara Timur	386 139	112,02	10,58	306 721	1 037,90	25,17	322 947	1 149,92	22,19
Kalimantan Barat	353 143	78,29	5,16	345 480	303,06	9,11	347 880	381,35	7,87
Kalimantan Tengah	348 254	41,07	4,60	387 202	102,42	6,23	373 484	143,49	5,66
Kalimantan selatan	386 462	60,83	3,48	370 612	134,87	5,89	377 480	195,70	4,85
Kalimantan Timur	519 653	88,04	3,93	495 975	124,88	10,05	511 205	212,92	6,11
Kalimantan Utara	523 914	14,21	3,78	499 980	26,91	9,47	513 614	41,12	6,23
Sulawesi Utara	312 328	60,62	5,34	321 985	142,20	10,97	317 478	202,82	8,34
Sulawesi Tengah	391 070	75,45	10,18	370 392	345,07	15,91	375 659	420,52	14,45
Sulawesi Selatan	281 676	149,13	4,51	263 674	657,90	12,46	270 601	807,03	9,40
Sulawesi Tenggara	289 827	51,01	6,74	271 961	275,86	15,49	277 288	326,87	12,88
Gorontalo	284 308	24,08	5,84	284 190	179,11	24,41	284 232	203,19	17,72
Sulawesi Barat	273 224	22,85	8,59	290 340	129,88	12,56	286 840	152,73	11,74
Maluku	412 980	52,08	7,66	415 177	275,64	26,82	414 302	327,72	19,18
Maluku Utara	390 788	10,57	3,32	371 289	64,10	7,44	376 554	74,67	6,33
Papua Barat	487 727	20,96	6,14	466 996	204,85	37,48	474 967	225,81	25,43
Papua	466 985	37,08	4,42	412 991	874,25	37,14	427 176	911,33	28,54
<b>Indonesia</b>	<b>364 527</b>	<b>10 339,79</b>	<b>7,79</b>	<b>343 647</b>	<b>17 665,62</b>	<b>14,11</b>	<b>354 386</b>	<b>28 005,41</b>	<b>10,86</b>

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016

#### D. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Maret 2015–Maret 2016

1. Tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif.

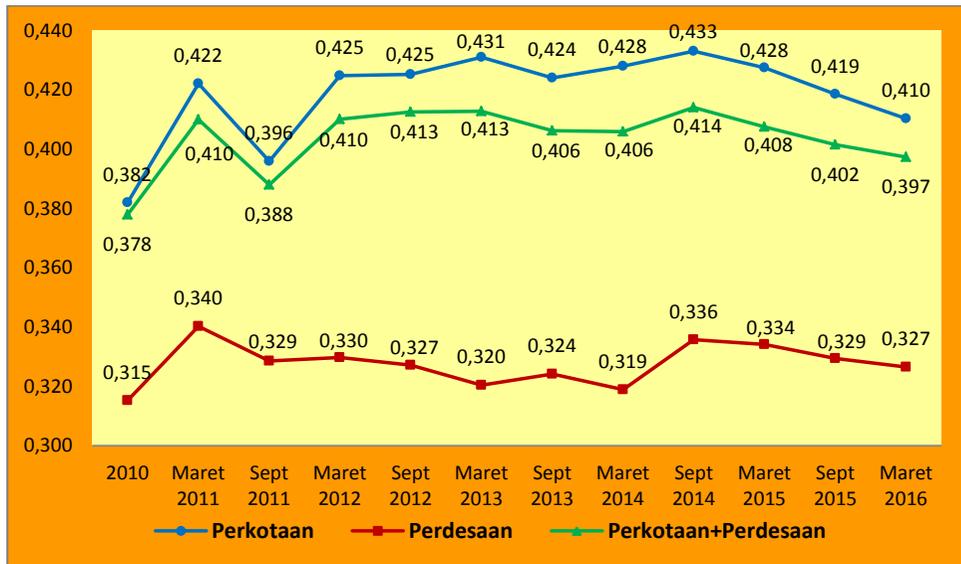
**Gini Rasio pada Maret 2016  
adalah sebesar 0,397**

- Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah *Gini Ratio* serta persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal juga dengan ukuran Bank Dunia.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.
  3. Pada Maret 2016 *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,397 menurun dibandingkan *Gini Ratio* pada Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan menurun pula jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada September 2015 yang sebesar 0,402. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Indonesia mengalami perbaikan selama periode Maret 2015–Maret 2016.
  4. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2016 adalah sebesar 0,410 mengalami penurunan sebesar 0,018 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2015 yang sebesar 0,428 dan menurun sebesar 0,009 poin dari *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,419. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* Maret 2016 adalah sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2015 yang sebesar 0,334 serta menurun 0,002 poin dibanding *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,329.

**Tabel 16.5**  
**Nilai *Gini Ratio* Menurut Daerah, 2010–Maret 2016**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	0,382	0,315	0,378
Maret 2011	0,422	0,340	0,410
Sept 2011	0,396	0,329	0,388
Maret 2012	0,425	0,330	0,410
Sept 2012	0,425	0,327	0,413
Maret 2013	0,431	0,320	0,413
Sept 2013	0,424	0,324	0,406
Maret 2014	0,428	0,319	0,406
Sept 2014	0,433	0,336	0,414
Maret 2015	0,428	0,334	0,408
Sept 2015	0,419	0,329	0,402
Maret 2016	0,410	0,327	0,397

**Grafik 16.2**  
**Perkembangan *Gini Ratio*, 2010–Maret 2016**

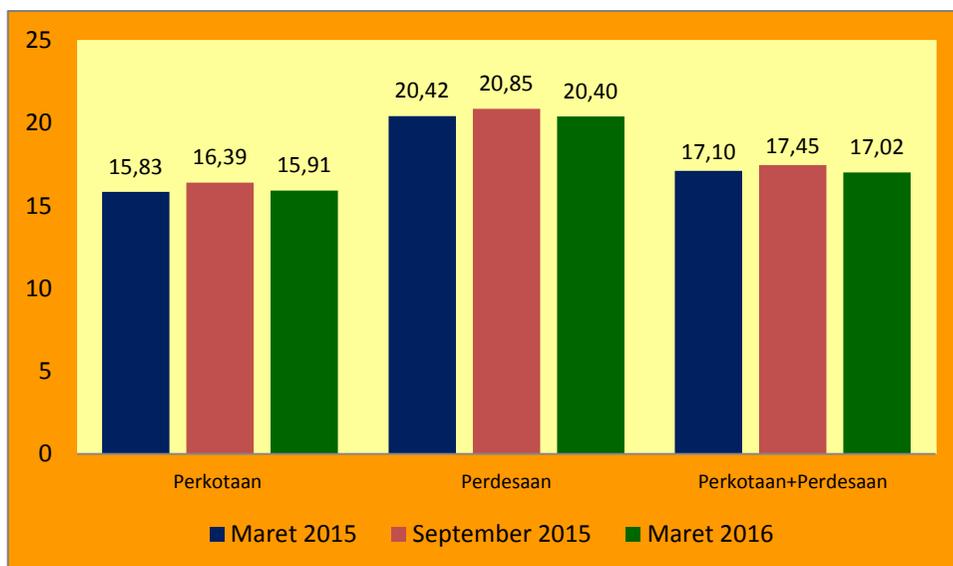


5. Pada Maret 2016, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,02 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2016 ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 17,10 persen dan menurun pula jika dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 17,45 persen.
6. Dibedakan menurut tempat tinggal ukuran Bank Dunia menunjukkan hal yang sama dengan ukuran *Ratio Gini*, yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan perdesaan. Pada Maret 2016 persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 15,91 persen yang berarti termasuk pada ketimpangan sedang sementara di perdesaan sebesar 20,40 persen yang berarti pada ketimpangan rendah. Baik di perkotaan maupun perdesaan nilai ketimpangan pada Maret 2016 mengalami perbaikan dibanding periode Maret 2015 dan September 2015.

**Tabel 16.6**  
**Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia, Maret 2015–Maret 2016 (Persentase)**

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>			
Maret 2015	15,83	34,60	49,57
September 2015	16,39	34,57	49,04
Maret 2016	15,91	36,74	47,35
<b>Perdesaan</b>			
Maret 2015	20,42	37,53	42,05
September 2015	20,85	37,14	42,01
Maret 2016	20,40	38,50	41,10
<b>Perkotaan+Pedesaan</b>			
Maret 2015	17,10	34,65	48,25
September 2015	17,45	34,70	47,84
Maret 2016	17,02	36,09	46,89

**Grafik 16.3**  
**Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah Maret 2015–Maret 2016**



- Berdasarkan provinsi, nilai *Gini Ratio* Maret 2016 tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,426 sementara yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,275. Terdapat tujuh provinsi yang nilai *Gini Ratio* diatas nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (0,426), Daerah

Istimewa Yogyakarta (0,420), Gorontalo (0,419), Jawa Barat (0,413), DKI Jakarta (0,411), Jawa Timur (0,402), Sulawesi Tenggara (0,402).

8. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap adanya perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia selama periode Maret 2015–Maret 2016 diantaranya adalah:
  - a. Kenaikan upah buruh tani harian dari Rp 46,180,- pada Maret 2015 menjadi Rp 47,559,- pada Maret 2016 atau naik sebesar 2,99 persen pada periode Maret 2015–Maret 2016.
  - b. Kenaikan upah buruh bangunan harian dari Rp 79,657,- pada Maret 2015 menjadi Rp 81,481,- pada Maret 2016 atau naik sebesar 2,29 persen pada periode Maret 2015–Maret 2016.
  - c. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas pertanian dari 5,1 juta orang (Februari 2015) menjadi 5,2 juta orang (Februari 2016). Sejalan dengan itu, terjadi pula peningkatan jumlah pekerja bebas non pertanian dari 6,8 juta orang (Februari 2015) menjadi 7,0 juta orang (Februari 2016).
  - d. Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk 40 persen terbawah meningkat dari Rp 371,336,- pada Maret 2015 menjadi Rp 416.489,- pada September 2015 dan meningkat kembali menjadi Rp 423.969,- pada Maret 2016.
  - e. Kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan), serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.
  - f. Penurunan angka Gini ini kemungkinan besar terkait dengan menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah bawah (di 40 persen menengah) dampak dari pembangunan infrastruktur, lebih kondusifnya pengembangan usaha (industri, perdagangan dan jasa) dan beragam skema perlindungan sosial yg dijalankan oleh pemerintah.

Tabel 16.7  
Gini Ratio menurut Provinsi, Maret 2015–Maret 2016

Provinsi	Maret 2015			September 2015			Maret 2016		
	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11 Aceh	0,367	0,292	0,334	0,368	0,293	0,339	0,343	0,288	0,333
12 Sumatera Utara	0,360	0,296	0,336	0,332	0,285	0,326	0,334	0,282	0,319
13 Sumatera Barat	0,358	0,304	0,342	0,325	0,280	0,319	0,353	0,288	0,331
14 Riau	0,392	0,328	0,364	0,385	0,330	0,366	0,369	0,309	0,347
15 Jambi	0,381	0,339	0,361	0,354	0,319	0,344	0,377	0,313	0,349
16 Sumatera Selatan	0,390	0,314	0,360	0,354	0,286	0,334	0,373	0,293	0,348
17 Bengkulu	0,405	0,345	0,376	0,398	0,338	0,371	0,385	0,302	0,357
18 Lampung	0,403	0,345	0,376	0,399	0,313	0,352	0,393	0,330	0,364
19 Bangka Belitung	0,291	0,263	0,283	0,284	0,259	0,275	0,289	0,240	0,275
21 Kepulauan Riau	0,361	0,293	0,364	0,333	0,283	0,339	0,351	0,284	0,354
31 DKI Jakarta	0,431	-	0,431	0,421	-	0,421	0,411	-	0,411
32 Jawa Barat	0,433	0,316	0,415	0,446	0,310	0,426	0,423	0,317	0,413
33 Jawa Tengah	0,420	0,326	0,382	0,402	0,344	0,382	0,381	0,323	0,366
34 DI Yogyakarta	0,443	0,334	0,433	0,428	0,332	0,420	0,423	0,334	0,420
35 Jawa Timur	0,442	0,344	0,415	0,428	0,327	0,403	0,423	0,333	0,402
36 Banten	0,411	0,269	0,401	0,390	0,261	0,386	0,402	0,264	0,394
51 Bali	0,382	0,332	0,377	0,406	0,350	0,399	0,369	0,329	0,366
52 Nusa Tenggara Barat	0,399	0,333	0,368	0,376	0,342	0,360	0,391	0,317	0,359
53 Nusa Tenggara Timur	0,332	0,288	0,339	0,301	0,303	0,348	0,330	0,281	0,336
61 Kalimantan Barat	0,354	0,301	0,334	0,361	0,286	0,330	0,373	0,296	0,341
62 Kalimantan Tengah	0,366	0,293	0,326	0,340	0,268	0,300	0,359	0,296	0,330
63 Kalimantan Selatan	0,377	0,299	0,353	0,374	0,282	0,334	0,346	0,297	0,332
64 Kalimantan Timur	0,313	0,293	0,316	0,319	0,273	0,315	0,314	0,288	0,315
65 Kalimantan Utara	0,298	0,270	0,294	0,322	0,282	0,314	0,304	0,268	0,300
71 Sulawesi Utara	0,386	0,324	0,368	0,356	0,345	0,366	0,386	0,355	0,386
72 Sulawesi Tengah	0,425	0,329	0,374	0,415	0,303	0,370	0,387	0,320	0,362
73 Sulawesi Selatan	0,421	0,380	0,424	0,386	0,346	0,404	0,422	0,367	0,426
74 Sulawesi Tenggara	0,414	0,369	0,399	0,411	0,355	0,381	0,407	0,367	0,402
75 Gorontalo	0,423	0,369	0,420	0,391	0,366	0,401	0,414	0,392	0,419
76 Sulawesi Barat	0,395	0,348	0,363	0,383	0,339	0,362	0,393	0,347	0,364
81 Maluku	0,312	0,323	0,340	0,328	0,307	0,338	0,327	0,313	0,348
82 Maluku Utara	0,282	0,263	0,280	0,315	0,256	0,286	0,295	0,249	0,286
91 Papua Barat	0,343	0,476	0,440	0,349	0,461	0,428	0,326	0,376	0,373
94 Papua	0,339	0,380	0,421	0,347	0,387	0,392	0,312	0,383	0,390
<b>Indonesia</b>	<b>0,428</b>	<b>0,334</b>	<b>0,408</b>	<b>0,419</b>	<b>0,329</b>	<b>0,402</b>	<b>0,410</b>	<b>0,327</b>	<b>0,397</b>

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2015, September 2015, dan Maret 2016

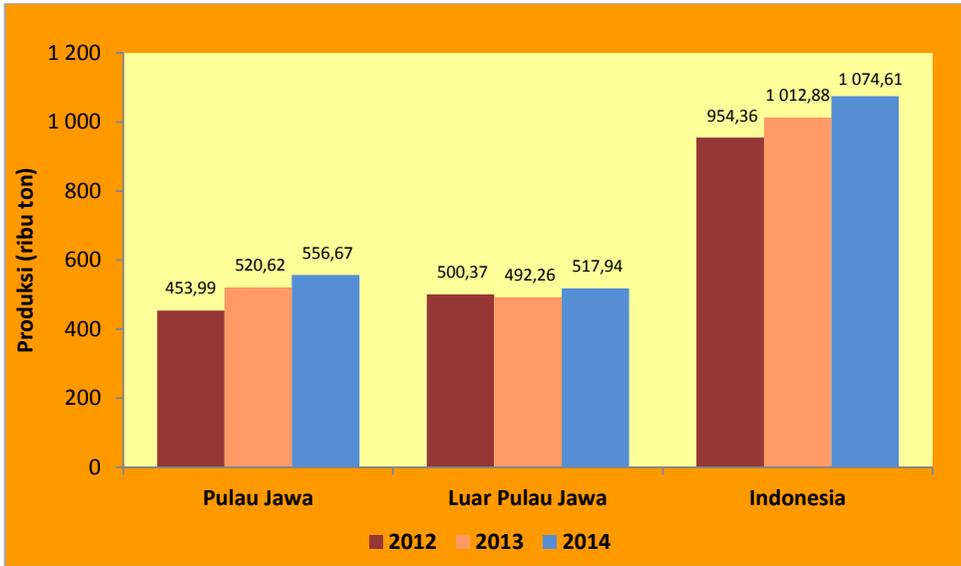
## XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014

### A. CABAI BESAR

1. Produksi cabai besar Indonesia tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi cabai besar tahun 2014 tersebut terjadi di Pulau Jawa sebesar 36,05 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 25,68 ribu ton.

**Produksi cabai besar tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton**

**Grafik 17.1**  
Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



2. Tahun 2014, persentase produksi cabai besar menurut wilayah di Pulau Jawa sebesar 51,80 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 48,20 persen. Dalam periode 2012–2014, produksi tertinggi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 556,67 ribu ton dan 517,94 ribu ton.
3. Pada periode tahun 2013–2014, peningkatan produksi cabai besar terjadi pada setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 17,97 ribu ton (6,77 persen), pada triwulan II sebesar 5,33 ribu ton (1,86 persen), triwulan III sebesar 23,11 ribu ton (9,02 persen), dan triwulan IV sebesar 15,33 ribu ton (7,51 persen).

**Tabel 17.1**  
**Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton)**  
**Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014**

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Wilayah</b>							
Pulau Jawa	453 990	520 616	556 671	66 626	14,68	36 055	6,93
Luar Pulau Jawa	500 373	492 263	517 940	-8 110	-1,62	25 677	5,22
<b>Indonesia</b>	<b>954 363</b>	<b>1 012 879</b>	<b>1 074 611</b>	<b>58 516</b>	<b>6,13</b>	<b>61 732</b>	<b>6,09</b>
<b>Triwulan</b>							
Triwulan I	264 887	265 446	283 411	559	0,21	17 965	6,77
Triwulan II	255 277	287 063	292 390	31 786	12,45	5 327	1,86
Triwulan III	235 559	256 319	279 433	20 760	8,81	23 114	9,02
Triwulan IV	198 640	204 051	219 377	5 411	2,72	15 326	7,51

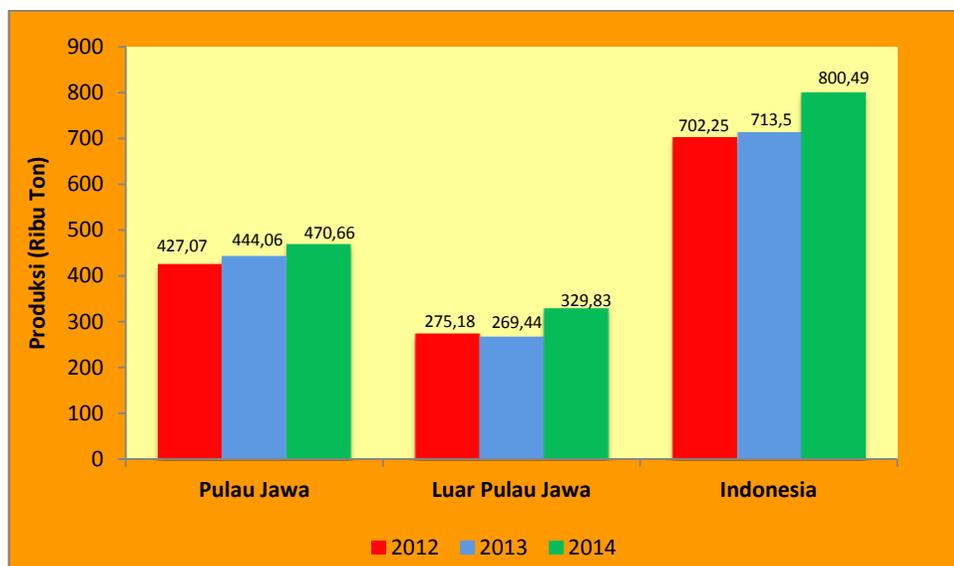
Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai  
 Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau *keriting*

## B. CABAI RAWIT

1. Produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 86,98 ribu ton (12,19 persen) dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 26,59 ribu ton (5,99 persen) dan di luar Pulau Jawa sebesar 60,39 ribu ton (22,41 persen).
2. Persentase produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 58,80 persen di Pulau Jawa dan 41,20 persen di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2012–2014, Pulau Jawa masih menjadi sentra produksi cabai rawit Indonesia. Produksi cabai rawit tertinggi terjadi pada tahun 2014 dibanding dua tahun sebelumnya, di Pulau Jawa sebesar 470,66 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 329,83 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 11,89 ribu ton (7,93 persen), triwulan II sebesar 36,28 ribu ton (18,77 persen), triwulan III sebesar 38,73 ribu ton (20,50 persen), dan triwulan IV sebesar 81 ton (0,04 persen).

**Produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton**

**Grafik 17.2**  
**Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014**



**Tabel 17.2**  
**Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton)**  
**Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014**

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Wilayah</b>							
Pulau Jawa	427 068	444 062	470 655	16 994	3,98	26 593	5,99
Luar Pulau Jawa	275 184	269 440	329 829	-5 744	-2,09	60 389	22,41
<b>Indonesia</b>	<b>702 252</b>	<b>713 502</b>	<b>800 484</b>	<b>11 250</b>	<b>1,60</b>	<b>86 982</b>	<b>12,19</b>
<b>Triwulan</b>							
Triwulan I	151 785	149 858	161 749	-1 927	-1,27	11 891	7,93
Triwulan II	215 936	193 289	229 573	-22 647	-10,49	36 284	18,77
Triwulan III	186 691	188 898	227 624	2 207	1,18	38 726	20,50
Triwulan IV	147 840	181 457	181 538	33 617	22,74	81	0,04

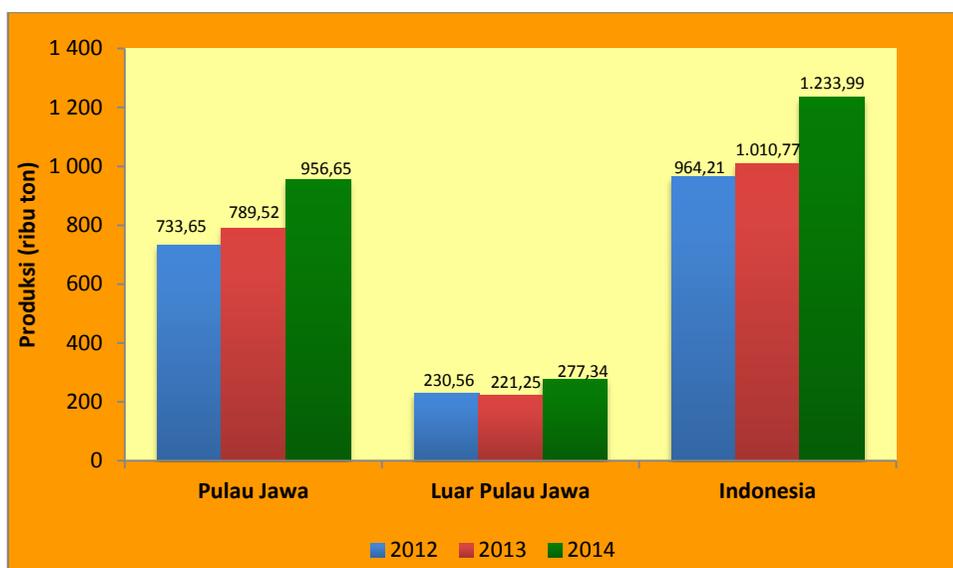
Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai  
 Cabai rawit terdiri dari cabai rawit merah dan cabai rawit hijau

### C. BAWANG MERAH

1. Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 223,22 ribu ton (22,08 persen) dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya produksi di Pulau Jawa sebesar 167,13 ribu ton atau sebesar 21,17 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 56,08 ribu ton atau sebesar 25,35 persen.
2. Persentase produksi bawang merah Indonesia tahun 2014 menurut wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebesar 77,53 persen dan 22,47 persen. Produksi tertinggi di Pulau Jawa dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 956,65 ribu ton. Produksi tertinggi di luar Pulau Jawa juga dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 277,34 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 30,82 ribu ton (12,69 persen), triwulan II sebesar 85,14 ribu ton (35,81 persen), triwulan III sebesar 38,02 ribu ton (12,70 persen), dan triwulan IV sebesar 69,23 ribu ton (30,00 persen).

**Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton**

**Grafik 17.3**  
**Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014**



**Tabel 17.3**  
**Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014**

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Wilayah</b>							
Pulau Jawa	733 657	789 520	956 653	55 863	7,61	167 133	21,17
Luar Pulau Jawa	230 564	221 253	277 336	- 9 311	-4,04	56 083	25,35
<b>Indonesia</b>	<b>964 221</b>	<b>1 010 773</b>	<b>1 233 989</b>	<b>46 552</b>	<b>4,83</b>	<b>223 216</b>	<b>22,08</b>
<b>Triwulan</b>							
Triwulan I	227 560	242 929	273 753	15 369	6,75	30 824	12,69
Triwulan II	231 068	237 753	322 892	6 685	2,89	85 139	35,81
Triwulan III	300 968	299 299	337 319	-1 669	-0,55	38 020	12,70
Triwulan IV	204 625	230 792	300 025	26 167	12,79	69 233	30,00

Keterangan: Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun

## XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014

### A. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI 2014

#### A.1 PADI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebesar Rp12,7 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi sawah yang terbesar adalah upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 48,23 persen dari total biaya atau sebesar Rp 6,1 juta (Tabel 18.1).

**Total biaya per musim  
tanam untuk satu hektar  
luas panen padi sawah  
sebesar Rp12,7 juta**

Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp17,2 juta.

**Tabel 18.1**  
**Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha**  
**Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014**

Uraian	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>17 174,66</b>	–	<b>10 249,76</b>	–
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>12 677,27</b>	<b>100,00</b>	<b>7 821,90</b>	<b>100,00</b>
1. Bibit/Benih	406,97	3,21	282,23	3,61
2. Pupuk	1 318,60	10,40	607,27	7,76
3. Pestisida	233,96	1,85	135,33	1,73
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	6 114,71	48,23	4 877,45	62,36
5. Sewa Lahan	3 785,42	29,86	1 387,50	17,74
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	328,92	2,59	175,30	2,24
7. Bahan Bakar	86,48	0,68	70,99	0,91
8. Lainnya	402,22	3,17	285,82	3,65

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp7,8 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi ladang yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 62,36 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,9 juta.

**Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp7,8 juta**

(Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp 10,2 juta.

## A.2 JAGUNG

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman jagung yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 44,93 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta.

**Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta**

(Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp12,0 juta.

**Tabel 18.2**  
**Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha**  
**Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014**

Uraian	Jagung		Kedelai	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>12 045,23</b>	<b>-</b>	<b>9 020,14</b>	<b>-</b>
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>9 140,12</b>	<b>100,00</b>	<b>9 136,50</b>	<b>100,00</b>
1. Bibit/Benih	728,59	7,97	628,06	6,87
2. Pupuk	1 096,30	11,99	433,62	4,75
3. Pestisida	110,88	1,21	200,87	2,20
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	4 106,99	44,93	4 095,18	44,82
5. Sewa Lahan	2 532,35	27,71	3 255,84	35,64
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	172,50	1,89	164,69	1,80
7. Bahan Bakar	79,83	0,87	72,62	0,79
8. Lainnya	312,68	3,42	285,62	3,13

### A.3 KEDELAI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman kedelai yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 44,82 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp9,0 juta.

**Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta**

## B. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, DAN JERUK 2014

### B.1 CABAI MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 47,74 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,1 juta.
2. Biaya produksi tanaman cabai merah yang ditanam pada Musim Kemarau (MK) lebih tinggi dibandingkan dengan pada Musim Hujan (MH).

**Tabel 18.3**  
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>83 935,48</b>	–	<b>63 692,23</b>	–
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>54 135,84</b>	<b>100,00</b>	<b>48 051,34</b>	<b>100,00</b>
1. Benih	2 048,61	3,78	2 030,19	4,23
2. Pupuk	9 274,20	17,14	8 264,54	17,19
3. Pestisida	2 928,23	5,41	2 949,24	6,14
4. Bahan bakar	705,01	1,30	206,31	0,43
5. Jaring pelindung	51,47	0,10	22,59	0,05
6. Mulsa	3 174,66	5,86	3 426,54	7,13
7. Upah pekerja	26 257,40	48,50	22 125,04	46,05
8. Sewa lahan	5 126,78	9,47	4 837,84	10,06
9. Pengeluaran lainnya	4 569,48	8,44	4 189,05	8,72

### B.2 CABAI RAWIT

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai rawit per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp34,0 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 54,85 persen terhadap total

pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp55,2 juta.

2. Biaya produksi tanaman cabai rawit yang ditanam pada MK sebesar Rp37,2 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan pada MH sebesar Rp28,3 juta.

**Tabel 18.4**  
**Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014**

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>63 352,41</b>	<b>–</b>	<b>40 660,34</b>	<b>–</b>
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>37 247,92</b>	<b>100,00</b>	<b>28 288,78</b>	<b>100,00</b>
1. Benih	1 744,94	4,68	1 522,83	5,38
2. Pupuk	4 887,27	13,11	4 288,91	15,16
3. Pestisida	958,42	2,57	660,67	2,34
4. Bahan bakar	298,10	0,80	106,89	0,38
5. Jaring pelindung	13,90	0,04	26,34	0,09
6. Mulsa	915,26	2,46	587,71	2,08
7. Upah pekerja	20 689,82	55,54	15 061,49	53,23
8. Sewa lahan	5 263,37	14,14	4 091,63	14,47
9. Pengeluaran lainnya	2 476,84	6,66	1 942,31	6,87

### B.3 BAWANG MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp67,2 juta. Biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,2 juta.
2. Pada tahun 2014, biaya produksi tanaman bawang merah yang ditanam pada MK (Rp64,6 juta) lebih rendah dibandingkan pada MH (Rp72,2 juta).

**Tabel 18.5**  
**Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014**

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>86 575,83</b>	<b>–</b>	<b>59 833,57</b>	<b>–</b>
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>64 565,21</b>	<b>100,00</b>	<b>72 189,79</b>	<b>100,00</b>
1. Benih	22 851,62	35,39	31 684,00	43,89
2. Pupuk	5 509,96	8,53	5 206,93	7,22
3. Pestisida	4 915,77	7,61	5 590,41	7,74
4. Bahan bakar	588,77	0,91	858,46	1,19
5. Jaring pelindung	27,93	0,04	23,01	0,03
6. Mulsa	571,09	0,89	599,50	0,83
7. Upah pekerja	20 185,58	31,27	20 697,02	28,68
8. Sewa lahan	6 830,34	10,58	5 180,37	7,18
9. Pengeluaran lainnya	3 084,15	4,78	2 350,09	3,24

**B.4 JERUK**

Total biaya produksi tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri mencapai Rp5,4 juta dan yang ditebaskan mencapai Rp5,7 juta. Persentase biaya produksi terbesar tanaman jeruk yang dipanen sendiri adalah upah pekerja sebesar 32,07 persen (Rp1,7 juta) dan yang ditebaskan adalah biaya untuk pupuk sebesar 28,41 persen (Rp1,6 juta). Nilai produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon yang dipanen sendiri dan ditebaskan masing-masing sebesar Rp10,1 juta dan Rp13,0 juta.

**Tabel 18.6**  
**Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014**

Uraian	Dipanen Sendiri		Ditebaskan	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>10 087,43</b>	–	<b>12 967,35</b>	–
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>5 441,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5 666,30</b>	<b>100,00</b>
1. Benih	195,35	3,59	119,65	2,11
2. Pupuk	1 078,92	19,82	1 609,97	28,41
3. Pestisida	402,93	7,41	558,95	9,86
4. Bahan bakar	52,91	0,97	117,02	2,07
5. Jaring pelindung	2,63	0,05	4,90	0,09
6. Mulsa	3,56	0,07	0,30	0,01
7. Upah pekerja	1 744,85	32,07	1 033,32	18,24
8. Sewa lahan	1 533,95	28,20	1 536,18	27,11
9. Pengeluaran lainnya	426,11	7,82	686,01	12,10

**C. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN KELAPA SAWIT, KARET, DAN TEBU TAHUN 2014**

1. Rata-rata biaya produksi usaha perkebunan tebu per hektar Setahun mencapai 77,98 persen (Rp24,2 juta) dari nilai produksi. Sementara untuk komoditas karet mencapai 71,54 persen (Rp9,2 juta) dan kelapa sawit sebesar 57,05 persen (Rp9,7 juta). Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu.

**Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu**

2. Pada usaha perkebunan kelapa sawit sebagian besar biaya digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Demikian pula untuk

usaha perkebunan karet, pengeluaran terbesar untuk tenaga kerja sebesar 57,09 persen.

3. Pada usaha perkebunan tebu pengeluaran terbesar adalah untuk sewa lahan sebesar 32,37 persen dari seluruh total biaya. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya untuk jasa pertanian relatif cukup besar yaitu mencapai 4,74 persen.

**Tabel 18.7**  
**Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014**

Subsektor	Komoditas					
	Kelapa Sawit		Karet		Tebu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. A. Nilai Produksi</b>	<b>17 026,01</b>	–	<b>12 877,97</b>	–	<b>31 044,66</b>	–
<b>B. B. Biaya Produksi</b>	<b>9 712,16</b>	<b>100,00</b>	<b>9 211,69</b>	<b>100,00</b>	<b>24 214,17</b>	<b>100,00</b>
1. Benih/Penyisipan/Tanaman Pelindung	106,95	1,10	83,68	0,91	3 055,32	12,62
2. Pupuk	1 791,14	18,44	300,64	3,27	2 913,26	12,04
3. Stimulan	4,97	0,05	5,56	0,06	20,03	0,08
4. Pestisida	225,95	2,33	104,99	1,14	83,70	0,34
5. Tenaga Kerja	3 079,94	31,71	5 259,37	57,09	6 346,06	26,21
6. Sewa Lahan	3 008,30	30,97	2 244,74	24,37	7 838,92	32,37
7. Sewa Alat dan Sarana	231,72	2,38	183,12	1,99	259,86	1,07
8. Jasa Pertanian	156,35	1,61	48,31	0,52	1 147,87	4,74
9. Pengeluaran Lainnya	1 106,84	11,41	981,28	10,65	2 549,15	10,53

**D. STRUKTUR ONGKOS USAHA SAPI POTONG, SAPI PERAH, AYAM RAS PETELUR, DAN AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2014**

**D.1 SAPI POTONG**

1. Total biaya produksi usaha sapi potong di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp3,6 juta. Sebagian besar biaya digunakan untuk pakan Rp2,1 juta per ekor per tahun (57,78 persen) dan biaya pekerja Rp1,2 juta per ekor per tahun (33,53 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp.71 ribu per ekor per tahun dan Rp123 ribu per ekor per tahun, sedangkan sisa biaya lainnya adalah untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

**Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen)**

2. Dengan nilai produksi sebesar Rp4,1 juta per ekor per tahun maka usaha peternakan sapi potong mendapat keuntungan Rp523 ribu per ekor per tahun. Pada umumnya sebagian kegiatan pengusahaan sapi potong dilakukan sendiri oleh peternak dan pakan ternak tidak membeli.

**Tabel 18.8**  
**Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah, 2014**

Uraian	Sapi Potong		Sapi Perah	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	4 115	–	7 753	–
B. Biaya Produksi	3 592	100,00	5 596	100,00
1. Upah Pekerja	1 204	33,53	1 373	24,53
2. Pakan	2 075	57,78	3 723	66,52
Hijauan Pakan Ternak	1 662	46,27	2 007	35,86
Pakan Buatan Pabrik	45	1,24	904	16,16
Pakan Lainnya	369	10,27	812	14,50
3. Bahan Bakar Minyak	69	1,91	126	2,25
4. Listrik	18	0,50	22	0,39
5. Air	32	0,88	28	0,51
6. Pemeliharaan Kesehatan	71	1,97	77	1,37
7. Pengeluaran Lain-lain	123	3,43	248	4,43

## D.2 SAPI PERAH

1. Total biaya produksi usaha sapi perah di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp5,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp3,7 juta per ekor per tahun (66,52 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp1,4 juta per ekor per tahun (24,53 persen). Biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp77 ribu per ekor per tahun (1,37 persen) dan Rp248 ribu per ekor per tahun (4,43 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

**Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen)**

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp7,8 juta per ekor per tahun, maka peternak sapi perah mendapat keuntungan Rp2,2 juta per ekor per tahun.

### D.3 AYAM RAS PETELUR

1. Total biaya produksi usaha ayam ras petelur untuk 1.000 ekor dalam setahun membutuhkan Rp123,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu Rp103,3 juta per 1.000 ekor per tahun (83,58 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp12,5 juta per 1.000 ekor per tahun (10,14 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp3,1 juta per 1.000 ekor per tahun (2,47 persen) dan Rp2,7 juta per 1.000 ekor per tahun (2,15 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.
2. Dengan nilai produksi mencapai Rp146 juta per 1.000 ekor per tahun, maka peternak ayam ras petelur mendapat keuntungan Rp22,3 juta per 1.000 ekor per tahun. Produktivitas ayam ras petelur mencapai 703 butir per 1.000 ekor per hari. Dalam setahun, rata-rata periode produksi telur selama 261 hari, sedangkan rata-rata rontok bulu selama 43 hari.

**Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen)**

### D.4 AYAM RAS PEDAGING

1. Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging untuk 5.000 ekor membutuhkan Rp113,2 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp73,2 juta per 5.000 ekor (64,69 persen) dan pembelian *Day Old Chick* (DOC) sebesar Rp21,9 juta per 5.000 ekor (19,36 persen). Selain itu, biaya untuk pekerja sebesar Rp10,8 juta per 5.000 ekor (9,57 persen), pemeliharaan kesehatan sebesar Rp2 juta per 5.000 ekor (1,81 persen), dan

**Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen)**

biaya lain-lain Rp3,7 juta per 5.000 ekor (3,30 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp158 juta per 5.000 ekor, peternak ayam ras pedaging mendapat keuntungan Rp44,8 juta per 5.000 ekor. Rumah tangga usaha ayam ras pedaging rata-rata memelihara 5,11 siklus setahun, dengan rata-rata lama siklus 40 hari, dan rata-rata bobot ayam per ekor 1,69 kg.

**Tabel 18.9**  
**Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014**

Uraian	Ayam Ras Petelur		Ayam Ras Pedaging	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 1.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 5.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>145 970</b>	-	<b>158 001</b>	-
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>123 640</b>	<b>100,00</b>	<b>113 239</b>	<b>100,00</b>
1 Upah Pekerja	12 534	10,14	10 838	9,57
2 Pakan	103 336	83,58	73 248	64,69
- Biji-bijian	18 484	14,95	620	0,55
- Pakan Buatan Pabrik	53 027	42,89	69 079	61,00
- Pakan Lainnya	31 825	25,74	3 549	3,14
3 Bahan Bakar Minyak (BBM)	885	0,72	593	0,52
4 Listrik	727	0,59	488	0,43
5 Air	438	0,35	366	0,32
6 Pemeliharaan Kesehatan	3 055	2,47	2 050	1,81
7 Pengeluaran Lain-lain	2 665	2,15	3 735	3,30
8 Pembelian <i>Day Old Chick</i> (DOC)	-	-	21 921	19,36

## E. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERIKANAN TAHUN 2014

### E.1 BUDIDAYA IKAN

1. Jumlah biaya per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen), Rp4,2 juta (71,91 persen), dan Rp3,2 juta (44,16 persen) terhadap nilai produksi. Keuntungan yang diperoleh sebesar masing-masing sebesar Rp7,8 juta (51,64 persen), Rp1,6 juta (28,09 persen), dan Rp4,1 juta (55,84 persen).
2. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit yang mencapai Rp3 juta (41,33 persen), diikuti upah pekerja sebesar Rp2,5 juta (33,60 persen). Biaya terbesar usaha bandeng adalah untuk upah pekerja yang mencapai Rp965 ribu (23,21 persen) diikuti sewa lahan sebesar Rp960 ribu (23,08 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha udang windu adalah upah pekerja yang mencapai Rp796 ribu (24,73 persen) diikuti oleh biaya sewa lahan sebesar Rp758 ribu (23,56 persen).

**Tabel 18.10**  
**Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus**  
**Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014**

Uraian	Rumput Laut		Bandeng		Udang Windu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. Nilai Produksi</b>	<b>15 182,9</b>	–	<b>5 784,24</b>	–	<b>7 290,35</b>	–
<b>B. Biaya Produksi</b>	<b>7 342,8</b>	<b>100,00</b>	<b>4 159,74</b>	<b>100,00</b>	<b>3 219,76</b>	<b>100,00</b>
- Benih/Bibit	3 034,7	41,30	480,28	11,54	553,68	17,20
- Pupuk dan Obat-obatan	2,9	0,04	482,71	11,61	286,01	8,89
- Pakan	0,1	0,00	716,37	17,22	331,86	10,31
- Upah Pekerja	2 467,4	33,60	965,31	23,21	795,98	24,73
- Sewa Lahan	361,5	4,92	960,23	23,08	758,43	23,56
- Alat/Sarana Usaha	304,4	4,15	83,85	2,02	78,95	2,45
- Lainnya	1 171,8	15,96	470,99	11,32	414,70	12,88

### E.2 PENANGKAPAN IKAN

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing

mencapai Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen) diikuti oleh biaya BBM masing-masing sebesar Rp876 ribu (21,21 persen) dan Rp96 ribu (21,93 persen).

**Tabel 18.11**  
**Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut**  
**Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014**

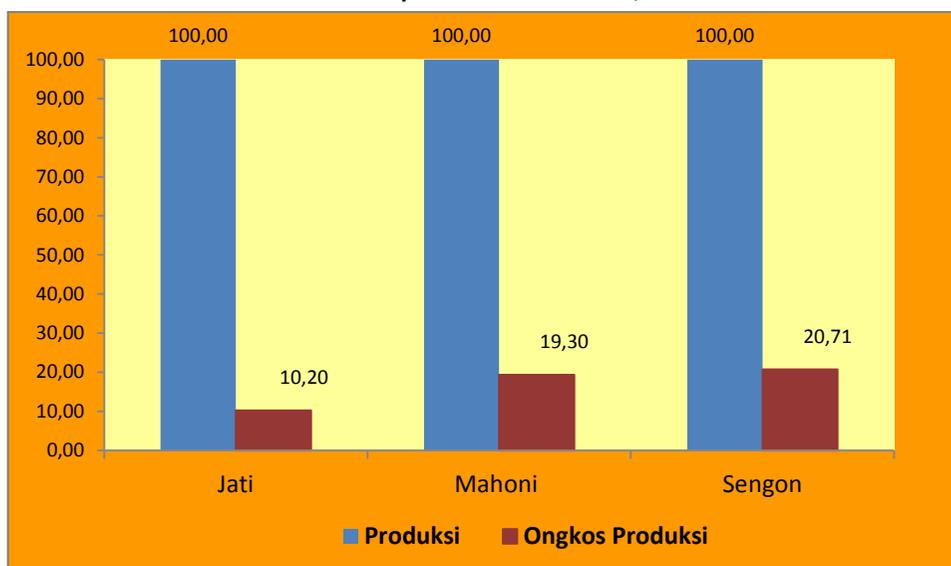
Uraian	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Produksi Hasil Penangkapan</b>	<b>6 211</b>	<b>–</b>	<b>813</b>	<b>–</b>
<b>B. Biaya Penangkapan</b>	<b>4 133</b>	<b>100,00</b>	<b>436</b>	<b>100,00</b>
-Upah/gaji pekerja	1 692	40,94	177	40,47
-BBM	876	21,21	96	21,93
-Oli/Pelumas	72	1,73	13	2,93
-Garam/Es	181	4,37	15	3,55
-Perbekalan	661	15,99	64	14,58
-Sewa sarana/alat	213	5,16	19	4,28
-Pemeliharaan sarana/alat	140	3,40	14	3,15
-Penyusutan barang modal	151	3,66	16	3,74
-Biaya lainnya	146	3,53	23	5,37

## F. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN JATI, MAHONI, DAN SENGON TAHUN 2014

1. Persentase ongkos produksi terhadap nilai produksi per 100 pohon untuk masing-masing tanaman jati, mahoni, dan sengon sebesar 10,20 persen, 19,30 persen, dan 20,71 persen (Gambar 18.1).
2. Pengeluaran terbesar untuk usaha tanaman kehutanan adalah untuk upah pekerja. Upah pekerja untuk usaha tanaman jati, mahoni dan sengon masing-masing sebesar 63,99 persen, 63,00 persen, dan 59,00 persen dari total pengeluaran/ongkos produksi (Tabel 18.12).

**Total pengeluaran/ ongkos produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, sengon lebih dari Rp 0,5 juta**

**Grafik 18.1**  
Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon  
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014



**Tabel 18.12**  
Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon  
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014

Uraian	Komoditas					
	Jati		Mahoni		Sengon	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. Produksi</b>	<b>8 791,18</b>	-	<b>6 069,90</b>	-	<b>3 963,07</b>	-
<b>B. Ongkos Produksi</b>	<b>896,42</b>	<b>100,00</b>	<b>1 171,57</b>	<b>100,00</b>	<b>820,60</b>	<b>100,00</b>
1. Pupuk	61,31	6,84	66,50	5,68	129,67	15,80
2. Pestisida	10,78	1,20	22,60	1,93	23,37	2,85
3. Upah Pekerja	573,63	63,99	738,13	63,00	484,17	59,00
a. Pemeliharaan/penyiangan	459,01	51,21	608,67	51,95	347,84	42,39
b. Pemupukan	35,55	3,97	50,53	4,31	76,41	9,31
c. Pengendalian OPT	7,22	0,81	21,40	1,83	15,30	1,86
d. Pemanenan/penebangan	71,84	8,01	57,53	4,91	44,61	5,44
4. Jasa Pertanian	55,58	6,20	83,09	7,09	35,33	4,31
5. Penyusutan Barang Modal	31,18	3,48	31,58	2,70	22,03	2,68
6. Sewa Alat Tanpa Operator	18,22	2,03	9,20	0,79	2,74	0,33
7. Sewa Lahan dan Bunga Modal	9,83	1,10	35,44	3,02	23,14	2,82
8. Pengeluaran Lainnya	135,90	15,16	185,04	15,79	100,15	12,20

### G. KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2014

1. Jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2014 sebanyak 8.643.228 rumah tangga; 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan. Dari yang menguasai lahan kawasan hutan tersebut, 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah.

**Persentase rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan sebesar 20,39 persen**

2. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengetahui keberadaan kawasan hutan sebesar 64,80 persen dan tidak mengetahui sebesar 35,20 persen. Terjadi penurunan dari tahun 2004, hal ini dapat disebabkan karena kawasan hutan tidak semuanya berupa hutan tegakan/tumbuhan yang ada kayunya namun ada yang berupa padang savana (padang rumput) (Grafik 18.2).

**Tabel 18.13**  
**Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014**

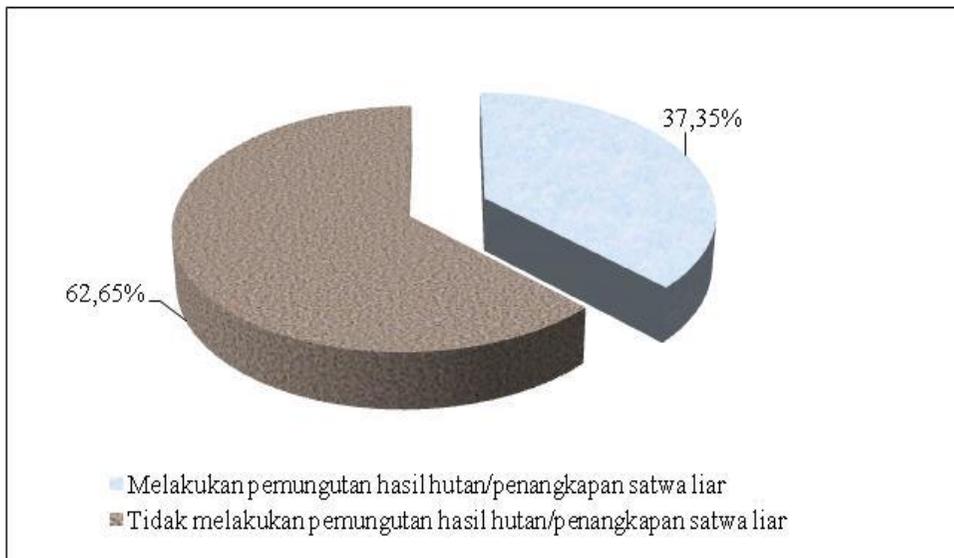
Uraian	Tahun	
	2004	2014
(1)	(2)	(3)
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan	7 804 970	8 643 228
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan berpindah	259 959	242 866
Persentase	3,33%	2,81%

**Grafik 18.2**  
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014



- Hutan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dari hasil Survei Kehutanan 2014 (SKH 2014) rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar sebanyak 37,35 persen.

**Grafik 18.3**  
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014

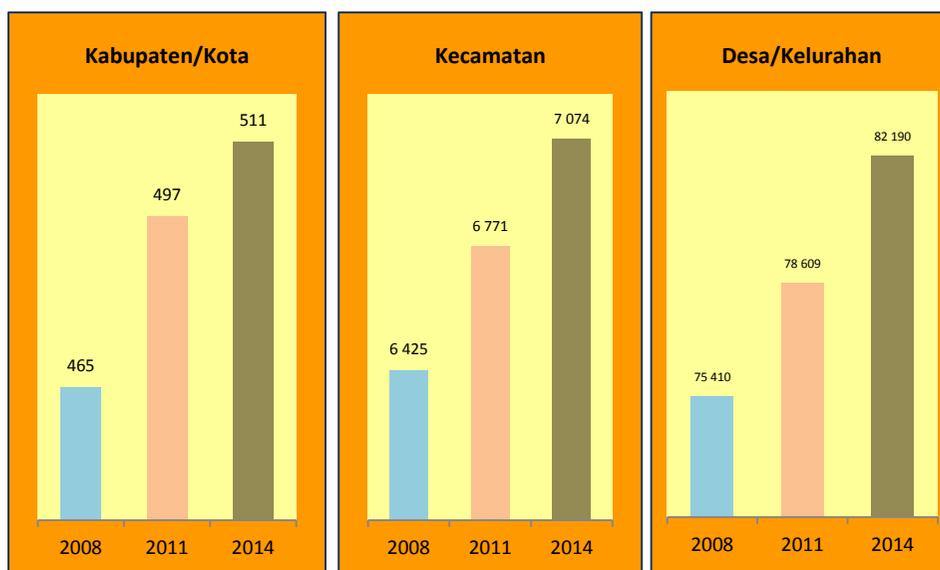


## XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014

### A. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan desa. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 82.190 wilayah setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa<sup>5</sup>, 8.412 kelurahan, dan 69 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2.

**Grafik 19.1**  
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014



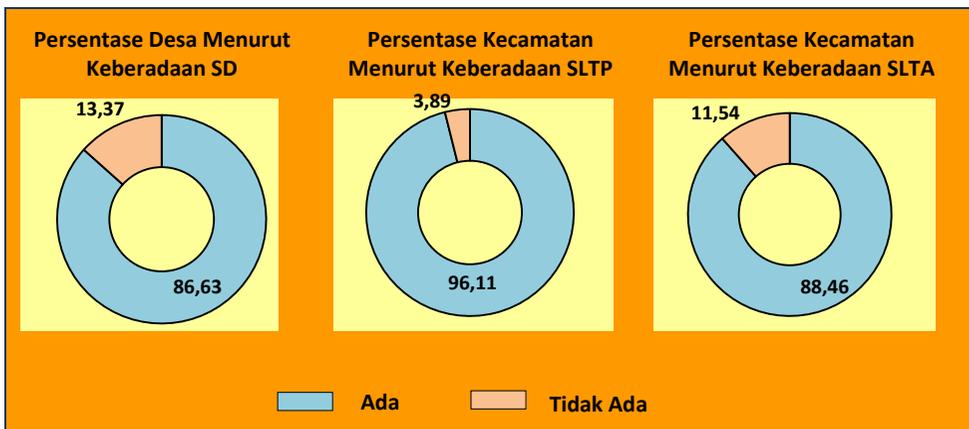
<sup>5</sup> Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

**B. Infrastruktur**

**B.1 Pendidikan**

1. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 86,63 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) yang tidak mempunyai SD. Untuk desa/kelurahan tanpa SD, 2.438 desa/kelurahan (22,19 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SD terdekat lebih dari 3 km.
2. Sarana pendidikan SLTP telah ada di 6.799 kecamatan (96,11 persen). Sehingga, masih terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) yang tidak ada SLTP. Untuk kecamatan tanpa SLTP, sebanyak 184 kecamatan (66,91 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTP terdekat lebih dari 6 km.
3. Sarana pendidikan SLTA telah ada di 88,46 persen kecamatan. Sehingga, masih terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) yang tidak ada SLTA. Untuk kecamatan tanpa SLTA, sebanyak 508 kecamatan (62,33 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km.

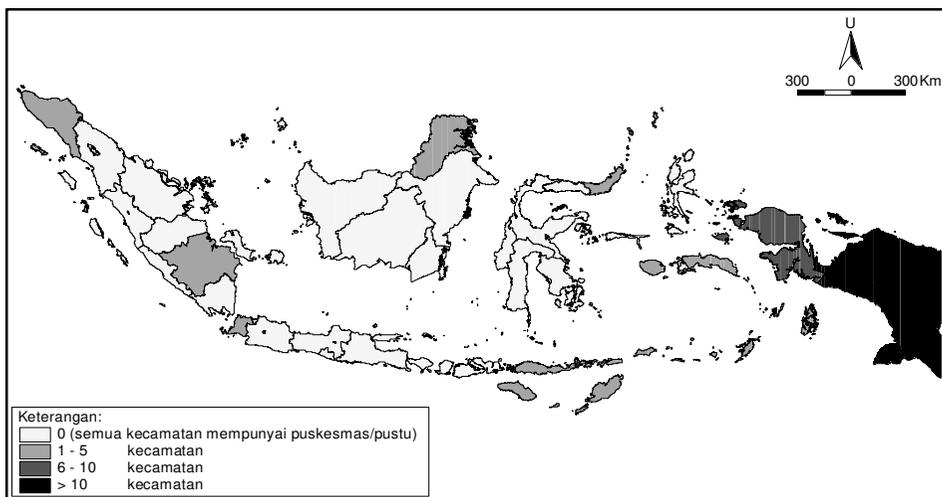
**Grafik 19.2**  
**Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014**



**B.2 Kesehatan**

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan publik pemerintah. Podes 2014 menunjukkan bahwa 6.957 kecamatan (98,35 persen) telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 117 kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas/Pustu tersebar di 9 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lihat Lampiran 5.

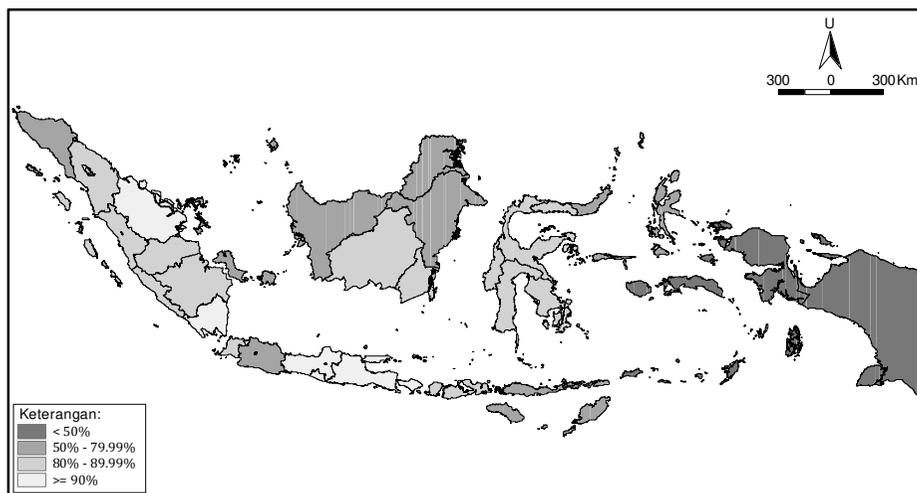
**Grafik 19.3**  
**Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014**



### B.3 Pasar dengan Bangunan

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian wilayah tersebut. Podes 2014 mencatat sebanyak 15.340 desa/kelurahan (18,66 persen) di 5.579 kecamatan, ternyata sudah ada pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). Masih terdapat 1.495 kecamatan (21,13 persen) yang tidak ada pasar dengan bangunan. Lihat Lampiran 7.

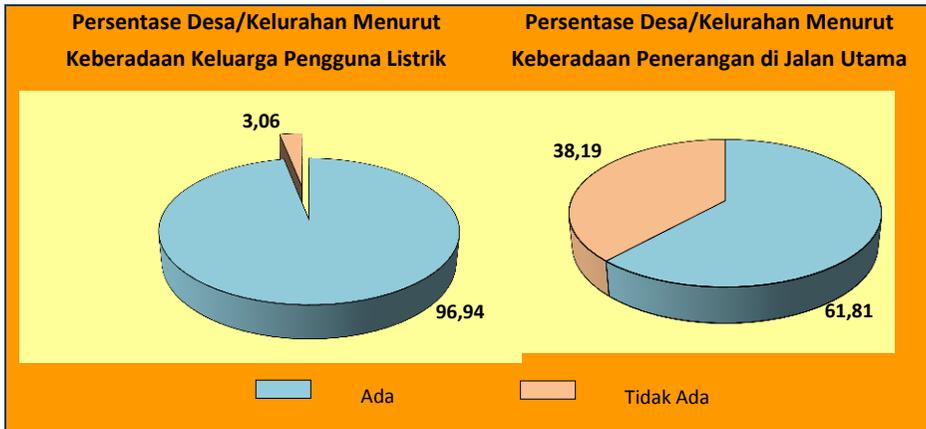
**Grafik 19.4**  
**Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014**



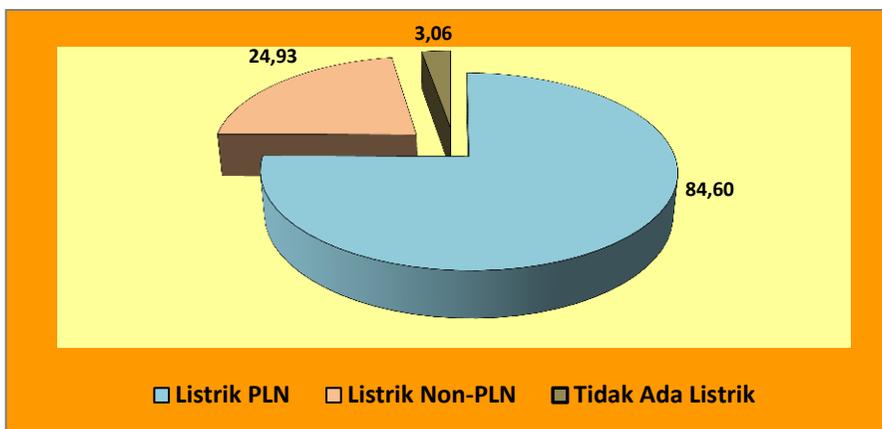
**B.4 Listrik**

1. Ketersediaan energi listrik sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 69.531 desa/kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna listrik PLN. Selain itu, ada 4 provinsi yang seluruh desa/kelurahannya yang sudah ada keluarga pengguna listrik PLN. Keempat provinsi tersebut, yaitu: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Lihat Lampiran 6.
2. Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) belum tersedia penerangan di jalan utama desa/kelurahan. Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak ada penerangan di jalan utama (diatas 90 persen).

**Grafik 19.5**  
**Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama**



**Grafik 19.6**  
**Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik**

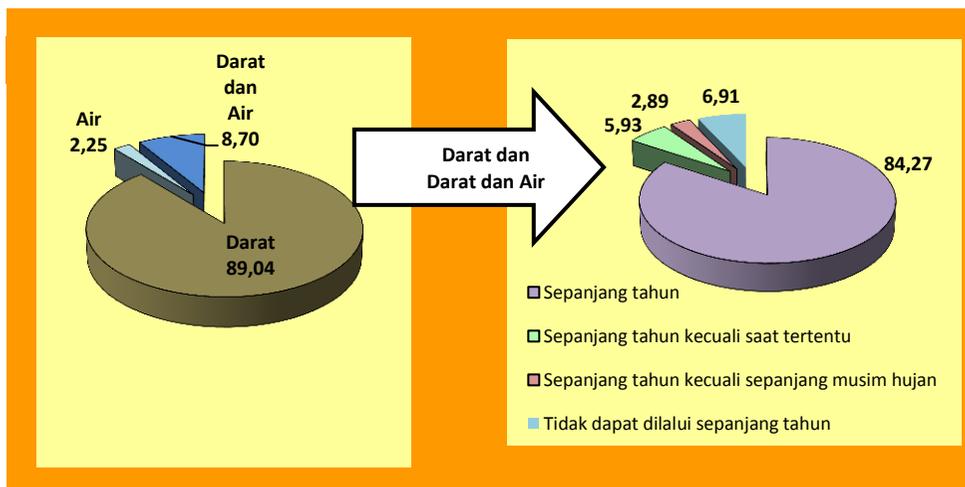


## B.5 Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 80.337 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat, dimana 67.701 desa/kelurahan (84,27 persen) diantaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebaliknya, masih ada 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) yang lalu-lintasnya bergantung pada kondisi jalan dan musim. Lihat Lampiran 8.

Grafik 19.7

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih



## C. Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain. Menurut Podes 2014, sebanyak 258 desa/kelurahan yang letaknya terdepan, berbatasan darat secara langsung dengan wilayah negara lain. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terdepan sebanyak 191.043 jiwa. Ke-256 desa/kelurahan tersebut berada di 67 kecamatan, 17 kabupaten, dan 5 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

**Tabel 19.1**  
**Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi 2014**

No	Provinsi	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan			
		Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Tenggara Timur	4	17	62	78 443
2	Kalimantan Barat	5	14	65	68 606
3	Kalimantan Timur	1	1	1	513
4	Kalimantan Utara	2	13	81	26 504
5	Papua	5	22	49	16 977
<b>Indonesia</b>		<b>17</b>	<b>67</b>	<b>258</b>	<b>191 043</b>

#### D. Desa/Kelurahan Terluar

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 mencantumkan sebanyak 92 pulau kecil terluar. Podes 2014 mencatat ada sebanyak 313 desa/kelurahan yang wilayahnya berada di dalam 77 pulau dari 92 pulau kecil terluar. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terluar sebanyak 375.883 jiwa. Sementara itu, ada 15 pulau kecil terluar yang bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan atau tanpa penduduk. Ke-15 pulau tersebut adalah Pulau Mega (Bengkulu); Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan (Jawa Timur); Pulau Manuk (Jawa Barat); Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur); Pulau Gosong Makasar (Kalimantan Utara); Pulau Sambit (Kalimantan Timur); Pulau Batarkusu dan Pulau Meatimjarang (Maluku); Pulau Jiew (Maluku Utara); Pulau Budd, Pulau Fani, dan Pulau Miossu (Papua Barat); dan Pulau Laag (Papua). Secara lengkap, berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi.

**Tabel 19.2**  
**Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014**

No	Provinsi	Jumlah Pulau Kecil Terluar		Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar			
		Menurut PP No 78 Tahun 2005	Ada Wilayah Desa/Kelurahan (Podes 2014)	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6	6	4	6	6	2 925
2	Sumatera Utara	3	3	3	3	8	4 077
3	Sumatera Barat	2	2	1	2	2	5 714
4	Riau	1	1	1	1	1	5 994
5	Bengkulu	2	1	1	1	6	3 001
6	Lampung	1	1	1	1	1	1 761
7	Kepulauan Riau	19	19	5	11	17	19 194
8	Jawa Barat	1	-	-	-	-	-
9	Jawa Tengah	1	1	1	2	2	21 831
10	Jawa Timur	3	-	-	-	-	-
11	Banten	1	1	1	1	1	6 194
12	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1	12 357
13	Nusa Tenggara Timur	5	4	4	14	123	150 027
14	Kalimantan Timur	2	1	1	1	4	3 677
15	Kalimantan Utara	2	1	1	5	19	37 734
16	Sulawesi Utara	11	11	5	7	18	8 484
17	Sulawesi Tengah	3	3	1	3	3	5 392
18	Maluku	18	16	3	15	72	71 134
19	Maluku Utara	1	-	-	-	-	-
20	Papua Barat	3	-	-	-	-	-
21	Papua	6	5	3	6	29	16 387
<b>Indonesia</b>		<b>92</b>	<b>77</b>	<b>37</b>	<b>80</b>	<b>313</b>	<b>375 883</b>

### E. Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG)

- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.
- Tabel 19.3. menyajikan IKG setiap provinsi. IKG terendah sebesar 6,83 di desa Sudagaran (Jawa Tengah) dan IKG tertinggi sebesar 97,89 di desa Dorera (Papua). Nilai tengah IKG desa secara nasional adalah sebesar 40,91.

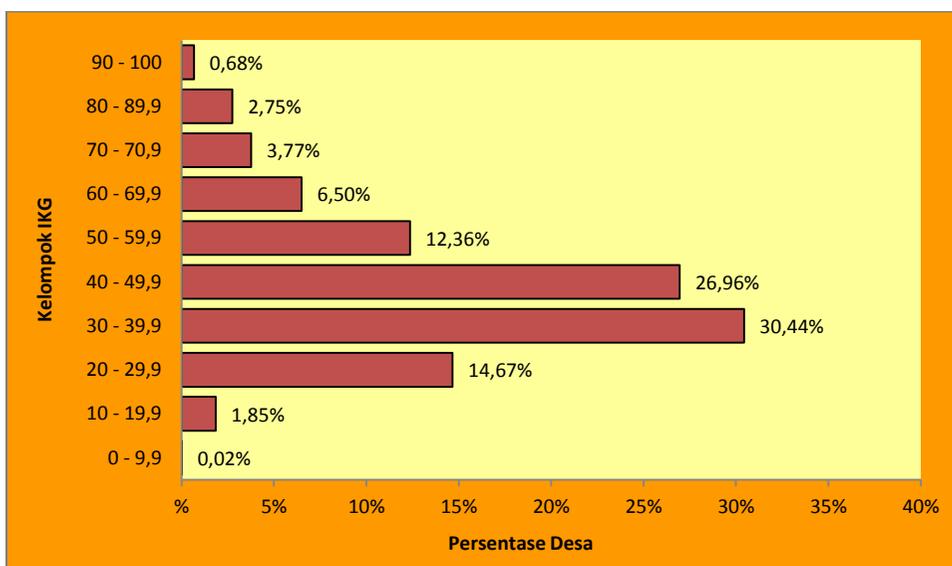
**Tabel 19.3**  
**IKG Desa Menurut Provinsi, 2014**

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,10	44,65	79,90
Sumatera Utara	10,17	42,31	86,58
Sumatera Barat	12,51	33,19	87,49
Riau	14,38	40,24	77,64
Jambi	14,83	39,96	77,84
Sumatera Selatan	12,05	42,38	78,24
Bengkulu	16,66	42,65	80,55
Lampung	11,71	40,51	77,95
Kep. Bangka Belitung	15,95	34,17	70,04
Kepulauan Riau	18,28	45,60	77,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,42	32,58	82,37
Jawa Tengah	6,83	34,27	64,10
DI Yogyakarta	9,96	27,73	48,17
Jawa Timur	9,03	35,23	67,36
Banten	13,99	39,79	70,72
Bali	8,79	30,20	58,60
Nusa Tenggara Barat	16,41	35,69	67,96
Nusa Tenggara Timur	20,21	49,87	80,77
Kalimantan Barat	10,47	51,10	84,83
Kalimantan Tengah	16,42	46,94	90,52

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Selatan	16,75	40,98	85,77
Kalimantan Timur	14,78	42,61	90,20
Kalimantan Utara	19,82	59,47	87,98
Sulawesi Utara	9,54	40,21	75,81
Sulawesi Tengah	16,93	42,70	84,79
Sulawesi Selatan	14,44	36,95	80,11
Sulawesi Tenggara	19,09	48,52	79,59
Gorontalo	12,57	39,05	67,98
Sulawesi Barat	17,74	46,18	84,58
Maluku	15,11	51,91	88,24
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20
Papua Barat	18,42	65,43	96,02
Papua	17,05	76,33	97,89

3. Jika dibedakan berdasarkan 10 kelompok, maka lebih dari 50 persen (57,40 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG antara 30 sampai dengan 50. Sementara itu, kurang dari 10 persen (7,20 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG di atas 70.

Grafik 19.8  
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014



**Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2014**

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23	289	6 512
Sumatera Utara	33	440	6 104
Sumatera Barat	19	179	1 145
Riau	12	164	1 835
Jambi	11	138	1 551
Sumatera Selatan	17	231	3 237
Bengkulu	10	127	1 532
Lampung	15	225	2 632
Kep Bangka Belitung	7	47	381
Kepulauan Riau	7	66	415
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	626	5 962
Jawa Tengah	35	573	8 578
DI Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	664	8 502
Banten	8	155	1 551
Bali	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	116	1 141
Nusa Tenggara Timur	22	306	3 270
Kalimantan Barat	14	176	2 109
Kalimantan Tengah	14	136	1 569
Kalimantan Selatan	13	152	2 008
Kalimantan Timur	10	103	1 026
Kalimantan Utara	5	50	479
Sulawesi Utara	15	167	1 836
Sulawesi Tengah	13	172	1 986
Sulawesi Selatan	24	306	3 030
Sulawesi Tenggara	14	209	2 272
Gorontalo	6	77	736
Sulawesi Barat	6	69	648
Maluku	11	113	1 088
Maluku Utara	10	115	1 196
Papua Barat	13	175	1 567
Papua	29	529	4 871
<b>Indonesia</b>	<b>511</b>	<b>7 074</b>	<b>82 190</b>

**Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Provinsi, 2014**

Provinsi	Desa	Kelurahan	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6 510	-	2	6 512
Sumatera Utara	5 406	695	3	6 104
Sumatera Barat	886	259	-	1 145
Riau	1 603	232	-	1 835
Jambi	1 389	162	-	1 551
Sumatera Selatan	2 851	385	1	3 237
Bengkulu	1 356	172	4	1 532
Lampung	2 423	206	3	2 632
Kep.Bangka Belitung	309	72	-	381
Kepulauan Riau	272	143	-	415
DKI Jakarta	-	267	-	267
Jawa Barat	5 321	641	-	5 962
Jawa Tengah	7 809	769	-	8 578
DI Yogyakarta	392	46	-	438
Jawa Timur	7 721	781	-	8 502
Banten	1 237	314	-	1 551
Bali	636	80	-	716
Nusa Tenggara Barat	995	142	4	1 141
Nusa Tenggara Timur	2 951	319	-	3 270
Kalimantan Barat	2 009	99	1	2 109
Kalimantan Tengah	1 427	138	4	1 569
Kalimantan Selatan	1 864	144	-	2 008
Kalimantan Timur	836	190	-	1 026
Kalimantan Utara	444	35	-	479
Sulawesi Utara	1 505	331	-	1 836
Sulawesi Tengah	1 809	174	3	1 986
Sulawesi Selatan	2 240	783	7	3 030
Sulawesi Tenggara	1 891	371	10	2 272
Gorontalo	657	72	7	736
Sulawesi Barat	575	71	2	648
Maluku	1 050	33	5	1 088
Maluku Utara	1 066	117	13	1 196
Papua Barat	1 492	75	-	1 567
Papua	4 777	94	-	4 871
<b>Indonesia</b>	<b>73 709</b>	<b>8 412</b>	<b>69</b>	<b>82 190</b>

**Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD dan Kecamatan yang Ada SLTP dan SLTA Menurut Provinsi, 2014**

Provinsi	Desa/Kelurahan yang Ada SD	Kecamatan yang Ada SLTP	Kecamatan yang Ada SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 358	289	281
Sumatera Utara	4 957	439	414
Sumatera Barat	1 100	179	170
Riau	1 779	164	164
Jambi	1 457	137	133
Sumatera Selatan	2 938	231	225
Bengkulu	1 180	126	108
Lampung	2 499	225	218
Kep.Bangka Belitung	375	47	45
Kepulauan Riau	390	66	61
DKI Jakarta	264	44	44
Jawa Barat	5 949	626	606
Jawa Tengah	8 461	573	552
DI Yogyakarta	438	78	76
Jawa Timur	8 450	664	648
Banten	1 543	155	154
Bali	709	57	56
Nusa Tenggara Barat	1 130	116	114
Nusa Tenggara Timur	3 129	306	257
Kalimantan Barat	2 028	176	164
Kalimantan Tengah	1 540	136	131
Kalimantan Selatan	1 869	152	141
Kalimantan Timur	970	103	103
Kalimantan Utara	299	50	43
Sulawesi Utara	1 537	167	147
Sulawesi Tengah	1 882	171	153
Sulawesi Selatan	2 929	306	282
Sulawesi Tenggara	1 837	208	199
Gorontalo	658	76	67
Sulawesi Barat	627	69	68
Maluku	1 017	113	108
Maluku Utara	1 092	115	114
Papua Barat	835	144	72
Papua	1 979	291	140
<b>Indonesia</b>	<b>71 205</b>	<b>6 799</b>	<b>6 258</b>

**Lampiran 4. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat dan Provinsi, 2014**

Provinsi	Jumlah Desa/ Kelurahan Tidak Ada SD	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Jarak ke SD > 3 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTP	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTP > 6 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTA	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTA > 6 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 154	162	-	-	8	-
Sumatera Utara	1 147	132	1	-	26	9
Sumatera Barat	45	-	-	-	9	5
Riau	56	4	-	-	-	-
Jambi	94	5	1	-	5	3
Sumatera Selatan	299	19	-	-	6	-
Bengkulu	352	18	1	-	19	3
Lampung	133	9	-	-	7	2
Kep.Bangka Belitung	6	1	-	-	2	2
Kepulauan Riau	25	2	-	-	5	2
DKI Jakarta	3	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13	3	-	-	20	2
Jawa Tengah	117	2	-	-	21	2
DI Yogyakarta	-	-	-	-	2	-
Jawa Timur	52	-	-	-	16	5
Banten	8	-	-	-	1	1
Bali	7	-	-	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	11	-	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	141	12	-	-	49	23
Kalimantan Barat	81	24	-	-	12	10
Kalimantan Tengah	29	13	-	-	5	4
Kalimantan Selatan	139	5	-	-	11	3
Kalimantan Timur	56	14	-	-	-	-
Kalimantan Utara	180	28	-	-	7	6
Sulawesi Utara	299	9	-	-	20	6
Sulawesi Tengah	104	11	1	-	19	9
Sulawesi Selatan	101	3	-	-	24	7
Sulawesi Tenggara	435	31	1	-	10	5
Gorontalo	78	3	1	-	10	3
Sulawesi Barat	21	2	-	-	1	1
Maluku	71	9	-	-	5	5
Maluku Utara	104	5	-	-	1	1
Papua Barat	732	233	31	20	103	81
Papua	2 892	1 679	238	164	389	306
<b>Indonesia</b>	<b>10 985</b>	<b>2 438</b>	<b>275</b>	<b>184</b>	<b>816</b>	<b>508</b>

**Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014**

Provinsi	Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	288	99,65
Sumatera Utara	440	100,00
Sumatera Barat	179	100,00
Riau	164	100,00
Jambi	138	100,00
Sumatera Selatan	230	99,57
Bengkulu	127	100,00
Lampung	225	100,00
Kep.Bangka Belitung	47	100,00
Kepulauan Riau	66	100,00
DKI Jakarta	44	100,00
Jawa Barat	626	100,00
Jawa Tengah	573	100,00
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	664	100,00
Banten	154	99,35
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	116	100,00
Nusa Tenggara Timur	303	99,02
Kalimantan Barat	176	100,00
Kalimantan Tengah	136	100,00
Kalimantan Selatan	152	100,00
Kalimantan Timur	103	100,00
Kalimantan Utara	49	98,00
Sulawesi Utara	163	97,60
Sulawesi Tengah	172	100,00
Sulawesi Selatan	306	100,00
Sulawesi Tenggara	209	100,00
Gorontalo	77	100,00
Sulawesi Barat	69	100,00
Maluku	112	99,12
Maluku Utara	115	100,00
Papua Barat	166	94,86
Papua	433	81,85
<b>Indonesia</b>	<b>6 957</b>	<b>98,35</b>

**Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Menurut Provinsi, 2014**

Provinsi	Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik		Ada Penerangan Di Jalan Utama
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6 427	296	3 663
Sumatera Utara	5 543	1 475	3 662
Sumatera Barat	1 099	350	862
Riau	1 301	1 194	1 036
Jambi	1 339	613	784
Sumatera Selatan	2 886	1 123	2 086
Bengkulu	1 470	244	693
Lampung	2 402	779	1 701
Kep. Bangka Belitung	377	153	307
Kepulauan Riau	294	293	257
DKI Jakarta	267	2	264
Jawa Barat	5 960	257	5 064
Jawa Tengah	8 566	115	8 330
DI Yogyakarta	438	9	428
Jawa Timur	8 457	291	8 055
Banten	1 551	34	950
Bali	716	20	700
Nusa Tenggara Barat	1 114	122	840
Nusa Tenggara Timur	2 624	1 694	298
Kalimantan Barat	1 380	1 239	521
Kalimantan Tengah	838	1 079	421
Kalimantan Selatan	1 903	401	1 634
Kalimantan Timur	647	662	462
Kalimantan Utara	180	380	133
Sulawesi Utara	1 789	258	1 132
Sulawesi Tengah	1 601	897	1 257
Sulawesi Selatan	2 777	734	2 165
Sulawesi Tenggara	1 786	896	785
Gorontalo	690	298	534
Sulawesi Barat	403	440	184
Maluku	654	540	366
Maluku Utara	785	598	453
Papua Barat	443	914	364
Papua	824	2 093	412
<b>Indonesia</b>	<b>69 531</b>	<b>20 493</b>	<b>50 803</b>

**Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014**

Provinsi	Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	227	78,55
Sumatera Utara	367	83,41
Sumatera Barat	161	89,94
Riau	157	95,73
Jambi	117	84,78
Sumatera Selatan	203	87,88
Bengkulu	109	85,83
Lampung	208	92,44
Kep. Bangka Belitung	37	78,72
Kepulauan Riau	37	56,06
DKI Jakarta	41	93,18
Jawa Barat	469	74,92
Jawa Tengah	560	97,73
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	639	96,23
Banten	124	80,00
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	93	80,17
Nusa Tenggara Timur	244	79,74
Kalimantan Barat	104	59,09
Kalimantan Tengah	109	80,15
Kalimantan Selatan	133	87,50
Kalimantan Timur	78	75,73
Kalimantan Utara	25	50,00
Sulawesi Utara	109	65,27
Sulawesi Tengah	151	87,79
Sulawesi Selatan	271	88,56
Sulawesi Tenggara	188	89,95
Gorontalo	68	88,31
Sulawesi Barat	61	88,41
Maluku	54	47,79
Maluku Utara	58	50,43
Papua Barat	58	33,14
Papua	184	34,78
<b>Indonesia</b>	<b>5 579</b>	<b>78,87</b>

**Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat atau Darat dan Air Menurut Kondisi Jalan dan Provinsi, 2014**

Provinsi	Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih				Total
	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5 742	445	241	71	6 499
Sumatera Utara	5 004	344	307	422	6 077
Sumatera Barat	1 068	34	15	22	1 139
Riau	1 279	170	107	237	1 793
Jambi	1 311	114	49	73	1 547
Sumatera Selatan	2 652	288	168	98	3 206
Bengkulu	1 381	85	56	5	1 527
Lampung	2 261	239	89	40	2 629
Kep. Bangka Belitung	370	2	4	2	378
Kepulauan Riau	295	12	5	29	341
DKI Jakarta	259	2	-	2	263
Jawa Barat	5 761	118	77	6	5 962
Jawa Tengah	8 448	78	46	4	8 576
DI Yogyakarta	436	2	-	-	438
Jawa Timur	8 356	87	45	13	8 501
Banten	1 472	42	28	4	1 546
Bali	709	3	4	-	716
Nusa Tenggara Barat	1 073	47	13	6	1 139
Nusa Tenggara Timur	2 608	383	189	63	3 243
Kalimantan Barat	1 123	448	161	270	2 002
Kalimantan Tengah	804	314	123	158	1 399
Kalimantan Selatan	1 698	118	22	146	1 984
Kalimantan Timur	741	158	44	44	987
Kalimantan Utara	238	98	32	49	417
Sulawesi Utara	1 717	37	5	51	1 810
Sulawesi Tengah	1 674	86	30	144	1 934
Sulawesi Selatan	2 686	143	79	75	2 983
Sulawesi Tenggara	1 937	150	67	83	2 237
Gorontalo	669	37	12	17	735
Sulawesi Barat	468	67	45	65	645
Maluku	556	97	39	256	948
Maluku Utara	736	108	46	154	1 044
Papua Barat	867	98	49	285	1 299
Papua	1 302	309	124	2658	4 393
<b>Indonesia</b>	<b>67 701</b>	<b>4 763</b>	<b>2 321</b>	<b>5 552</b>	<b>80 337</b>

## XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH AGUSTUS 2016

### A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Amerika pada awal Agustus 2016 cenderung terapresiasi dan berbalik terdepresiasi pada akhir Agustus 2016 dibanding minggu terakhir Juli 2016. Level terendah nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah pada minggu terakhir Juli 2016 tercatat di Provinsi Maluku sebesar Rp13.290,00 per dolar AS, sementara pada minggu terakhir Agustus 2016 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Rp13.300,00 per dolar AS. Sedangkan untuk level tertinggi, nilai tukar pada minggu terakhir Juli 2016 terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp12.992,00 per dolar AS dan pada minggu terakhir Agustus 2016 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai tengah Rp12.977,00 per dolar AS.
2. Pada minggu pertama Agustus 2016, jika dibanding minggu terakhir Juli 2016, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata nasional menguat 16,17 poin atau 0,12 persen. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 210,00 poin atau 1,58 persen.
3. Pada minggu terakhir Agustus 2016, rata-rata nasional nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah 131,41 poin atau 1,00 persen dibanding kurs pada minggu terakhir Juli 2016. Depresiasi rupiah terbesar terjadi di Provinsi Bengkulu, terdepresiasi sebesar 183,75 poin atau 1,41 persen.

**Rupiah terdepresiasi 131,41 poin atau 1,00 persen terhadap dolar Amerika pada Agustus 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Bengkulu.**

## B. Dolar Australia (AUD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Australia pada Agustus 2016 cenderung terdepresiasi dibanding minggu terakhir Juli 2016. Rata-rata nasional kurs eceran rupiah terdepresiasi sebesar 93,66 poin pada minggu pertama Agustus 2016 atau melemah sebesar 0,96 persen. Pelemahan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 200,00 poin atau terdepresiasi sebesar 2,04 persen dibanding minggu terakhir Juli 2016.
2. Pada minggu terakhir Agustus 2016 rata-rata nasional kurs eceran rupiah terhadap dolar Australia terdepresiasi sebesar 156,04 poin atau 1,59 persen dibanding minggu terakhir Juli 2016. Pelemahan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu terdepresiasi sebesar 346,00 poin atau melemah sebesar 3,78 persen dibanding minggu terakhir Juli 2016.
3. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Juli 2016 terjadi di Provinsi Maluku sebesar Rp9.910,00 per dolar Australia, sementara pada minggu terakhir Agustus 2016 terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp10.065,00 per dolar Australia. Di sisi lain, level tertinggi nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Juli 2016 tercatat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp9.152,000 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Agustus 2016 juga tercatat di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar Rp9.498,00 per dolar Australia.

**Rupiah terdepresiasi sebesar 156,04 poin atau 1,59 persen terhadap dolar Australia pada Agustus 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara.**

### C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Agustus 2016 secara rata-rata nasional melemah 3,73 poin atau 3,00 persen dibanding minggu terakhir Juli 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten, yaitu 6,00 poin atau 4,82 persen.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu terakhir Agustus 2016 secara rata-rata nasional tercatat melemah 4,24 poin atau 3,41 persen dibanding minggu terakhir Juli 2016. Depresiasi terbesar tercatat di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 5,87 poin atau melemah 4,73 persen.
3. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir Juli 2016 tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp127,61 per yen Jepang, sedangkan level tertingginya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp118,50 per yen Jepang. Sementara itu, pada minggu terakhir Agustus 2016, level terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp130,45 per yen Jepang, sedangkan level tertingginya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp121,50 per yen Jepang.

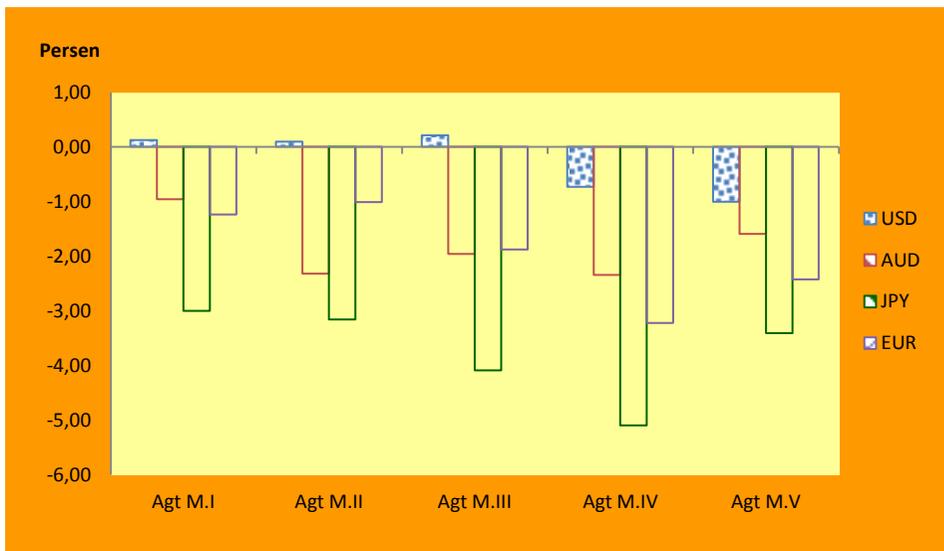
**Rupiah terdepresiasi 4,24 poin atau 3,41 persen terhadap yen Jepang pada Agustus 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.**

#### D. Euro (EUR)

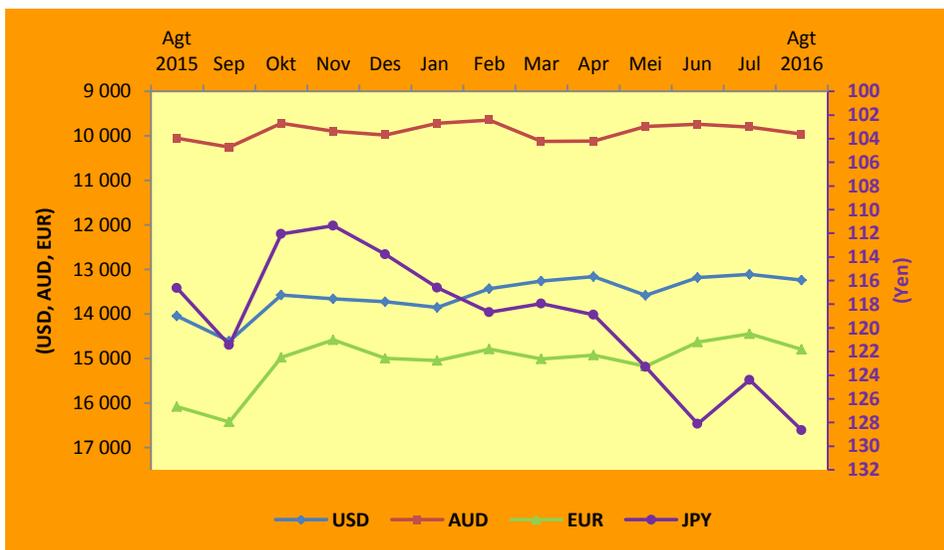
1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap euro pada Agustus 2016 cenderung mengalami pelemahan dibanding minggu terakhir Juli 2016. Secara rata-rata nasional, rupiah terdepresiasi sebesar 178,68 poin pada minggu pertama Agustus 2016 atau melemah sebesar 1,24 persen dan terdepresiasi kembali sebesar 349,88 poin pada minggu terakhir Agustus 2016 atau melemah sebesar 2,42 persen dibanding minggu terakhir Juli 2016.
2. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Maluku sebesar Rp14.945,00 per euro pada minggu terakhir Juli 2016 dan di Provinsi Banten sebesar Rp15.175,67 per euro pada minggu terakhir Agustus 2016. Sementara itu, level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah), pada minggu terakhir Juli 2016 terjadi di Sumatera Barat, yaitu Rp14.250,00 per euro dan pada minggu terakhir Agustus 2016 terjadi di Provinsi Aceh, yaitu Rp14.370,00 per euro.
3. Pada minggu pertama Agustus 2016, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terbesar di Provinsi Maluku yang mencapai 473,50 poin atau 3,17 persen. Pada minggu terakhir Agustus 2016, depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten yang mencapai 693,34 poin atau 4,79 persen.

**Rupiah terdepresiasi 349,88 poin atau 2,42 persen terhadap euro pada Agustus 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten.**

**Grafik 20.1**  
**Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR**  
**(Agustus 2016 dibanding Juli 2016 M.IV)**



**Grafik 20.2**  
**Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR**  
**(Minggu Terakhir)**



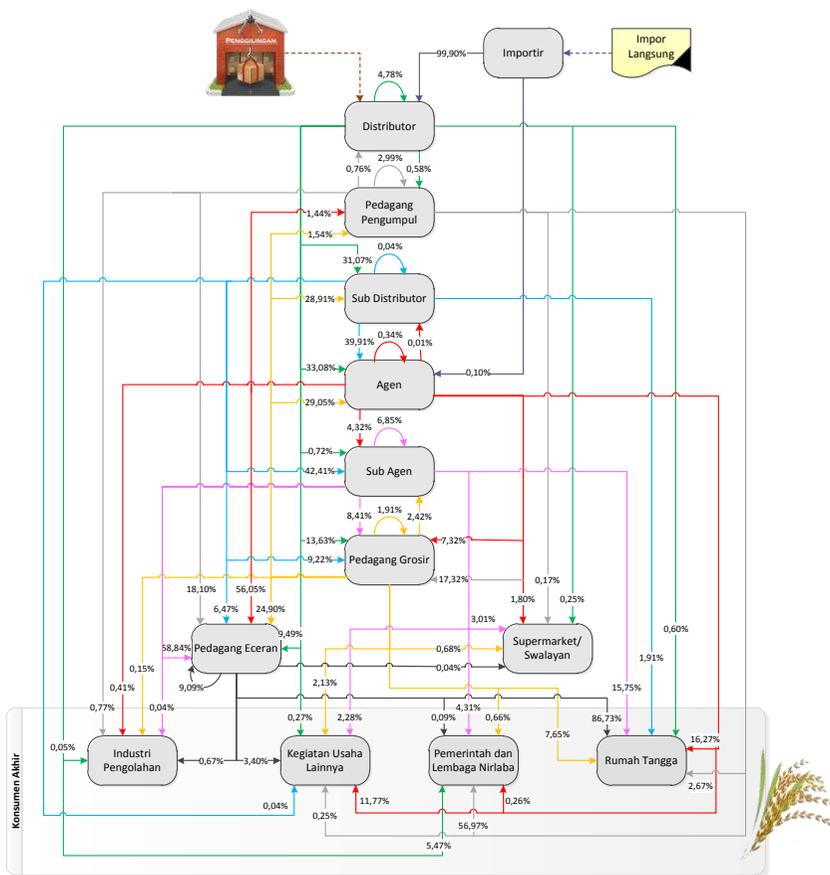
## XXI. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2015

### A. Pola Distribusi Perdagangan

1. Distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga sembilan fungsi kelembagaan usaha perdagangan.

**Distribusi perdagangan komoditi dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan antara 2 s.d. 9 fungsi kelembagaan usaha perdagangan**

**Grafik 21.1**  
Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2015



2. Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Sementara itu, alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara, dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

## B. Peta Distribusi Perdagangan

1. Persentase komoditi yang masuk terhadap ketersediaan beras dan cabai merah Kalimantan Utara adalah yang terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 99,81 persen untuk masing-masing komoditas. Sedangkan untuk bawang merah adalah Maluku, yaitu mencapai 99,83 persen, jagung pipilan adalah DKI Jakarta yaitu mencapai 99,12 persen, dan daging ayam ras adalah Papua, yaitu mencapai 95,57 persen.
 

**Jaringan terluas pendistribusian beras, cabai merah, dan daging ayam ras dilakukan oleh Jawa Tengah. Sedangkan untuk bawang merah adalah Jawa Barat dan jagung pipilan adalah Gorontalo**
2. Persentase komoditi yang keluar terhadap ketersediaan beras Sumatera Barat adalah yang terbesar di Indonesia dengan persentase sebesar 15,49%. Sedangkan untuk komoditas cabai merah adalah di DI Yogyakarta (76,24%), bawang merah adalah di Nusa Tenggara Barat (56,53%), jagung pipilan adalah di Gorontalo (93,82%), dan daging ayam ras adalah di Kalimantan Utara (16,05%).
3. Jaringan terluas pendistribusian beras, cabai merah, dan daging ayam ras dilakukan oleh Jawa Tengah. Sedangkan untuk bawang merah adalah Jawa Barat dan jagung pipilan adalah Gorontalo.

## C. Margin Perdagangan dan Pengangkutan

1. Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2015 sebesar 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen dan daging ayam ras 11,63 persen.
 

**Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2015 sebesar 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen.**

**Tabel 21.1**  
**Rata-rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**  
**Menurut Komoditi, 2015**

<b>No</b>	<b>Komoditi</b>	<b>MPP (persen)</b>
(1)	(2)	(3)
1	Beras	<b>10,42</b>
2	Cabai Merah	<b>25,33</b>
3	Bawang Merah	<b>22,61</b>
4	Jagung Pipilan	<b>31,90</b>
5	Daging Ayam Ras	<b>11,63</b>

## XXII. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2015

### A. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Nasional 2015

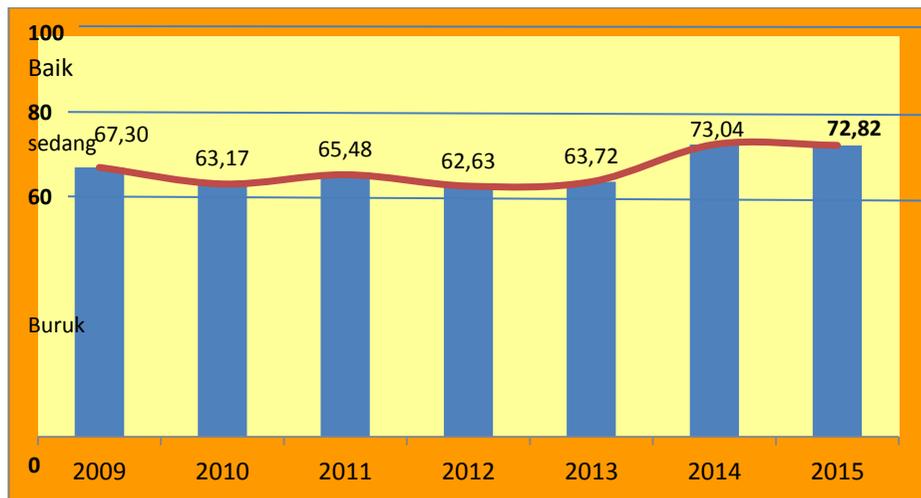
1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional 2015 mencapai 72,82 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini relatif tetap dibandingkan dengan IDI 2014 yang capaiannya sebesar 73,04. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih dalam kategori “sedang”.

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 mencapai angka 72,82 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini relatif tetap dibandingkan dengan angka IDI 2014 yang sebesar 73,04**

Capaian IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 IDI sebesar 67,30. Kemudian turun pada 2010 menjadi sebesar 63,17, lalu naik pada 2011 menjadi 65,48, kemudian turun pada 2012 menjadi 62,63, 2013 sebesar 63,72, 2014 naik sebesar 73,04, dan 2015 sebesar 72,82.

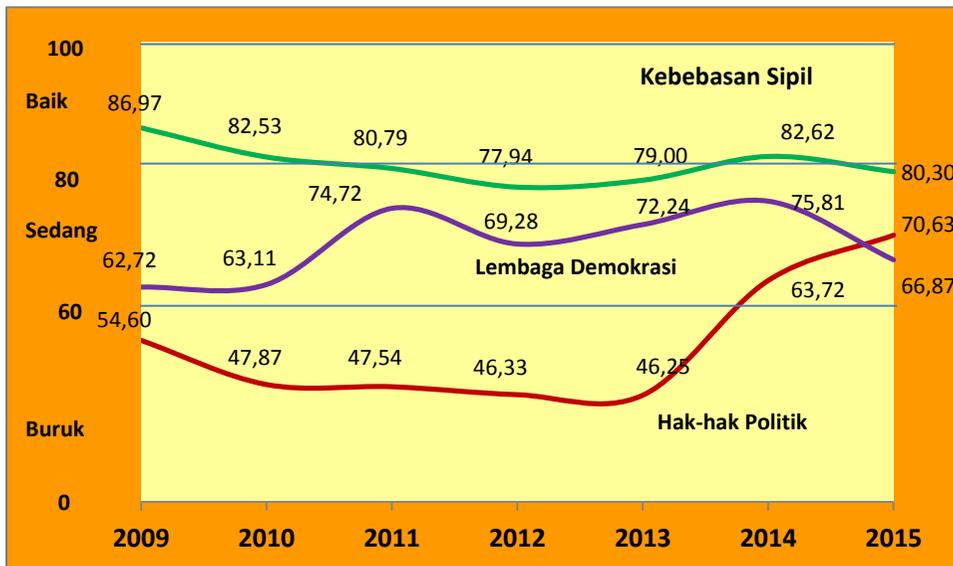
Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dari 2009 - 2015 dapat dilihat pada Grafik 17.1.

**Grafik 22.1**  
Perkembangan IDI Nasional, 2009–2015



2. Kenaikan Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 80,30; aspek Hak-hak Politik sebesar 70,63; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 66,87.

Grafik 22.2  
Perkembangan Indeks Aspek, 2009–2015



Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012 dan 2013 aspek ini menjadi kategori sedang. Dua tahun terakhir pengukuran aspek Kebebasan Sipil meningkat mencapai kategori “baik”.

Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada IDI 2015 aspek Hak-hak Politik tetap pada kategori “sedang”.

Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”.

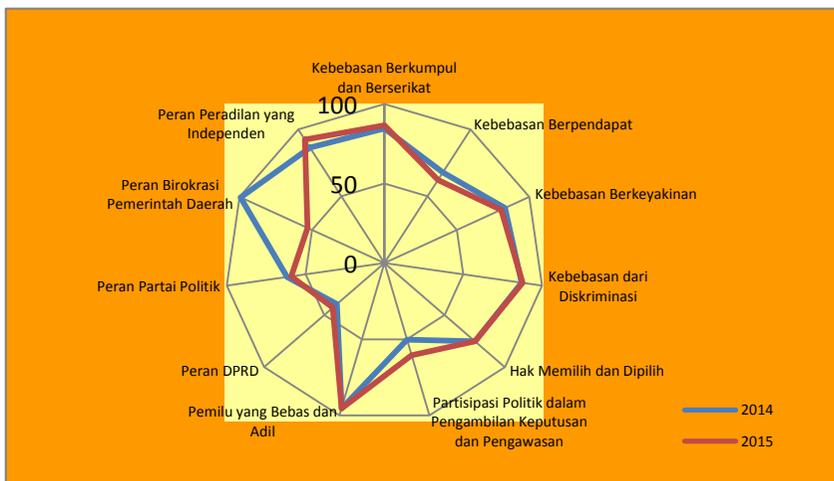
3. Menurut nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan indeks dan lima variabel mengalami penurunan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, dua diantaranya meningkat cukup bermakna.

**Terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan pada IDI 2015**

Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Pada Grafik 17.3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan meningkat paling besar, dari kategori buruk tembus menjadi sedang, dari 50,28 pada 2014 menjadi 60,59 pada 2015.

Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran Peradilan yang Independen yang meningkat sebesar 5,99 dari 86,29 pada 2014 menjadi 92,28 pada 2015. Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Pada Grafik 17.3 dapat diketahui variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam sebesar 46,27 dari 99,38 pada 2014 menjadi 53,11 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah.

**Grafik 22.3**  
Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2014–2015



4. Indikator pada IDI 2015 terdapat 15 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 27, dan 28.

**Pada IDI 2015 terdapat 15 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 27, dan 28.**

Namun, pada tahun 2015 masih terlihat masalah kronis yakni terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah (4) Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat (15) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (20) Alokasi Anggaran Pendidikan/kesehatan, (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, (23) Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu, dan (26) Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik karena trendnya selalu buruk. Khususnya pada Indikator 4 yang pada IDI 2015 jatuh ke kategori buruk ditengarai karena ketegangan saat PILKADA serentak.

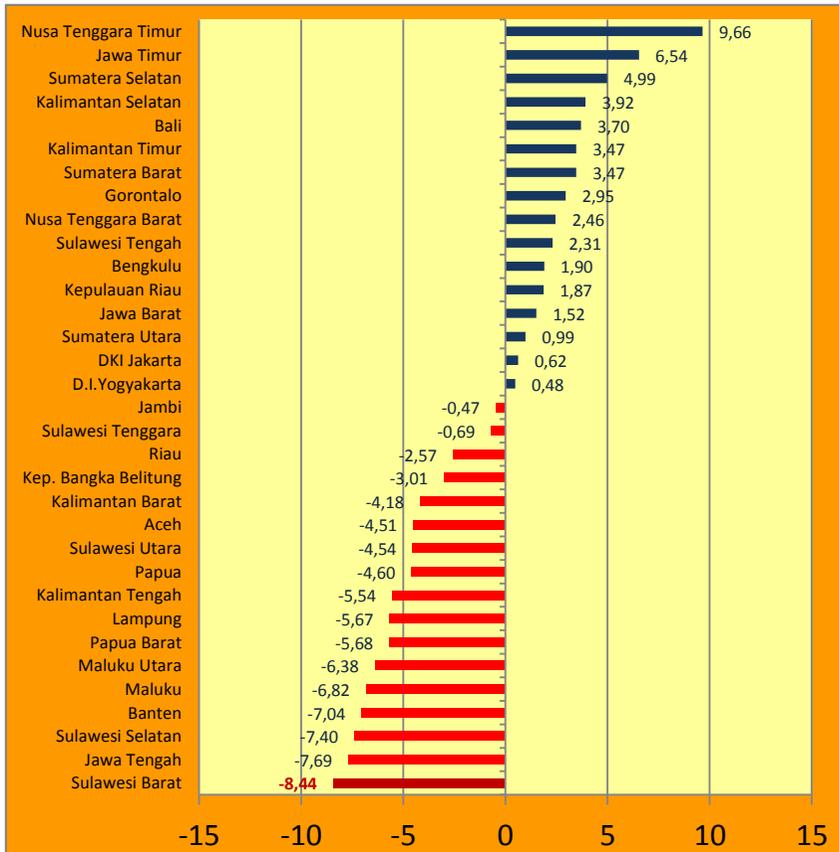
Menarik perhatian mengapa aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan yang cukup bermakna dari 75,81 pada 2014 menjadi 66,87 pada tahun 2015 atau menurun 8,94. Dari perubahan indikatornya dapat diketahui penurunan tersebut utamanya dipicu oleh indikator ke 26 yang menurun hingga 54,00. Indikator 25 dan 26 sesungguhnya merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Indikator 25 adalah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN. Indikator 26 adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.).

**B. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 2015**

Terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi dari kategori “baik” yakni DKI Jakarta naik dari 84,70 pada 2014 menjadi 85,32 pada 2015. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta naik dari 82,71 pada 2014 menjadi 83,19 pada 2015, Kalimantan Timur naik dari 74,82 pada 2014 menjadi 81,24 pada 2015 dan Kalimantan Utara yang sebesar 80,16 pada 2015 (lihat Tabel 2).

Sebanyak 28 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”, dan pada 2015 ada dua provinsi yakni Papua Barat dan Papua yang masuk dalam kategori “buruk”. Hal ini memberikan indikasi kinerja demokrasi yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski pada IDI 2014 tidak ada provinsi berada pada kategori “buruk”.

**Grafik 22.4**  
Perkembangan IDI Provinsi, 2014–2015



**Tabel 22.1**  
**Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi , 2014–2015**

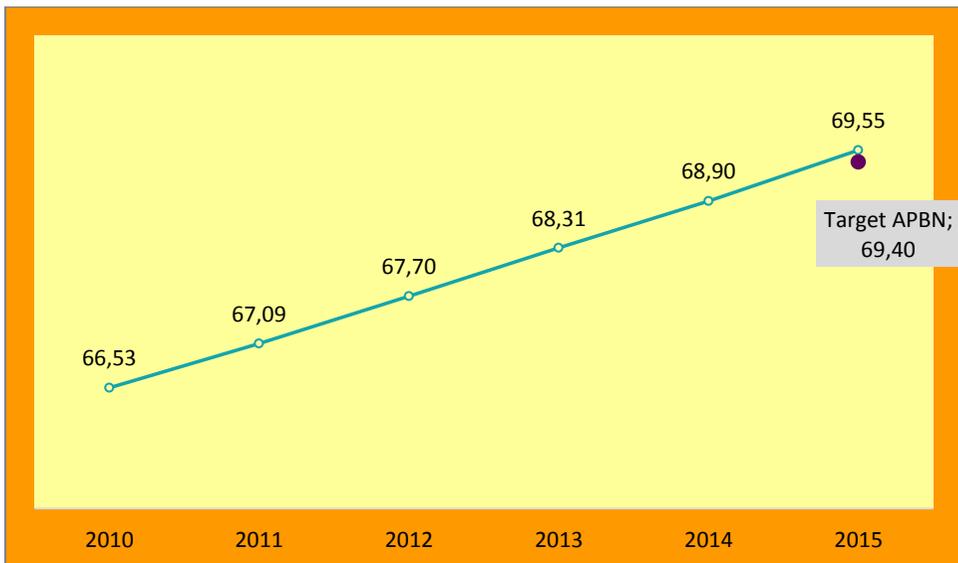
Provinsi	IDI 2014				IDI 2015			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	72,29	69,76	63,94	88,73	67,78	74,81	63,98	64,97
Sumatera Utara	68,02	79,86	61,97	62,75	69,01	82,02	62,17	63,52
Sumatera Barat	63,99	47,21	61,82	88,56	67,46	52,99	69,77	82,01
Riau	68,40	74,35	59,74	74,69	65,83	66,46	66,61	63,80
Jambi	71,15	78,23	54,01	89,48	70,68	75,89	62,12	77,72
Sumatera Selatan	74,82	86,09	63,57	78,53	79,81	96,06	78,79	61,00
Bengkulu	71,70	79,49	63,98	74,16	73,60	78,50	68,45	75,61
Lampung	71,62	72,06	63,69	83,66	65,95	71,99	63,19	62,74
Kep. Bangka Belitung	75,32	89,80	56,48	87,01	72,31	81,25	66,95	69,60
Kepulauan Riau	68,39	82,47	58,35	66,61	70,26	80,16	65,01	66,13
DKI Jakarta	84,70	91,72	73,94	92,97	85,32	89,64	83,19	83,26
Jawa Barat	71,52	83,95	65,22	65,89	73,04	79,10	81,89	51,37
Jawa Tengah	77,44	87,87	67,08	80,77	69,75	79,44	67,28	61,48
D.I.Yogyakarta	82,71	86,25	76,07	88,82	83,19	90,41	77,98	82,38
Jawa Timur	70,36	81,62	56,29	78,54	76,90	85,26	67,44	81,39
Banten	75,50	81,10	63,68	87,22	68,46	74,28	63,72	68,66
Bali	76,13	92,16	61,27	79,56	79,83	94,42	77,42	65,31
Nusa Tenggara Barat	62,62	58,73	62,08	68,38	65,08	51,59	61,11	88,36
Nusa Tenggara Timur	68,81	85,92	65,13	53,12	78,47	93,19	71,69	70,73
Kalimantan Barat	80,58	98,44	63,12	85,84	76,40	96,81	65,57	67,95
Kalimantan Tengah	79,00	92,93	66,42	81,48	73,46	85,07	68,31	67,05
Kalimantan Selatan	70,84	58,43	76,45	77,53	74,76	54,15	85,77	83,17
Kalimantan Timur	77,77	93,28	70,42	69,94	81,24	93,07	82,74	63,99
Kalimantan Utara	-	-	-	-	80,16	98,10	83,65	52,05
Sulawesi Utara	83,94	93,56	80,89	76,68	79,40	86,71	77,92	72,53
Sulawesi Tengah	74,36	86,56	59,01	83,42	76,67	94,60	68,85	66,53
Sulawesi Selatan	75,30	86,27	73,99	63,58	67,90	69,38	64,25	71,84
Sulawesi Tenggara	70,13	90,89	53,20	70,92	69,44	91,14	56,95	61,99
Gorontalo	73,82	82,19	63,67	79,41	76,77	81,35	69,97	81,81
Sulawesi Barat	76,69	90,22	63,64	80,39	68,25	81,88	61,16	62,37
Maluku	72,72	90,85	60,03	70,09	65,90	76,04	63,20	57,43
Maluku Utara	67,90	76,90	60,61	68,16	61,52	73,53	61,00	47,25
Papua Barat	65,65	97,93	39,29	66,93	59,97	92,33	39,48	51,81
Papua	62,15	85,69	42,51	63,75	57,55	82,72	41,81	50,87
<b>Indonesia</b>	<b>73,04</b>	<b>82,62</b>	<b>63,72</b>	<b>75,81</b>	<b>72,82</b>	<b>80,30</b>	<b>70,63</b>	<b>66,87</b>

## XXIII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2015

### A. Indeks Pembangunan Manusia 2015

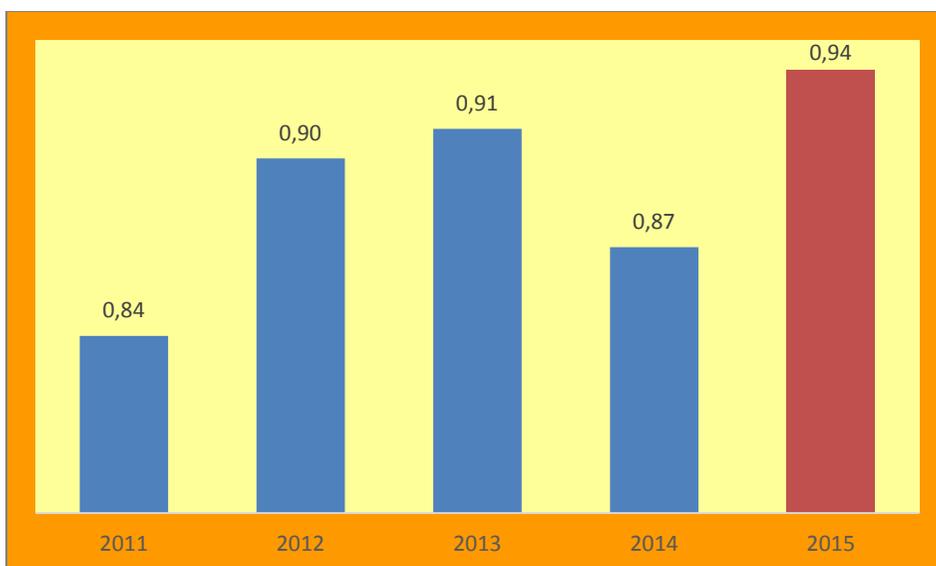
1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
2. Badan Pusat Statistik mengukur IPM di Indonesia menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010).

**Grafik 23.1**  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2015



3. Pada tahun 2015, angka IPM Indonesia sebesar 69,55. Capaian ini telah melampaui target pembangunan nasional pada tahun 2015 yang menargetkan IPM sebesar 69,40. Akselerasi yang tinggi diduga merupakan salah satu penyebab terlampauinya target APBN tersebut. Pada tahun 2015, IPM Indonesia tumbuh 0,94 persen atau bertambah 0,65 poin dibandingkan IPM tahun 2014. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,87 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2010–2015.

**Grafik 23.2**  
Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2015



4. Pertumbuhan IPM yang tinggi pada tahun 2015 didorong oleh peningkatan semua indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2015 indeks pendidikan mencapai 61,00 atau meningkat 0,82 poin dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan indeks standar hidup layak yang mengalami peningkatan 0,75 poin. Sementara itu indeks kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.
5. Peningkatan indeks pendidikan utamanya disebabkan oleh capaian indeks harapan lama sekolah yang meningkat cukup tinggi sebesar 0,90 poin dari tahun 2014. Hal ini menggambarkan semakin tingginya peluang penduduk 7 tahun ke atas dalam mengakses pendidikan dan semakin dekatnya angka harapan lama sekolah tersebut dengan target maksimum yang diharapkan.

**Grafik 23.3**  
**Indeks Komponen IPM Indonesia, 2014–2015**



6. Pada periode 2014–2015, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,37 persen), Provinsi Jawa Timur (1,19 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (1,16 persen). Sebaliknya, pada periode yang sama, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat, yaitu Provinsi Kalimantan Utara (0,17 persen), Provinsi Maluku (0,46 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (0,47 persen). Berdasarkan status pencapaiannya, 8 provinsi berada pada kategori pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, sejak 2014 hingga 2015, masih terdapat satu provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah” atau nilai IPM kurang dari 60, yaitu Provinsi Papua.

**Tabel 23.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2014–2015**

Provinsi	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014–2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,35	69,50	13,53	13,73	8,71	8,77	8 297	8 533	68,81	69,45	0,93
Sumatera Utara	68,04	68,29	12,61	12,82	8,93	9,03	9 391	9 563	68,87	69,51	0,93
Sumatera Barat	68,32	68,66	13,48	13,60	8,29	8,42	9 621	9 804	69,36	69,98	0,89
Riau	70,76	70,93	12,45	12,74	8,47	8,49	10 262	10 364	70,33	70,84	0,73
Jambi	70,43	70,56	12,38	12,57	7,92	7,96	9 141	9 446	68,24	68,89	0,95
Sumatera Selatan	68,93	69,14	11,75	12,02	7,66	7,77	9 302	9 474	66,75	67,46	1,06
Bengkulu	68,37	68,50	13,01	13,18	8,28	8,29	8 864	9 123	68,06	68,59	0,78
Lampung	69,66	69,90	12,24	12,25	7,48	7,56	8 476	8 729	66,42	66,95	0,80
Kep. Bangka Belitung	69,72	69,88	11,18	11,60	7,35	7,46	11 691	11 781	68,27	69,05	1,14
Kepulauan Riau	69,15	69,41	12,51	12,60	9,64	9,65	13 019	13 177	73,40	73,75	0,48
DKI Jakarta	72,27	72,43	12,38	12,59	10,54	10,70	16 898	17 075	78,39	78,99	0,77
Jawa Barat	72,23	72,41	12,08	12,15	7,71	7,86	9 447	9 778	68,80	69,50	1,02
Jawa Tengah	73,88	73,96	12,17	12,38	6,93	7,03	9 640	9 930	68,78	69,49	1,03
DI Yogyakarta	74,50	74,68	14,85	15,03	8,84	9,00	12 294	12 684	76,81	77,59	1,02
Jawa Timur	70,45	70,68	12,45	12,66	7,05	7,14	10 012	10 383	68,14	68,95	1,19
Banten	69,13	69,43	12,31	12,35	8,19	8,27	11 150	11 261	69,89	70,27	0,54
Bali	71,20	71,35	12,64	12,97	8,11	8,26	12 831	13 078	72,48	73,27	1,09
Nusa Tenggara Barat	64,90	65,38	12,73	13,04	6,67	6,71	8 987	9 241	64,31	65,19	1,37
Nusa Tenggara Timur	65,91	65,96	12,65	12,84	6,85	6,93	6 934	7 003	62,26	62,67	0,66
Kalimantan Barat	69,76	69,87	11,89	12,25	6,83	6,93	8 175	8 279	64,89	65,59	1,08
Kalimantan Tengah	69,39	69,54	11,93	12,22	7,82	8,03	9 682	9 809	67,77	68,53	1,12
Kalimantan Selatan	67,47	67,80	11,96	12,21	7,60	7,76	10 748	10 891	67,63	68,38	1,11
Kalimantan Timur	73,62	73,65	13,17	13,18	9,04	9,15	11 019	11 229	73,82	74,17	0,47
Kalimantan Utara	72,12	72,16	12,52	12,54	8,35	8,36	8 289	8 354	68,64	68,76	0,17
Sulawesi Utara	70,94	70,99	12,16	12,43	8,86	8,88	9 628	9 729	69,96	70,39	0,61
Sulawesi Tengah	67,18	67,26	12,71	12,72	7,89	7,97	8 602	8 768	66,43	66,76	0,50
Sulawesi Selatan	69,60	69,80	12,90	12,99	7,49	7,64	9 723	9 992	68,49	69,15	0,96
Sulawesi Tenggara	70,39	70,44	12,78	13,07	8,02	8,18	8 555	8 697	68,07	68,75	1,00
Gorontalo	67,00	67,12	12,49	12,70	6,97	7,05	8 762	9 035	65,17	65,86	1,06
Sulawesi Barat	64,04	64,22	11,78	12,22	6,88	6,94	8 170	8 260	62,24	62,96	1,16
Maluku	65,01	65,31	13,53	13,56	9,15	9,16	7 925	8 026	66,74	67,05	0,46
Maluku Utara	67,34	67,44	12,72	13,10	8,34	8,37	7 234	7 423	65,18	65,91	1,12
Papua Barat	65,14	65,19	11,87	12,06	6,96	7,01	6 944	7 064	61,28	61,73	0,73
Papua	64,84	65,09	9,94	9,95	5,76	5,99	6 416	6 469	56,75	57,25	0,88
<b>Indonesia</b>	<b>70,59</b>	<b>70,78</b>	<b>12,39</b>	<b>12,55</b>	<b>7,73</b>	<b>7,84</b>	<b>9 903</b>	<b>10 150</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>	<b>0,94</b>

## XXIV. SUPLEMEN: METODOLOGI

### 1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*.

Bahan dasar penyusunan diagram timbang (bobot) IHK adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) atau *Cost of Living Survey*. SBH diadakan 5 (lima) tahun sekali, SBH terakhir diadakan tahun 2012, mencakup 136,080 rumah tangga di Indonesia yang dipantau baik pengeluaran konsumsinya maupun jenis barang/jasa yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Berdasarkan hasil SBH diperoleh paket komoditas yang representatif, dapat dipantau harganya, dan selalu tersedia di pasaran. Paket komoditas nasional sebanyak 859 barang/jasa, bertambah dari 774 barang/jasa pada paket komoditas tahun 2007. Hal ini sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Bobot awal setiap barang/jasa merupakan persentase nilai konsumsi setiap barang/jasa terhadap total rata-rata nilai konsumsi per rumah tangga per bulan, berdasarkan hasil SBH. Sejak Januari 2014, penghitungan inflasi mulai menggunakan tahun dasar 2012 (sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007) berdasarkan hasil SBH 2012. Cakupan kota bertambah dari 66 menjadi 82 kota.

Jumlah barang/jasa yang dicakup bervariasi antarkota, yang terkecil di Kota Singaraja sebanyak 225 barang/jasa, sedangkan yang terbanyak di Jakarta sebanyak 462 barang/jasa. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

#### **Inflasi umum (*headline inflation*)**

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

##### a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

### Responden

Harga dari paket komoditas dikumpulkan/dicatat setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan dari pedagang atau pemberi jasa eceran. Mereka termasuk yang berada di pasar tradisional, pasar modern, dan outlet mandiri (seperti toko eceran, praktek dokter, restoran siap saji, bengkel, rumah tangga yang mempunyai pembantu, dan sebagainya),

## 2. Produk Domestik Bruto

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku (nominal PDB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap kategori/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB. Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama.

### 3. Ekspor-Impor

Data Nonmigas diperoleh dari KPPBC (Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), data Migas dari KPPBC, Pertamina dan BP Migas, Sistem pencatatan statistik ekspor menggunakan *General Trade* (semua barang yang keluar dari Daerah Pabean Indonesia tanpa kecuali dicatat), sedangkan impor pada awalnya menggunakan *Special Trade* (dicatat dari Daerah Pabean Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai “luar negeri”), namun sejak bulan Januari 2008 sistem pencatatan statistik impor juga menggunakan *General Trade*, Sistem pengolahan data menggunakan sistem *carry over* (dokumen ditunggu selama satu bulan setelah transaksi, apabila terlambat dimasukkan pada pengolahan bulan berikutnya),

Data ekspor-impor yang disajikan pada bulan terakhir merupakan angka sementara

### 4. Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Data dasar perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 adalah data penduduk hasil SP2010. Penghitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan menggunakan program RUP (Rural Urban Projection).

Penghitungan proyeksi penduduk mempertimbangkan perapihan umur, dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Penentuan asumsi merupakan proses yang paling penting, mencakup asumsi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Asumsi kelahiran dibuat berdasarkan tren tingkat kelahiran di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan berhubungan dengan tingkat kelahiran di masa mendatang. Asumsi tingkat kematian dibuat berdasarkan tren tingkat kematian di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait dengan kesehatan. Asumsi migrasi, untuk proyeksi nasional menyangkut migrasi internasional (melintasi batas negara) masih dianggap nol yaitu seimbang antara yang keluar dan masuk. Sedangkan untuk proyeksi provinsi diperhitungkan migrasi internal yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi.

Proyeksi penduduk Indonesia dibangun dengan dasar berbagai pengetahuan dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga terkait, akademisi dan pakar kependudukan. Hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi dari kinerja pemerintah.

## 5. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk, sedangkan Februari–Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk yang digunakan pada Februari 2014

Definisi yang digunakan antara lain:

**Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

**Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

**Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

**Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

**Pekerja Tidak Penuh** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

**Setengah Penganggur (*Underemployment*)** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

**Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*)** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

**Pengangguran Terbuka (*Unemployment*)**, adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

## 6. Upah Buruh

**Upah Nominal** adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

**Upah Riil** menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa.

Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani. Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan.

Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 33 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 82 kota.

## 7. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani, Indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani, Indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan  $I_t$  dan  $I_b$  adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*), Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan, Responden Survei Harga Perdesaan

adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari BPPBM, Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

## 8. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

**Harga di Tingkat Petani** adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

**Harga di Tingkat Penggilingan** adalah harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

**Harga Pembelian Pemerintah (HPP)** adalah harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Departemen Pertanian, Menko Bidang Perekonomian, dan Bulog.

**Gabah Kering Panen (GKP)** adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

**Gabah Kering Giling (GKG)** adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

**Gabah Kualitas Rendah** adalah gabah yang mengandung kadar air minimum dari 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Survei Monitoring Harga Gabah dilaksanakan di 25 propinsi di Indonesia yang meliputi 158 kabupaten terpilih (sampel). Dari masing-masing kabupaten terpilih diambil tiga kecamatan tetap dan satu kecamatan tidak tetap. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (Maret s.d. Mei dan Agustus) pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

**Beras Kualitas Premium** adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

**Beras Kualitas Medium** adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

**Beras Kualitas Rendah** adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Survei harga produsen beras di tingkat penggilingan dilakukan di 26 provinsi. Responden survei harga produsen beras di penggilingan adalah unit penggilingan di tingkat kecamatan yang memiliki kapasitas giling cukup besar dan dianggap representatif. Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 478 penggilingan, dengan periode survei dilakukan setiap bulan.

#### 9. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya.

Sesuai dengan *Manual Producer Price Index* (PPI), penghitungan IHP yang ideal dirancang menurut tingkatan produksi-*Stage of Production* (SoP), yakni *preliminary demand* (produk awal), *intermediate demand* (produk antara), dan *final demand* (produk akhir). Namun IHP (2010=100) yang disajikan BPS baru mencakup *final demand* (produk akhir).

IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk menyusun diagram timbang yaitu Tabel Input-Output 2010 Updating. Data IHP tersebut disajikan BPS secara triwulanan, dan baru sampai tingkat/level nasional dalam bentuk indeks gabungan, indeks sektor dan indeks subsektor.

Harga yang digunakan untuk menghitung IHP bersumber dari Survei Harga Produsen dan data sekunder. Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan (tanggal 1-15). Pemilihan responden dilakukan secara *purposive*, sedangkan pemilihan komoditas menggunakan kriteria *cut off point*. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

Mulai tahun 2014, pengumpulan data Survei Harga Produsen mengalami perluasan cakupan yaitu Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman. Pengumpulan data dilakukan setiap bulan, tanggal 1-15 di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua). Pada triwulan I-2015, penyajian data IHP (2010=100) selain terdiri dari IHP Gabungan yang

meliputi Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, juga disajikan IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman.

### **B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)**

IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah, Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor,

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dapat digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No,8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No,105/PMK,06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No,11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005, Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi,

Penghitungan IHPB tahun dasar 2010=100 mencakup 317, sedangkan perdagangan internasional masing-masing mencakup 93 kelompok Harmonized System (HS) untuk IHPB ekspor maupun impor, IHPB disajikan dalam 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri, Data harga yang digunakan dalam penghitungan IHPB dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia setiap bulannya, Formula yang digunakan untuk menghitung IHPB adalah formula Modified Laspeyres, Penimbang (*weight*) yang digunakan dalam penghitungan IHPB adalah nilai barang yang dipasarkan oleh pedagang grosir untuk setiap komoditas terpilih yang diolah dari Tabel Input-Output 2010 Updating,

## **10. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen**

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bank Indonesia, Survei ini dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh provinsi di Indonesia, Jumlah sampel STB sebanyak 2,400 perusahaan besar dan sedang, dengan responden pimpinan perusahaan.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui Survei Tendensi Konsumen (STK), Sebelum triwulan I-

2011, BPS hanya melaksanakan STK di wilayah Jabodetabek, tetapi sejak triwulan I-2011 pelaksanaan STK diperluas di seluruh provinsi, Jumlah sampel pada triwulan I-2012 sebanyak 14,232 rumah tangga,

ITB dan ITK dihitung dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa variabel, Tujuan penghitungan ITB dan ITK adalah memberikan informasi dini tentang perkembangan perekonomian baik dari sisi pengusaha maupun sisi konsumen serta perkiraan kondisi bisnis dan kondisi konsumen triwulan mendatang,

## 11. Produksi Tanaman Pangan

Angka produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar).

**Angka Sementara (ASEM) 2015**, diperoleh dari hasil perkalian antara realisasi luas panen dan produktivitas pada periode Januari–Desember 2015.

**Data realisasi luas panen diperoleh dari laporan bulanan Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) secara lengkap dari seluruh kecamatan di Indonesia. Data realisasi produktivitas diperoleh dari hasil Survei Ubinan yang dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian setempat.**

Penghitungan produksi ASEM 2015 dilakukan menurut *subround* sebagai berikut:

1. **Produksi *subround* 1** (Januari–April) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 1 dengan realisasi produktivitas *subround* 1.
2. **Produksi *subround* 2** (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian antara angka realisasi luas panen *subround* 2 dengan angka realisasi produktivitas *subround* 2.
3. **Produksi *subround* 3** (September–Desember) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 3 dengan realisasi produktivitas *subround* 3.
4. **Produksi Januari–Desember** merupakan penjumlahan produksi *subround* 1, *subround* 2, dan *subround* 3.
5. **Luas panen Januari–Desember** merupakan penjumlahan luas panen *subround* 1, *subround* 2, dan *subround* 3.
6. **Produktivitas Januari–Desember** adalah hasil bagi antara produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember.

## 12. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro, Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, Indeks produksi industri besar dan sedang merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilakukan secara bulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala besar dan sedang, Banyaknya perusahaan IBS yang ditetapkan sebagai sampel adalah 1.703 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan “Metode Divisia”, Indeks produksi industri mikro dan kecil merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang dilakukan secara triwulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala mikro dan kecil, Banyaknya perusahaan IMK yang ditetapkan sebagai sampel adalah 24.000 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi IMK triwulanan menggunakan “Metode Paasche yang dimodifikasi”, Semua Indeks disajikan pada level 2-digit KBLI 2009 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009), Indeks produksi IBS dan IMK digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat pertumbuhan produksi IBS dan IMK, yang disajikan dalam BRS Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur triwulanan,

## 13. Pariwisata

**Data pariwisata mancanegara (wisman)** diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew WNA*, baik laut maupun udara. Untuk data karakteristik wisman yang lebih detil diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*). Namun pada tahun 2015 pengitungan Jumlah kunjungan wisman dilengkapi dengan data lalu lintas WNA yang terdiri dari:

- a. Kunjungan minimal WNA melalui pos lintas batas (PLB) darat
- b. Kunjungan WNA lainnya dan WNA berada di Indonesia kurang dari satu tahun

- Tidak bekerja (wisata lanjut usia mancanegara, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dakwah/rohaniawan, berobat, mengadakan penelitian, dan lain-lain)
- Bekerja (bidang konstruksi, konsultan, instruktur, dan lain-lain)

**Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel** diperoleh dari hasil Survei Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya.

**Wisatawan mancanegara (wisman)** ialah setiap orang yang mnegunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

**Pelancong (Excursionist)** adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

**TPK Hotel** adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

**Rata-rata lamanya tamu menginap** adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang mneginap di hotel dan akomodasi lainnya.

#### 14. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s,d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut, Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri, Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

#### 15. A. Kemiskinan

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

- memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
  - c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
  - d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
  - e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2016 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2016. Sebagai informasi tambahan, digunakan juga hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan

## B. Ketimpangan Pengeluaran

- a. Tingkat ketimpangan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan adalah *Gini Ratio* dan ukuran Bank Dunia.
- b. *Gini Ratio* adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara menyeluruh. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna (seluruh penduduk mempunyai pengeluaran yang sama). Sementara Gini Rasio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai Gini Rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
- c. Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk terendah,

kelompok 40 persen penduduk menengah, dan kelompok 20 persen penduduk teratas. Tingkat ketimpangan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) pada kelompok 40 persen penduduk terbawah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
  2. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
  3. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.
- d. BPS dalam mengukur tingkat ketimpangan penduduk Maret 2016 di Indonesia menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2016. Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.

## 16. Produksi Hortikultura

Pengumpulan data produksi dan luas panen hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Tingkat Kecamatan dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). Daftar nama kecamatan yang digunakan keadaan pada Semester I Tahun 2013 dengan jumlah kecamatan sebanyak 6.911 kecamatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pencatatan dan pengolahan baik di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi maupun tingkat nasional.

Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai. Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting.

Bentuk hasil produksi cabai rawit (cabai rawit merah dan cabai rawit hijau) adalah buah segar dengan tangkai.

Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun.

## 17. Struktur Ongkos Usaha Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan 2014

Survei usaha rumah tangga pertanian menggunakan 2 jenis kerangka sampel yaitu kerangka sampel pemilihan blok sensus dan pemilihan rumah tangga. Untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 yang distratifikasi menurut jenis komoditas utama yang diurutkan menurut strata.

Blok sensus yang memenuhi syarat (*eligible*) adalah blok sensus yang memiliki jumlah *eligible* rumah tangga sebanyak 10 atau lebih. Sedangkan, kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman pangan hasil pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut komoditas utama dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan penangkapan ikan, serta tanaman kehutanan siap tebang.

Komoditas yang dicakup dalam survei ini adalah komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian dan memiliki batas minimal usaha yang ditentukan kementerian terkait.

**Batas Minimal Usaha dan Jumlah Sampel**

Subsektor Pertanian	Komoditas	Batas Minimal Usaha	Jumlah Sampel		
			Musim Kemarau	Musim Hujan	Jumlah
Tanaman Pangan	Padi Sawah	1.700 m <sup>2</sup>	55.964	61.291	117.255
	Padi Ladang	1.700 m <sup>2</sup>	2.448	3.949	6.397
	Jagung	1.500 m <sup>2</sup>			67.100
	Kedelai	2.000 m <sup>2</sup>			9.382
Tanaman Hortikultura	Cabai Merah	200 m <sup>2</sup>	13.542	6.090	19.632
	Cabai Rawit	200 m <sup>2</sup>	24.067	10.265	34.332
	Bawang Merah	140 m <sup>2</sup>	6.604	2.993	9.957
	Jeruk	25 pohon			7.300
Tanaman Perkebunan	Kelapa Sawit	15 pohon			27.726
	Karet	250 pohon			46.569
	Tebu	650 m <sup>2</sup>			8.831
Peternakan	Sapi Perah				1.420
	Sapi Potong				59.537
	Ayam Ras Pedaging				897
	Ayam Ras Petelur				568
Budidaya Perikanan	Rumput Laut				8.011
	Bandeng				9.444
	Udang Windu				3.550
Penangkapan Ikan	Kapal Motor				6.733
	Perahu Motor Tempel				22.354
Budidaya Kehutanan	Jati				28.917
	Mahoni				9.880
	Sengon				26.203

Metode sampling yang digunakan adalah dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga usaha subsektor hasil pencacahan lengkap (ST2013-L). Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematis. Rumah tangga usaha pertanian terpilih diwawancarai oleh petugas yang telah dilatih.

Pengumpulan data biaya produksi berpedoman pada prinsip *opportunity cost*, yaitu dilakukan penilaian harga pasar untuk lahan milik sendiri, benih produksi sendiri, dan pekerja keluarga tidak dibayar.

**Usaha pertanian** adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

**Rumah tangga usaha pertanian** adalah rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Untuk tanaman pangan, termasuk juga yang bertujuan untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual.

#### Nilai Produksi:

- **Tanaman pangan:** adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumahtangga dari usaha per satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam.
- **Tanaman hortikultura:** adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan usaha per 100 pohon tanaman menghasilkan selama setahun yang lalu untuk tanaman tahunan (jeruk).
- **Tanaman perkebunan:** adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman perkebunan untuk tanaman semusim (tebu) dan tanaman tahunan (kelapa sawit dan karet) selama setahun yang lalu.
- **Peternakan:** adalah total nilai produksi yang bersumber dari pertambahan bobot, produksi telur dan susu, produksi ikutan, dan jasa peternakan selama setahun dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha peternakan per ekor (sapi potong dan sapi perah) atau per 1.000

ekor (ayam ras petelur), atau per 5.000 ekor (ayam ras pedaging) yang cara pemeliharaan tenak dikandangan.

- Budidaya ikan: adalah nilai produksi budidaya yang dihasilkan rumah tangga usaha budidaya ikan per siklus per satuan tertentu (rumput laut, bandeng dan udang windu dalam satuan hektar).
- Penangkapan ikan: adalah nilai dari produksi hasil tangkapan rumah tangga usaha penangkapan ikan dalam satu trip yang dihitung mulai dari berangkat melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat asal.
- Tanaman kehutanan: adalah nilai produksi (selisih nilai dari tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang) dan ongkos produksi untuk usaha budidaya tanaman kehutanan yang siap tebang dan atau ditebang selama setahun yang lalu per 100 pohon.

#### **Ongkos/Biaya Produksi:**

- Tanaman pangan: adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (padi adalah gabah kering panen/GKP, jagung adalah pipilan kering, dan kedelai adalah biji kering) dan sudah memasukkan perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas bunga yang dihitung dengan cara imputasi sesuai harga pasar.
- Tanaman hortikultura: adalah rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk usaha satu hektar tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan per 100 pohon untuk tanaman tahunan yang menghasilkan (jeruk) pada periode pencacahan yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (cabai merah dan cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai, bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun, dan jeruk adalah buah segar) dan sudah memperkirakan/mengimputasi besarnya sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan bunga kredit model sendiri/bebas bunga.

- Tanaman perkebunan: adalah seluruh ongkos/biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu untuk seluruh bidang tanaman untuk tanaman semusim dan pada seluruh pengeluaran tanaman perkebunan semusim yang panen. Benih, tanaman pelindung, pupuk, stimulan, dan pestisida yang bukan pembelian diperkirakan nilai sesuai harga setempat.
- Peternakan: adalah biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu oleh rumah tangga yang cara pemeliharaan ternak dikandangan. Biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar dibayarkan oleh peternak ditambah dengan imputasi dari biaya yang tidak dibayarkan oleh peternak seperti biaya pakan yang tidak dibeli, biaya pengurusan ternak oleh pekerja tidak dibayar (peternak atau pekerja keluarga).
- Budidaya ikan: adalah biaya yang meliputi biaya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, pakan dihitung baik yang berasal dari pembelian maupun bukan pembelian (diperkirakan nilainya), upah pekerja baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (diperkirakan upahnya), dan biaya lainnya mencakup sewa lahan (termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri dan bebas sewa), alat/sarana usaha (termasuk perkiraan bebas sewa dan perbaikan kecil/pemeliharaan) dan lainnya (bunga kredit/pinjaman, penyusutan barang modal, pajak tak langsung, pengangkutan, jasa perikanan, dan sebagainya).
- Penangkapan ikan: adalah biaya yang meliputi upah pekerja dihitung untuk pekerja dibayar maupun perkiraan upah untuk pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah), oli/pelumas, garam/es, perbekalan baik yang berasal dari pembelian maupun perkiraan nilai dari bukan pembelian, biaya lainnya (sewa alat/sarana, penyusutan barang modal), dan lainnya (umpan, pajak tak langsung, jasa perikanan, wadah, dan sebagainya).
- Tanaman kehutanan: adalah seluruh ongkos/biaya yang dikeluarkan yang sudah termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas sewa selama setahun yang lalu per 100 pohon untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang (tanaman yang sudah cukup umur dan secara ekonomis sudah dapat dipanen/ditebang atau digunakan kayunya).

**Periode tanam musim kemarau (MK)** adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Februari–September 2013 dan atau Februari–Mei 2014.

**Periode tanam musim hujan (MH)** adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Oktober 2013–Januari 2014.

**Produktivitas ayam ras petelur** adalah jumlah butir telur yang dihasilkan dari 1.000 ekor ayam ras petelur produktif per hari.

#### **Survei Kehutanan 2014**

Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling dua tahap terstratifikasi. Pada tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus (blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan (yang di-*overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan) dan diurutkan menurut strata), dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga hasil ST2013-L. Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih 10 rumah tangga secara sistematis. Jumlah sampel untuk Survei Kehutanan sebanyak 99.993 rumah tangga.

**Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

**Rumah tangga di sekitar kawasan hutan** adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

**Perladangan berpindah** adalah suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional/pindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air.

**Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar** adalah kegiatan memungut/mengambil hasil hutan dan juga menangkap satwa-satwa liar di hutan seperti: memungut kayu, getah, kulit kayu, buah-buahan, rumput, rotan, tumbuhan obat, gaharu, serta menangkap ayam hutan, babi hutan, rusa, dan sebagainya.

#### **18. Pendataan Potensi Desa (Podes)**

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan

infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Podas 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu: desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait). Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Salah satu tujuan podas adalah menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah, seperti perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG.

BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. IKG disusun melalui metode Analisis Faktor. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

## 19. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail *spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi *real-time* yang beredar di internet, dan sebagainya. Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan

merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

## 20. Perdagangan Komoditas Strategis 2015

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2015 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup 186 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 152 kabupaten/kota. Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Perusahaan perdagangan terdiri dari perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, subdistributor, agen, sub-agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk perusahaan non perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha pertanian, industri pengolahan dan peternakan. Komoditi yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 5 komoditi, yaitu: beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras. Produsen jagung, bawang merah, dan cabai merah didekati melalui petani komoditas terpilih. Produsen beras didekati melalui industri penggilingan padi. Sementara itu produsen daging ayam ras didekati melalui kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, serta pedagang ayam ras yang melakukan pembelian ayam hidup lalu dipotong dan dilakukan proses pembersihan bulu dan dijual kembali ke pedagang daging ayam ras lainnya. Kerangka sampel yang dibentuk ada dua, yaitu kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Banyaknya sampel perusahaan/usaha/pengusaha perdagangan menengah dan besar serta produsen secara keseluruhan sebanyak 3.500 perusahaan. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi utama yang diperdagangkan berdasarkan 5 komoditi terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri penggilingan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

## 21. Indeks Demokrasi Indonesia

- a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Aspek demokrasi tersebut adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

- b. Dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal), (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
- c. Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator, variabel, dan aspek; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Demokrasi Indonesia.
- d. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 1 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- e. Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.

## 22. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja

Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

### Ketersediaan Data

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010–SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional–SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah	1 007 436	26 572 352

Keterangan:

- \* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- \*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

### Variabel dalam IPM

#### 1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

## 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

## 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

## 4. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

### Menghitung Indeks Komponen

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710  
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046  
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)

ISSN 2087-930X



9 772087 930006

Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

### Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

### Pengelompokan IPM

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

IPM < 60 : IPM rendah

60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang

70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi

IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi